

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2005 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2015**



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2005 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berperan penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
dan  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2005 - 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA DAN URAIAN RPJP DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Sistematika RPJP Daerah disusun sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN JEMBER
  - BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - BAB IV : VISI, DAN MISI DAERAH KABUPATEN JEMBER
  - BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
  - BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN
- (1) Uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.

**Pasal 4**

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan.

**Pasal 5**

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Periodisasi pelaksanaan RPJP Daerah terbagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu :
- Tahap Pertama (2005 - 2010);
  - Tahap Kedua (2010 - 2015);
  - Tahap Ketiga (2015 - 2020);
  - Tahap Keempat (2020 - 2024).
- (2) RPJP Daerah dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Juli 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 30 Desember 2015

**Pit. SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER,**

ttd

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650309 198602 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 NOMOR 4**



**HARI MUJIANTO, SH.,MSI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610312 198603 1 014

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 212-4/2015

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya perlunya penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Jember dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Jember digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Jember pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jember.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung kelancaran koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

( R P J P D )

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2005 – 2025

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2015



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

**TAHUN 2005 – 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**TAHUN 2015**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Landasan Hukum .....	I - 2
1.3. Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya .....	I - 4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I - 5
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I - 5
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 10
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II - 25
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 55
<b>BAB III. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS</b>	
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	
3.1.1 Bidang Pendidikan .....	III - 1
3.1.2 Bidang Kesehatan .....	III - 2
3.1.3 Bidang Sarana Prasarana Daerah.....	III - 2
a. Energi Listrik .....	III - 3
b. Air Bersih .....	III - 4
c. Jaringan Drainase.....	III - 5
d. Jalan dan Jembatan .....	III - 5
e. Sarana Angkutan Umum.....	III - 6



f. Telekomunikasi dan Informasi .....	III - 6
3.1.4 Permasalahan Pembangunan Aspek Daya Saing Daerah..	III - 7
3.2. Isu Strategis .....	III - 9
a. Kependudukan .....	III - 9
b. Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan.....	III - 10
c. Lingkungan .....	III - 16
d. Pendidikan .....	III - 17
e. Kesehatan .....	III - 18
f. Sumberdaya Alam .....	III - 20
g. Keagamaan Masyarakat.....	III - 22
h. Infrastruktur .....	III - 23
i. Politik, Hukum dan Pemerintahan.....	III - 26
<b>BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH</b>	
4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Jember .....	IV - 1
4.2. Misi Pembangunan Kabupaten Jember .....	IV - 4
4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jember.....	IV - 5
<b>BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH</b>	
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 .....	V - 1
5.2. Tahapan dan Prioritas .....	V - 11
5.2.1 Tahap Lima Tahun ke-1 (2010 - 2015).....	V - 11
5.2.2 Tahap Lima Tahun ke-2 (2010 - 2015) .....	V - 18
5.2.3 Tahap Lima Tahun ke-3 (2015 - 2020) .....	V - 25
5.2.4 Tahap Lima Tahun ke-4 (2020 - 2025) .....	V - 32
<b>BAB VI. KAJIAN PELAKSANAAN</b> .....	VI - 1



## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Ketinggian wilayah Kabupaten Jember .....	II - 2
Tabel	2.2	Kemiringan lahan Kabupaten Jember .....	II - 3
Tabel	2.3	Penggunaan lahan Kabupaten Jember .....	II - 5
Tabel	2.4	Nama Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan Kabupaten Jember	II - 7
Tabel	2.5	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2010 berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 .....	II - 10
Tabel	2.6	PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga berlaku tahun 2006-2010 .....	II - 11
Tabel	2.7	PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga konstan tahun 2000 tahun 2006-2010 .....	II - 13
Tabel	2.8	Pertumbuhan PDRB sektoral Kabupaten Jember tahun 2006- 2010 atas dasar harga konstan 2000 (persen).....	II - 14
Tabel	2.9	PDRB per kapita Kabupaten Jember tahun 2006-2010 .....	II - 17
Tabel	2.10	Perkembangan angka partisipasi sekolah tahun 2006-2010 .....	II - 19
Tabel	2.11	Pencapaian program perbaikan gizi masyarakat tahun 2009- 2011 .....	II - 19
Tabel	2.12	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) Tahun 2006-2010 .....	II - 20
Tabel	2.13	Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Jember berdasarkan PPLS tahun 2008 .....	II - 21
Tabel	2.14	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember.....	II - 24
Tabel	2.15	Perkembangan jumlah lembaga siswa dan guru PAUD tahun 2006-2010 .....	II - 26
Tabel	2.16	Perkembangan jumlah lembaga siswa dan guru pendidikan Dasar tahun 2006-2010 .....	II - 26
Tabel	2.17	Perkembangan jumlah lembaga siswa dan guru pendidikan Menengah tahun 2006-2010 .....	II - 27
Tabel	2.18	Perkembangan tenaga kesehatan tahun 2006 .....	II - 28



Tabel	2.19 Perkembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Masyarakat tahun 2006-2010 .....	II - 28
Tabel	2.20 Jumlah posyandu .....	II - 29
Tabel	2.21 Kondisi persampahan tahun 2006-2010 .....	II - 30
Tabel	2.22 Perkembangan sarana dan prasarana air bersih masyarakat tahun 2006-2010 .....	II - 30
Tabel	2.23 Perkembangan panjang dan kondisi jalan tahun 2006 – 2010 .....	II - 31
Tabel	2.24 Perkembangan jumlah dan panjang jembatan tahun 2006-2010 .....	II - 32
Tabel	2.25 Kondisi rumah yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2006-2010 .....	II - 33
Tabel	2.26 Kondisi keluarga yang menggunakan Jamban tahun 2006-2010 .....	II - 33
Tabel	2.27 Keragaan koperasi tahun 2006-2010 .....	II - 34
Tabel	2.28 Perkembangan peserta KB baru per Mix Kontrasepsi Tahun 2006-2010 .....	II - 35
Tabel	2.29 Pencapaian KB mandiri tahun 2006-2010 .....	II - 35
Tabel	2.30 Perkembangan jumlah koleksi perpustakaan tahun 2006-2010 .....	II - 36
Tabel	2.31 Perkembangan pengunjung perpustakaan tahun 2006-2010 .....	II - 36
Tabel	2.32 Pelayanan dokumen pencatatan sipil tahun 2006-2010 .....	II - 36
Tabel	2.33 Jumlah pencari kerja berdasarkan kualifikasi pendidikan Kabupaten Jember tahun 2005-2009 .....	II - 37
Tabel	2.34 Perkembangan tempat ibadah tahun 2005-2010 .....	II - 38
Tabel	2.35 Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Aspek Layanan Wajib di Kabupaten Jember.....	II - 39
Tabel	2.36 Keragaan perkembangan luas panen produktivitas dan Produksi tanaman pangan Kab.Jember tahun 2005-2010 .....	II - 45
Tabel	2.37 Keragaan produksi tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Jember tahun 2005-2010 .....	II - 46



Tabel 2.38 Keragaan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Jember tahun 2005-2010 .....	II - 47
Tabel 2.39 Keragaan Perkembangan Produksi air tawar di Kabupaten Jember tahun 2005-2009 .....	II - 48
Tabel 2.40 Keragaan perkembangan populasi ternak Kabupaten Jember tahun 2004-2009 .....	II - 48
Tabel 2.41 Produksi peternakan Kabupaten Jember tahun 2004-2009 .....	II - 49
Tabel 2.42 Luas Area Kehutanan Kabupaten Jember Tahun 2004-2009 .....	II - 49
Tabel 2.43 PRDB Kabupaten Jember Menurut Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Harga Dasar Berlaku (Jutaan Rupiah) Tahun 2005-2010. ....	II - 51
Tabel 2.44 Perkembangan Pelanggan dan KVA terpasang untuk PLN Menurut Jenis Tarif dan Pengguna Tahun 2006-2010 .....	II - 52
Tabel 2.45 Hasil Capaian Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Fokus Layanan Wajib di Kabupaten Jember.....	II - 52
Tabel 2.46 Luas dan Tata Guna Lahan Pertanian Tahun 2006-2010.....	II - 56
Tabel 2.47 Ketersediaan pangan tahun 2006-2010.....	II - 57
Tabel 2.48 Perkembangan jumlah wisatawan tahun 2006-2010 .....	II - 58
Tabel 2.49 Perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja tahun 2008-2010. ....	II - 58
Tabel 2.50 Perkembangan pengeluaran SIUP dan investasi tahun 2008-2010. ....	II - 59
Tabel 2.51 Perkembangan penerbitan TDP dan TDG tahun 2006-2010 .....	II - 59
Tabel 2.52 Jumlah PNS sesuai jenjang kepangkatan tahun 2006-2010.....	II - 60
Tabel 2.53 Perkembangan tingkat pendidikan PNS tahun 2006-2010 .....	II - 60
Tabel 2.54 Perkembangan jumlah PNS dalam jabatan struktural dan fungsional tahun 2006-2010 .....	II - 61
Tabel 2.55 Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Jember .....	II - 62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah.....	I – 8
Gambar 1.2 Sistem manajemen pemerintahan atau pembangunan Berdasarkan Dasar Hukum dan Penanggung Jawab (Daerah) .....	I - 9
Gambar 1.3 Diagram hubungan perencanaan pembangunan dengan Rencana Tata Ruang .....	I - 10
Gambar 2.1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Jember tahun 2006-2010 .....	II - 9
Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember tahun 2006-2010 .....	II - 13
Gambar 2.3 Perkembangan laju inflasi Kabupaten Jember tahun 2006-2010 .....	II - 17
Gambar 2.4 Perkembangan indeks ketimpangan wilayah Kabupaten Jember tahun 2006-2010.....	II - 18
Gambar 2.5 Perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Jember tahun 2006-2010.....	II - 22
Gambar 2.6 Nilai Tukar Petani tahun 2006-2010 .....	II - 57



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER  
TANGGAL :  
NOMOR : 4 TAHUN 2015

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Jember yang terletak di bagian Timur Propinsi Jawa Timur memiliki lokasi yang sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya - Banyuwangi. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Letak geografis Kabupaten Jember diantara 7°59'6" sampai 8°33'56" Lintang Selatan dan 113°16'28" sampai 114°03'42" Bujur Timur dengan Iklim Tipe B dan sebagian C berdasarkan Schmidt dan Ferguson. Untuk curah hujan di kawasan ini bervariasi antara 2.544 - 3.478 mm per tahun, dengan topografi berbukit-bukit dengan kisaran elevasi dari tepi laut hingga ketinggian 1.223 mdpl, sedangkan kriteria jenis tanah umumnya merupakan asosiasi dari jenis aluvial, regosol dan latosol.

Semenjak terbentuknya hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember beserta segenap komponen masyarakat telah mengupayakan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era reformasi, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative*



*advantages*) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*.

Sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pembangunan Daerah di daerahnya.

Beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kurun waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan kurun waktu 1 tahun.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tujuan pembangunan di Kabupaten Jember dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 - 2025.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur RPJPD Kabupaten Jember di era desentralisasi ini, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

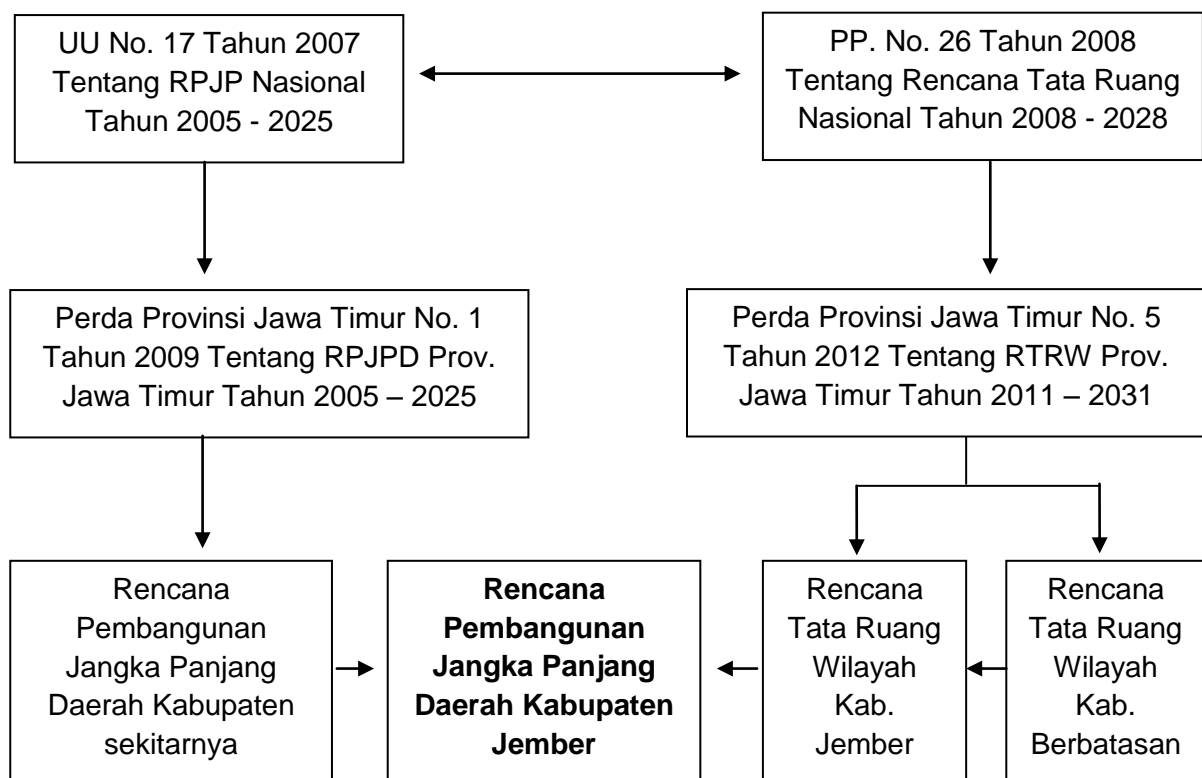


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

### 1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 penyusunannya memperhatikan keselarasan dengan dan sekaligus mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jember dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJPD Kabupaten Jember juga memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Jember. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan dalam pemanfaatan struktur dan pola ruang dan dapat dihindari adanya konflik pemanfaatan ruang wilayah. Secara skematik, pola hubungan antara RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 dengan dokumen Rencana Pembangunan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar I.1**  
**Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Jember**  
**Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**





#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan RPJPD, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.
- BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisi: (1) Aspek Geografi dan Demografi, mencakup: karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum, dan (4) Aspek Daya Saing Daerah.
- BAB III     ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, analisis yang dilakukan meliputi perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Jember, identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan Kabupaten Jember, identifikasi permasalahan untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Jember, penelaahan RPJMN dan RPJMD daerah sekitar, serta penelaahan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Isu-isu strategis ini yang akan menentukan kinerja pembangunan di masa mendatang, yang meliputi: (1) Permasalahan pembangunan, dan (2) Isu-isu strategis.
- BAB IV     VISI, DAN MISI DAERAH, menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jember Tahun 2005-2025, serta keterkaitannya dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
- BAB V      ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, menggambarkan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi, serta tahapan dan prioritas yang ditetapkan.
- BAB VI     KAIDAH PELAKSANAAN, menjelaskan bahwa RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD dalam kurun waktu lima tahunan serta kaidah pelaksanaan.

#### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RPJPD adalah: (1) agar tersedia dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap jangka waktu lima tahunan; dan (2) agar tersedia arah



pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan RPJPD adalah :

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi, SDM, sarana-prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan;
2. Merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Jember dalam jangka panjang 20 tahun ke depan;
3. Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan;
4. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Propinsi Jawa Timur, dan Kabupaten sekitar yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jember;
5. Mendorong terciptanya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan lima tahunan;
6. Mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah;
7. Mendorong tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
8. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jember. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disajikan meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi 7<sup>o</sup>59'6" sampai 8<sup>o</sup>33'56" Lintang Selatan dan 113<sup>o</sup>16'28" sampai 114<sup>o</sup>03'42" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km<sup>2</sup>, dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km<sup>2</sup>. Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut :

1. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi.
2. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, dimana merupakan bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m).
3. Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen.

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian daerah perkotaan Jember lebih kurang 87 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0–25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan



Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jember memiliki ketinggian yang bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jember berada pada area dataran rendah.

**Tabel 2.1**  
**Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember**

No.	Ketinggian	Luas	
		Km <sup>2</sup>	%
1.	0 – 25 meter	591,20	17,95
2.	25 – 100 meter	681,68	20,70
3.	100 – 500 meter	1.243,08	37,75
4.	500 – 1000 meter	520,43	15,80
5.	> 1.000 meter	256,95	7,80
	<b>Jumlah</b>	<b>3.293,34</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2011*

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15% menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40% menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air.



**Tabel 2.2**  
**Kemiringan Lahan Kabupaten Jember**

No.	Kelas Lereng	Luas	
		Km <sup>2</sup>	%
1.	Datar (0 - 2%)	1.205,47	36,60
2.	Landai (2 - 15%)	673,76	20,46
3.	Agak curam (15 - 40%)	384,03	11,66
4.	Sangat Curam (> 40%)	1.030,07	31,28
	<b>Jumlah</b>	<b>3.293,34</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2011

Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang yang akan ditetapkan, baik dipandang dari segi potensi, kendala lingkungan, maupun dari segi dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahannya. Di samping itu topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah penempatan aktivitas yang akan dikembangkan pada suatu daerah.

Morfologi wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh kawasan perbukitan. Daerah dengan kemiringan antara 8 – 15% dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Daerah dengan kemiringan diatas 30% merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara dan timur cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah selatan-barat merupakan daerah landai dan dekat dengan laut yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan, pertanian, dan perkebunan.

Dataran wilayah Kabupaten Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm.

Kabupaten Jember mempunyai jenis tanah yang sangat bervariasi. Ada 16 jenis tanah di Kabupaten Jember yang terdistribusi secara menyebar, yaitu :

1. Asosiasi andosol coklat kekuningan dan regosol coklat kekuningan.
  - a. Komplek mediteran merah dan litosol.
  - b. Alluvial coklat kekelabuan.
  - c. Alluvial hidromort.
  - d. Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan.
2. Asosiasi gley humus rendah dan alluvial kelabu.
  - a. Regosol kelabu.
  - b. Komplek regosol kelabu dan litosol.



- c. Regosol coklat kekelabuan.
  - d. Regosol coklat, bahan induk endapan pasir.
  - e. Regosol coklat.
  - f. Komplek regosol dan litosol.
  - g. Komplek latosol kemerahan dan litosol.
  - h. Latosol coklat kemerahan.
3. Asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu.
- a. Komplek latosol coklat kekuningan dan litosol.

Tekstur tanah didominasi oleh tekstur sedang (lempung), meliputi 79,32% dari luas daerah. Kecamatan yang memiliki tekstur sedang terluas adalah Kecamatan Tempurejo sedangkan yang memiliki area tersempit adalah Kecamatan Gumukmas. Untuk tanah yang bertekstur halus sebesar 19,50% dari luas wilayah yang mayoritas terdapat di Kecamatan Puger. Adapun untuk tanah yang bertekstur kasar sebesar 1,18% dari luas wilayah banyak terdapat di Kecamatan Sumberjambe.

Tingkat erosi di Kabupaten Jember cukup rendah, yaitu sekitar 94,12% merupakan daerah bebas erosi dengan jenis tanah alluvial, gley, regosol, andosol, mediteran, dan latosol. Ditinjau dari segi drainase, 99,60% dari wilayah Kabupaten Jember merupakan daerah bebas genangan. 0,39% merupakan daerah tergenang periodik, dan hanya 0,01% merupakan daerah tergenang rawa.

Batuan-batuan pembentuk daerah di Kabupaten Jember terdiri dari 5 formasi batuan, yaitu :

1. Meocine limestone, banyak dijumpai di daerah selatan.
2. Alluvium, banyak dijumpai di bagian tengah dan tenggara.
3. Granit, banyak terdapat di lereng bukit sebelah timur.
4. Meocine sedimentasi facies, di bagian timur.
5. *Young quaternary product*, di lereng gunung sebelah timur laut dan selatan.

Kabupaten Jember mempunyai banyak sungai/kali yang bermanfaat untuk pertanian. Beberapa sungai yang cukup besar adalah :

1. Kali Bedadung, merupakan sungai yang membelah Kabupaten Jember di tengah-tengah. Hulu sungai berasal dari pegunungan Hyang yang banyak terdapat mata air.
2. Kali Mayang, merupakan sungai yang bermata air dan hulu sungai berasal dari Pegunungan Raung yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.
3. Kali Sanen, merupakan sungai yang bermata air dan hulu sungai berasal dari Pegunungan Raung. Kali Sanen bertemu dengan Kali Mayang di Desa Sumberrejo dan bermuara di Samudera Indonesia.



4. Kali Jatiroto, merupakan perbatasan dengan Kabupaten Lumajang yang bermata air dan hulu sungai dari Pegunungan Hyang, bermuara di Samudera Indonesia.

Iklim di Kabupaten Jember adalah iklim tropis. Angka temperatur berkisar antara 23°C – 31°C, dengan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan September sampai bulan Januari. Sedangkan curah hujan cukup banyak, yakni berkisar antara 1.969 mm sampai 3.394 mm. Curah hujan di Kabupaten Jember dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu :

1. 0 – 1.500 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Puger, Wuluhan dan Kecamatan Gumukmas.
2. 1.500 – 1.750 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Kencong dan Ambulu.
3. 1.750 – 2.000 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Sumbersari, Patrang, Arjasa, Mayang, Silo, Mumbulsari, Rambipuji, Jenggawah, Umbulsari, dan Kecamatan Balung.
4. 2.000 – 2.500 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Kaliwates, Pakusai, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Tempurejo, Sukorambi, dan Kecamatan Bangsalsari.
5. > 2.500 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Tanggul, Panti, dan Kecamatan Sumberbaru.

Ditinjau dari sudut geografisnya wilayah Kabupaten Jember seluas 3.293,34 Km<sup>2</sup> (329.334 Ha) terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penggunaan Lahan Kabupaten Jember**

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan	121.039,61	36,75
2.	Perkampungan	31.877,00	9,68
3.	Sawah	86.568,18	26,29
4.	Tegal	43.522,84	13,22
5.	Perkebunan	34.590,46	10,50
6.	Tambak	368,66	0,11
7.	Rawa	35,62	0,01
8.	Semak/padang rumput	289,06	0,09
9.	Tanah rusak/tandus	1.469,26	0,45
10.	Lain-lain	9.574,26	2,91
	<b>Jumlah</b>	<b>329.334,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2011*



Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur; (2) Kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember (100 m), sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air; (3) Kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang; (4) Kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa; (5) Kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari.

Kawasan budidaya terdiri dari: (1) Pertanian Tanaman Pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota; (2) Perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditi kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditi tembakau, tebu dan kelapa; (3) Perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong; perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari; (4) Pertambangan atau Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumpalsari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji; (5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi; (6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumpalsari dan Arjasa; (7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan.

Kondisi lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Jember sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini sangat sesuai mengingat mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Jember adalah di sektor pertanian.

Kawasan hutan produksi yang ada di Kabupaten Jember adalah berupa hutan jati dan hutan kayu lainnya. Persebaran kawasan hutan produksi ini berada di kawasan perbatasan Kabupaten Jember dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Misalnya, pada sebelah utara Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebelah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, kawasan hutan produksi juga banyak ditemui di bagian selatan Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Untuk kawasan industri, di Kabupaten Jember mayoritas berupa industri pengolahan hasil pertanian dan pergudangan yang mengolah tembakau. Persebaran lokasi industri ini berada di wilayah bagian barat dan timur Kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Bangsalsari, Rambipuji, Balung, Jenggawah, Arjasa, Pakusari, Kalisat, dan Sukowono.



Untuk kawasan permukiman, persebarannya merata di Kabupaten Jember dengan kepadatan rendah – sedang. Sedangkan untuk kawasan permukiman di wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari memiliki kepadatan sedang – tinggi.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 966 dusun/lingkungan, 4.127 RW dan 14.166 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km<sup>2</sup> atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km<sup>2</sup> atau 0,76%. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Kencong	5	24	123	526	65,92
2.	Gumukmas	8	24	159	452	82,98
3.	Puger	12	37	215	646	148,99
4.	Wuluhan	7	25	126	719	137,18
5.	Ambulu	7	27	198	637	104,56
6.	Tempurejo	8	29	123	441	524,46
7.	Silo	9	41	213	627	309,98
8.	Mayang	7	24	109	347	63,78
9.	Mumbulsari	7	26	86	463	95,13
10.	Jenggawah	8	36	93	524	51,02
11.	Ajung	7	33	113	491	56,61
12.	Rambipuji	8	42	150	517	52,80
13.	Balung	8	27	100	369	47,12
14.	Umbulsari	10	26	153	450	70,52
15.	Semboro	6	14	114	326	45,43
16.	Jombang	6	17	132	393	54,30
17.	Sumberbaru	10	36	166	599	166,37
18.	Tanggul	8	24	140	507	199,99
19.	Bangsalsari	11	40	253	570	175,28
20.	Panti	7	26	91	423	160,71
21.	Sukorambi	5	16	78	258	60,63
22.	Arjasa	6	26	64	253	43,75
23.	Pakusari	7	26	96	293	29,11
24.	Kalisat	12	51	152	478	53,48
25.	Ledokombo	10	39	147	422	146,92



No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (Km <sup>2</sup> )
26.	Sumberjambe	9	58	103	426	138,24
27.	Sukowono	12	27	143	374	44,04
28.	Jelbuk	6	42	78	236	65,06
29.	Kaliwates	7	32	152	490	24,94
30.	Sumpersari	7	33	152	505	37,05
31.	Patrang	8	38	119	404	36,99
	<b>Jumlah</b>	<b>248</b>	<b>966</b>	<b>4.127</b>	<b>14.166</b>	<b>3.293,34</b>

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2011*

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dalam melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

Adapun kawasan rawan bencana tersebut terdiri dari :

1. Kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu kawasan yang memiliki Patahan atau sesar (atau istilah *geology*-nya "*fault*") pada lapisan batuan bumi yg memungkinkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yg lainnya. Wilayah rawan bencana terutama rawan gempa, gerakan tanah dan tanah longsor, banjir lumpur, erosi, dan wilayah aliran lahar gunung berapi terutama yang mempunyai tekstur tanah halus dan ketebalan soil melebihi 90 cm. Kawasan ini di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Sukorambi, Bangsalsari, Tanggul, Sukowono, Sumberjambe, Silo, Tempurejo, dan Sumberbaru.
2. Kawasan rawan angin topan yang perlu diperhatikan di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Patrang, Sukorambi, Arjasa, Kalisat, Pakusari, dan Mayang.
3. Kawasan rawan kebakaran hutan meliputi Kecamatan Panti, Bangsalsari, Sukorambi, Tanggul, Sumberbaru, Arjasa, Jelbuk, Silo, dan Tempurejo.

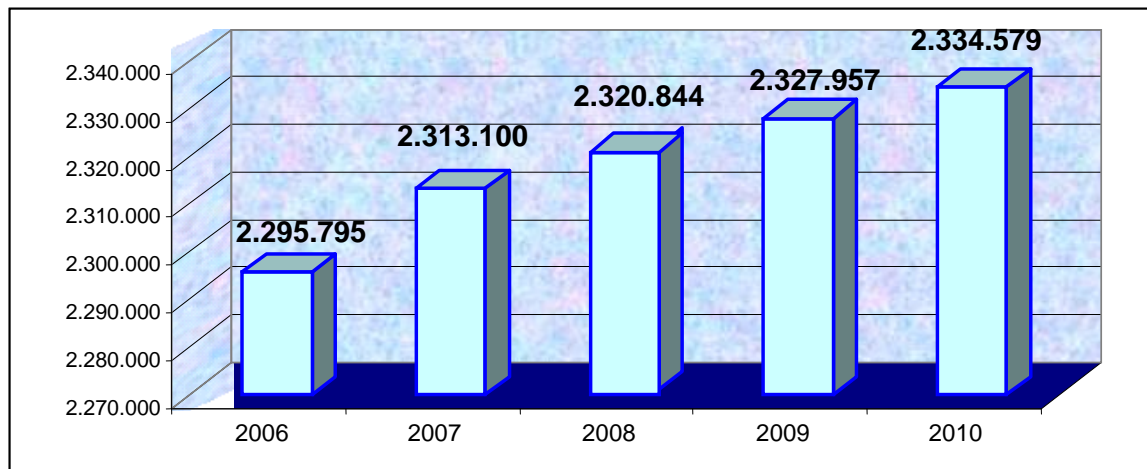
Akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam ini sangat merugikan serta penderitaan bagi manusia karena dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk terus menjalankan estafet pembangunan, menanamkan investasi yang lebih besar, menciptakan kegiatan baru maupun melaksanakan upaya pengembangan gagasan bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Arahan pengembangan yang dilakukan pada kawasan rawan bencana adalah dengan menciptakan kesempatan yang sama bagi penduduk untuk dapat merasa aman di daerah tempat

tinggalnya. Pengembangan ini berarti memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menangani masalah bencana di daerahnya.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Jember adalah sebesar 2.334.579 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,42% per tahun selama kurun waktu 2006 – 2010.

**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010**



Peningkatan jumlah penduduk tersebut mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk yang juga mengalami peningkatan dari 697,10 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2006 menjadi 708,88 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2010. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi pada wilayah ibu kota kabupaten seperti Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, Patrang dengan tingkat kepadatan masing-masing 4.485,20 jiwa/km<sup>2</sup>, 3.408,34 jiwa/km<sup>2</sup> dan 2.553,96 jiwa/km<sup>2</sup>. Padahal ketiga wilayah tersebut memiliki%tase luas wilayah yang relatif kecil terhadap luas Kabupaten Jember, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 0,76%, 1,12% dan 1,12%.

Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Tempurejo dengan kepadatan 134,73 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Silo dengan kepadatan 335,02 jiwa/km<sup>2</sup> dengan proporsi luas wilayah masing-masing 15,95% dan 9,41%.

Berdasarkan komposisi penduduknya, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.164.715 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebesar 1.181.136 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin sebesar 96,71. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Jember lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.



**Tabel 2.5**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2010**  
**Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010**

No.	Kecamatan	Jml Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
1	Kencong	65.173	65,92	988,67
2	Gumukmas	79.224	82,98	954,74
3	Puger	114.506	148,99	768,55
4	Wuluhan	114.695	137,18	836,09
5	Ambulu	105.103	104,56	1.005,19
6	Tempurejo	70.663	524,46	134,73
7	Silo	103.850	309,98	335,02
8	Mayang	48.362	63,78	758,26
9	Mumbulsari	62.339	95,13	655,30
10	Jenggawah	81.318	51,02	1.593,85
11	Ajung	74.416	56,61	1.314,54
12	Rambipuji	78.934	52,80	1.494,96
13	Balung	77.005	47,12	1.634,23
14	Umbulsari	69.539	70,52	986,09
15	Semboro	43.475	45,43	956,97
16	Jombang	50.003	54,30	920,87
17	Sumberbaru	99.416	166,37	597,56
18	Tanggul	82.760	199,99	413,82
19	Bangsalsari	113.905	175,28	649,85
20	Panti	59.399	160,71	369,60
21	Sukorambi	37.950	60,63	625,93
22	Arjasa	38.055	43,75	869,83
23	Pakusari	41.713	29,11	1.432,94
24	Kalisat	74.962	53,48	1.401,68
25	Ledokombo	62.528	146,92	425,59
26	Sumberjambe	60.126	138,24	434,94
27	Sukowono	58.734	44,04	1.333,65
28	Jelbuk	31.962	65,06	491,27
29	Kaliwates	111.861	24,94	4.485,20
30	Sumbersari	126.279	37,05	3.408,34
31	Patrang	94.471	36,99	2.553,96
	<b>Jumlah</b>	<b>2.332.726</b>	<b>3.293,34</b>	<b>708,32</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2011

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

PDRB Kabupaten Jember tiap tahun terus mengalami peningkatan, berdasarkan series agregatnya PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 6413924,42 juta



pada Tahun 2006 menjadi Rp. 24.518.550,06 juta pada Tahun 2010. Di awal tahun 2010 efek dari krisis ekonomi global sudah terlupakan dengan membaiknya perekonomian nasional dan provinsi diikuti permintaan beberapa komoditas ekspor Kabupaten Jember yang mulai meningkat, setidaknya menambah semangat para pelaku ekonomi di Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan profit di tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2.6**  
**PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 – 2010**

No.	Lapangan Usaha	2006		2007		2008		2009		2010		Rata-Rata
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Pertanian	6.413.924,42	44,64	7.257.038,34	44,50	8.487.080,66	44,18	9.362.652,83	43,73	10.142.040,88	41,36	43,68
2	Pertambangan dan Galian	550.411,08	3,83	625.293,54	3,83	734.743,60	3,82	814.165,10	3,80	941.885,58	3,84	3,83
3	Industri Pengolahan	1.046.003,47	7,28	1.195.627,39	7,33	1.412.567,16	7,35	1.583.355,19	7,39	1.833.751,26	7,48	7,37
4	Listrik dan Air Bersih	126.391,16	0,88	145.296,67	0,89	174.315,47	0,91	193.419,05	0,90	226.113,71	0,92	0,90
5	Bangunan	468.875,83	3,26	532.925,81	3,27	631.555,60	3,29	711.994,46	3,33	837.229,07	3,41	3,31
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.796.772,62	19,46	3.180.078,54	19,50	3.785.899,85	19,71	4.283.639,97	20,01	5.269.471,63	21,49	20,03
7	Pengangkutan dan Komunikasi	629.889,55	4,38	714.036,35	4,38	845.463,41	4,40	953.423,22	4,45	1.139.252,00	4,65	4,45
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush	894.822,50	6,23	1.026.266,17	6,29	1.215.557,36	6,33	1.363.021,11	6,37	1.599.416,93	6,52	6,35
9	Jasa-Jasa	1.441.605,02	10,03	1.629.569,15	9,99	1.922.968,32	10,01	2.146.901,69	10,03	2.529.388,99	10,32	10,08
<b>Kabupaten Jember</b>		<b>14.368.695,65</b>	<b>100,00</b>	<b>16.306.131,96</b>	<b>100,00</b>	<b>19.210.151,43</b>	<b>100,00</b>	<b>21.412.572,62</b>	<b>100,00</b>	<b>24.518.550,05</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Sektor pemberi kontribusi nilai tambah terbesar dalam PDRB Kabupaten Jember pada kurun waktu 2006 – 2010 adalah Pertanian dengan capaian rata-rata 43,68%. Sedangkan sektor kontributor terkecil adalah listrik, gas, dan air bersih dan sektor bangunan sebesar 0,90% dan 3,31%. Sektor pertanian menunjukkan kecenderungan menurun di setiap tahunnya, dengan kontraksi rata-rata 12%. Sejak krisis moneter 1998, jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian meningkat mencapai hampir 50%. Pada tahun 2010, pekerja sektor pertanian mencapai 61,37%. Transformasi perekonomian dari primer ke sektor industri dan jasa masih belum berhasil, karena penyerapan tenaga kerja justru meningkat di sektor pertanian.

Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung berasnya Provinsi Jawa Timur, mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar (*leading sector*) dalam perekonomian Kabupaten Jember sehingga dapat dikatakan struktur ekonomi di Jember merupakan tipe agraris. Karena perekonomian Jember pada umumnya berbasis pada pertanian, maka pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak dan penting sehingga diharapkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor yang memiliki pangsa terbesar kedua dalam



struktur perekonomian setelah sektor pertanian. Masih memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten, terutama pada sub sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan maraknya mini market/ supermarket baru seperti indomaret dan alphamart di berbagai pelosok kecamatan dan pusat perbelanjaan seperti *golden market*, *carefour*, matahari *departement store* dan *roxy* masih menunjukkan eksistensinya. Di wilayah kecamatan kota pendirian mini market/super market tampak berjamur dengan radius lokasi tidak lebih dari satu kilometer. Nampak bahwa usaha perdagangan saat ini merupakan usaha yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan resiko minimal sektor ini mampu memberi keuntungan yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Selain itu, untuk berusaha di bidang perdagangan tidak memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dibutuhkan pelaku usaha sektor lainnya.

Pada tahun 2006 sektor perdagangan, hotel dan restoran berperan sebesar 19,46%, sementara di tahun 2010 peranannya meningkat menjadi 21,49% dengan peningkatan sebesar 88,41%. Pulihnya daya beli masyarakat menunjukkan efek krisis global sudah mulai kecil pengaruhnya sehingga menunjukkan pertumbuhan yang positif.

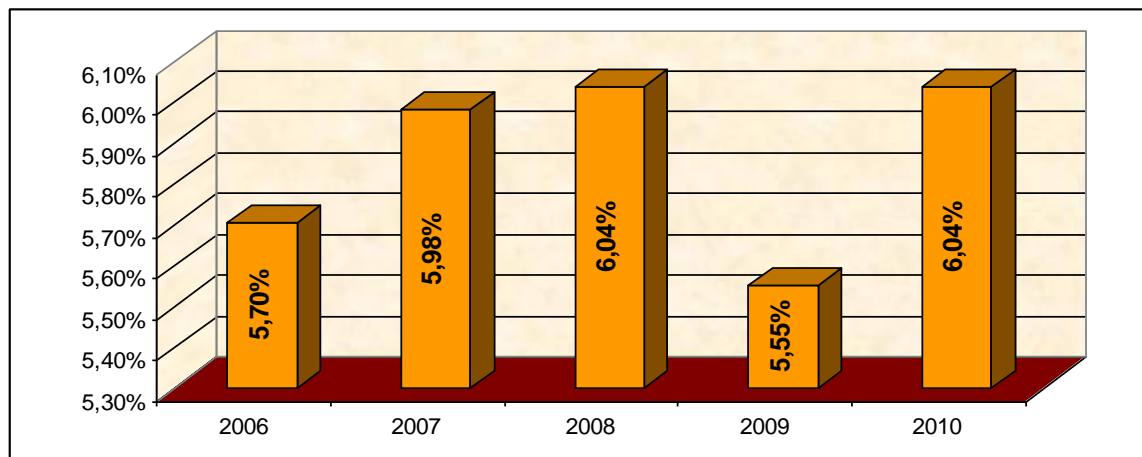
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2010 tercatat sebesar 6,04%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh percepatan pertumbuhan di semua sektor. Sektor-sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,48%, sektor konstruksi sebesar 8,91%, sektor Industri Pengolahan (8,37%) dan sektor jasa-jasa sebesar 8,30%. Sementara itu percepatan pertumbuhan yang terendah dialami oleh sektor Pertanian sebesar 3,02% dan sektor Pertambangan sebesar 6,20%. Apabila dilihat dari sumbangan pertumbuhan masing-masing sektor, sektor-sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 1,98%, sektor pertanian sebesar 1,22%, dan sektor jasa-jasa sebesar 0,83%.

**Tabel 2.7**  
**PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Tahun 2006 – 2010**

No.	Lapangan Usaha	2006		2007		2008		2009		2010		Rata-Rata
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Pertanian	3.839.516,41	44,10	4.066.679,48	44,07	4.298.765,91	43,94	4.523.817,37	43,81	4.660.286,31	42,56	43,70
2	Pertambangan dan Galian	386.466,21	4,44	408.812,67	4,43	433.731,45	4,43	458.400,09	4,44	486.803,27	4,45	4,44
3	Industri Pengolahan	620.399,32	7,13	658.977,22	7,14	699.822,39	7,15	742.533,94	7,19	804.706,33	7,35	7,19
4	Listrik dan Air Bersih	77.441,93	0,89	82.545,87	0,89	89.061,21	0,91	94.741,93	0,92	101.948,09	0,93	0,91
5	Bangunan	273.122,08	3,14	289.478,95	3,14	306.906,27	3,14	325.166,10	3,15	354.138,32	3,23	3,16
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.687.146,92	19,38	1.788.879,22	19,39	1.898.922,10	19,41	2.010.988,73	19,47	2.201.538,49	20,11	19,55
7	Pengangkutan dan Komunikasi	381.753,24	4,38	403.878,91	4,38	432.791,36	4,42	464.652,26	4,50	497.882,55	4,55	4,45
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush	581.559,88	6,68	619.871,41	6,72	659.745,51	6,74	695.475,37	6,73	747.826,74	6,83	6,74
9	Jasa-Jasa	858.590,40	9,86	907.644,15	9,84	964.081,94	9,85	1.010.959,81	9,79	1.094.890,16	10,00	9,87
<b>Kabupaten Jember</b>		<b>8.705.996,39</b>	<b>100,00</b>	<b>9.226.767,88</b>	<b>100,00</b>	<b>9.783.828,14</b>	<b>100,00</b>	<b>10.326.735,60</b>	<b>100,00</b>	<b>10.950.020,26</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

**Gambar 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010**



Pada kurun waktu tahun 2006 – 2010, pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten Jember menunjukkan “*ascending economic growth trend*” atau trend pertumbuhan ekonomi yang terus menaik. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi hanya mampu tumbuh sebesar 5,70%, hal ini akibat pengaruh krisis global dunia seperti menurunnya nilai ekspor dan permintaan luar negeri akan produk perkebunan dan industri yang memang mempunyai kualitas ekspor. Keadaan semakin



membalik permintaan luar negeri akan produk ekspor mulai meningkat begitu juga dengan optimis pasar dan meningkatnya daya beli masyarakat maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,04%.

**Tabel 2.8**  
**Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persen)**

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Primer (Agriculture)</b>					
1. Pertanian	5,40	5,92	5,71	5,24	3,02
2. Pertambangan dan Galian	3,34	5,78	6,10	5,69	6,20
<b>Sekunder (Manufacture)</b>					
3. Industri Pengolahan	3,96	6,22	6,20	6,10	8,37
4. Listrik dan Air Bersih	8,36	6,59	7,89	6,38	7,61
5. Bangunan	6,52	5,99	6,02	5,95	8,91
<b>Tersier (Jasa)</b>					
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	7,20	6,03	6,15	5,90	9,48
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,73	5,80	7,16	7,36	7,15
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perush	7,06	6,59	6,43	5,42	7,53
9. Jasa-Jasa	5,57	5,71	6,22	4,86	8,30
<b>PDRB</b>	<b>5,70</b>	<b>5,98</b>	<b>6,04</b>	<b>5,55</b>	<b>6,04</b>

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian semakin terlihat lesu. Pada tahun 2006 tumbuh sebesar 5,40%, tahun 2007 tumbuh sebesar 5,92%, tahun 2008 pertumbuhan hanya mencapai 5,71% dan di tahun 2009 masih tumbuh walaupun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,24% terus menurun, puncaknya **pada tahun 2010 sektor pertanian hanya tumbuh 3,02%**.

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di tahun 2010 semakin kecil akibat anomali cuaca yang terjadi di tahun 2010 dimana hujan turun hampir sepanjang hari. Musim kemarau, yang seharusnya terjadi antara bulan Juni - Oktober, juga tidak terkena dari guyuran hujan. Musim panen beberapa komoditas yang diharapkan tepat memasuki musim kemarau tidak berjalan sesuai target. Hujan yang tiba-tiba turun membuat panen tembakau dan tebu mengalami kegagalan paling parah dibanding tanaman perkebunan lainnya.

Sebagai komponen sektor primer, sektor penggalian juga berperan sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya industri



bahan galian non logam) dan sektor bangunan. Naiknya permintaan dari kedua sektor tersebut mengangkat pertumbuhan sektor penggalian walaupun secara alamiah bahan baku di sektor ini semakin berkurang. **Pada tahun 2010 sektor penggalian masih mampu tumbuh sebesar 6,20%.**

**Sektor industri pengolahan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 8,37%**, sangat tinggi karena jauh di atas pertumbuhan ekonomi secara total yaitu 6,04%. Padahal pada tahun 2006, sektor industri pengolahan hanya tumbuh sebesar 3,96% dan terus meningkat sampai dengan Tahun 2010.

Perkembangan yang menggembirakan juga diusung oleh dua komoditas vital publik yaitu komoditas air minum dan listrik. Untuk komoditas air minum yang dikelola PDAM Kabupaten Jember terjadi peningkatan nilai penjualan air minum yang disalurkan pada tahun 2010 walaupun hanya sebesar 9,83% dibandingkan peningkatan nilai penjualan di tahun 2009 sebesar 2,53% seiring dengan bertambahnya pelanggan PDAM sebesar 3,37% dibandingkan tahun 2009.

Sedangkan untuk komoditas listrik yang dikelola PT.PLN juga terjadi peningkatan jumlah pelanggan listrik selama lima tahun terakhir, tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 23,09% jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan tahun 2009. Begitu pula jumlah kWh dijual mengalami peningkatan sekitar 13,54% dalam periode yang sama. Dua hal tersebut menyebabkan **sektor “listrik, gas dan air bersih” mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,61% di tahun 2010.**

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sama tingginya dengan sektor listrik, gas dan air adalah sektor “pengangkutan dan komunikasi” dimana selama tiga tahun terakhir selalu diatas tujuh%. Untuk tahun 2010 **sektor “pengangkutan dan komunikasi” tumbuh sebesar 7,15%**. Hal ini didukung oleh tumbuhnya beberapa usaha baru di bidang jasa angkutan travel, jasa angkutan barang dan agen biro jasa perjalanan seperti biro jasa penjualan tiket pesawat secara online untuk di sektor angkutan dan semakin banyaknya pengguna jasa telekomunikasi yang menjangkau sampai ke pelosok pedesaan baik yang *fixed phone* sampai penggunaan telepon selular.

Sektor bangunan merupakan tulang punggung atau ruh dari ruang lingkup cakupan sektor infrastruktur. Pada tahun 2010, dengan optimisme pasar yang kuat dan adanya pembangunan beberapa wilayah perumahan baru, rumah toko, ruko/komplek pertokoan baru, pembangunan hotel royal di jalan karimata dan proyek-proyek konstruksi yang dibiayai oleh dana APBD seperti jaringan irigasi, perbaikan jalan dan perbaikan fasilitas umum serta kegiatan konstruksi yang dilakukan rumah tangga dalam hal renovasi rumah. **Akibatnya sektor bangunan tumbuh sebesar 8,91% di tahun 2010.** Pertumbuhan sektor infrastruktur diyakini bakal ikut mendorong tumbuhnya banyak kegiatan usaha lainnya.

Sektor yang sebagian besar berperan sebagai penyalur bagi produk sektor produksi ini,



sepertinya sudah menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Secara keseluruhan sektor ini sudah bangkit sejak tahun 2001 lalu. Pada tahun 2006 sampai tahun 2009 sektor perdagangan, hotel dan restoran ini walaupun terlihat kecenderungan menurun secara perlahan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,20%, 6,03%, 6,15% dan 5,90%, mulai bangkit kembali di tahun 2010 dengan membaiknya daya beli masyarakat sehingga **mampu tumbuh optimal sebesar 9,48%**. Jika dilihat dari sisi peranan subsektornya nampak peran terbesarnya adalah dari subsektor perdagangan. Ternyata subsektor perdagangan ini di samping memberikan kontribusi terbesar, juga memiliki pertumbuhan paling cepat. Pada tahun 2010 ini peranan subsektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember sudah sebesar 18,77%, sehingga bisa dipastikan perkembangannya mampu mewarnai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember.

Perekonomian Kabupaten Jember saat ini sepenuhnya bertumpu pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, terutama dengan subsektor perdagangannya. Subsektor perdagangan yang disebut-sebut sebagai motor penggerak ekonomi, sampai saat ini masih cukup eksis dalam meningkatkan pertumbuhan. Berbeda sedikit dengan subsektor hotel, sepertinya subsektor hotel masih lebih banyak menggantungkan pada momen-momen penting saja, sehingga pertumbuhannya terkesan sangat fluktuatif. Walaupun ada kenaikan harga BBM pada Tahun 2006, subsektor hotel mulai bangkit kembali disaat gaung dan pelaksanaan Bulan Berkunjung ke Jember ditambah dengan semarak *Jember Fashion Carnival* (JFC) dan publisitas yang semakin meluas.

Tidak kalah pentingnya subsektor restoran, subsektor ini yang tahan banting terhadap resiko kenaikan BBM, perkembangan subsektor restoran diwarnai dengan kinerja restoran franchise *Pizza Hut* dan *Kentucky Fried Chicken* serta dibukanya beberapa pusat jajan serba ada di beberapa tempat strategis dan sampai saat ini masih menunjukkan perkembangan yang baik sehingga tumbuh sebesar 6,18% di tahun 2010 secara tidak langsung menambah pendapatan asli daerah cukup signifikan.

**Sektor “jasa-jasa” mampu membukukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu sebesar 8,30% di tahun 2010**, dibandingkan keadaan tahun 2009 sektor jasa-jasa hanya mampu tumbuh sebesar 4,86% dan merupakan sektor yang tumbuh paling rendah diantara sektor-sektor lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh naiknya anggaran belanja pemerintah dan perkembangan yang terjadi pada jasa swasta baik jasa sosial, hiburan maupun jasa perorangan seperti maraknya bisnis laundry yang mulai berkembang positif di Kabupaten Jember.

Perkembangan PDRB per kapita pada periode 2006 – 2010 menunjukkan kecenderungan terus meningkat, karena pertumbuhan PDRB ADHB lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk.



Pada Tahun 2006, PDRB per kapita Jember mencapai Rp 6,26 juta, dan kecenderungan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya menjadi Rp 10,50 juta pada Tahun 2010.

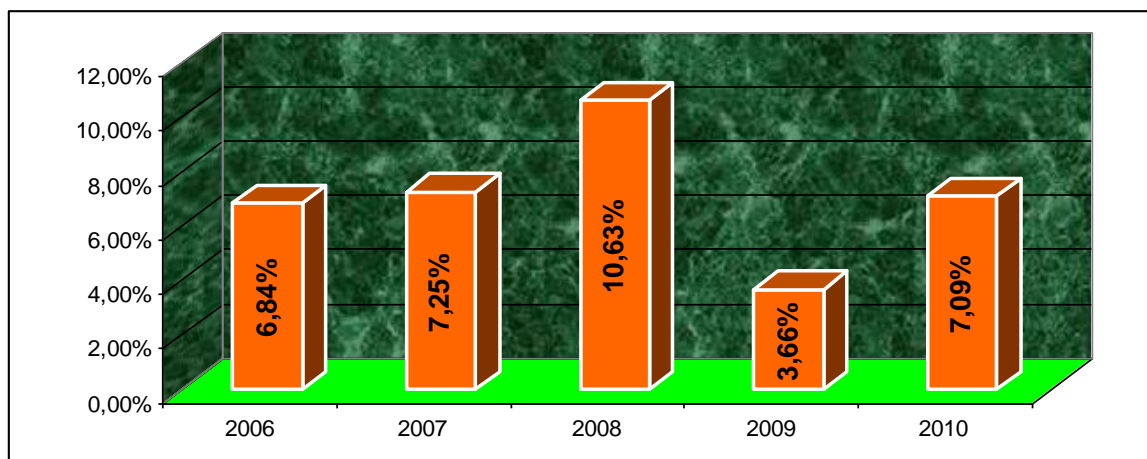
**Tabel 2.9**  
**PDRB per Kapita Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010**

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Nilai PDRB (Rp. Juta)	14.368.695,65	16.306.131,96	19.210.151,43	21.412.572,62	24.518.550,05
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.295.795	2.313.100	2.320.844	2.327.957	2.334.579
PDRB per Kapita (Rp/jiwa)	6.258.702	7.049.471	8.277.226	9.198.010	10.502.343

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

Selanjutnya, dari indikator laju inflasi yang merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Dari grafik dapat dilihat bahwa laju inflasi di Kabupaten Jember menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun pernah mengalami kenaikan akibat krisis ekonomi pada Tahun 2008.

**Gambar 2.3**  
**Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Jember**  
**Tahun 2006 – 2010**



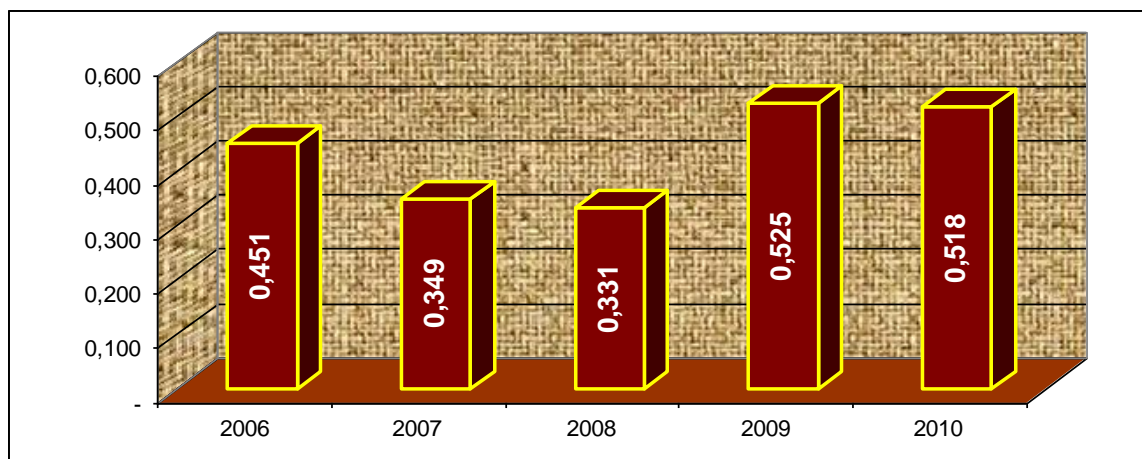
Proses pembangunan di Kabupaten Jember ternyata tidak lepas dari adanya ketimpangan kewilayahan. Ketimpangan terjadi salah satunya karena akibat dari kegiatan ekonomi yang belum merata. Secara makro terdapat kesenjangan kewilayahan khususnya antara Jember Utara dan Jember Selatan, wilayah pegunungan/perbukitan dengan daerah datar. Dikotomi ini tentunya

menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan secara simultan, komprehensif dan berkelanjutan mengingat bahwa potensi kemiskinan dapat timbul akibat adanya kesenjangan wilayah tersebut.

Berdasarkan indeks ketimpangan wilayah, pada kurun waktu 2006 – 2010 Kabupaten Jember mengalami ketimpangan distribusi yang tinggi yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang tidak merata, yang ditunjukkan dengan indeks williamson yang semakin mendekati angka 1. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah :

1. migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang (Pusat Kota Jember), karena di sana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar
2. investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang karena faktor market, dan lain-lain, dimana keuntungan relatif lebih besar demikian pula risiko kerugian relatif lebih kecil pada umumnya
3. kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sosial dan *economic capital* di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar.

**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Indeks Ketimpangan Wilayah Kabupaten Jember**  
**Tahun 2006 – 2010**



Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, sehingga pendidikan merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan masa depan masyarakat, harapan bangsa dan negara.

Salah satu tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Jember adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat



yang berbasis pada kekuatan dan budaya daerah. Pembangunan pendidikan diarahkan pada 3 kebijakan pokok yaitu, pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2006 – 2010**

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	APK PAUD Formal	46,67	51,37	61	61,3	94,4
2.	APK PAUD Non Formal	15	30,52	32,82	35,3	43,99
3.	APK SD/SDLB/MI/Paket A/Salafiyah	108,95	121,35	122,01	121,20	121,47
4.	APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B/ Salafiyah	91,42	98,22	99,49	99,51	99,76
5.	APK SMA/SMALB/MA/SMK/ Paket C	37,80	49,30	56,95	57,01	60,01
6.	Prosentase Buta Aksara Usia > 15 Tahun	4,85	4,69	4,53	4,33	2,89

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Di bidang kesehatan pencapaian keberhasilan yang diperoleh yaitu, menurunnya balita gizi buruk, meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi dan meningkatnya cakupan distribusi vitamin A, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2006 – 2010**

No	Indikator	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Balita Gizi Buruk (kasus)	248	286	102	98	75
2.	Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%)	45,16	35,48	54,84	70,96	67,74
3.	Cakupan Vitamin A (%)	88,08	89,62	85,58	86,07	94,51

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada penanganan masalah umum yaitu masalah substantif dan masalah khusus yaitu penanganan masalah kesejahteraan sosial terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan



Sosial). Penanganan terhadap permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) apabila dilakukan tidak secara tepat akan berakibat pada meningkatnya kesenjangan sosial, melemahnya ketahanan sosial masyarakat, dan mendorong terjadinya konflik sosial terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Tahun 2006 – 2010**

No.	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Keluarga Fakir Miskin	135.041	114.962	102.035	100.160	100.105
2.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	15.616	25.567	25.567	16.623	11.223
3.	Anak Jalanan	69	202	178	270	109
4.	Penyandang Cacat	4.592	4.831	4.826	4.766	4.234
5.	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	7.952	1.056	1.056	1.238	1.115
6.	Anak Terlantar	1.319	1.220	1.100	556	105
7.	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	255	260	260	202	201
8.	Tuna Susila	181	156	156	232	108
9.	Pengemis	200	216	196	336	201
10.	Gelandangan	83	111	116	272	116

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Berdasarkan Data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BPS bahwa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Jember mencapai 237.700 KK, merupakan angka tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka penanggulangan kemiskinan.



**Tabel 2.13**  
**Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Jember**  
**berdasarkan PPLS 2008**

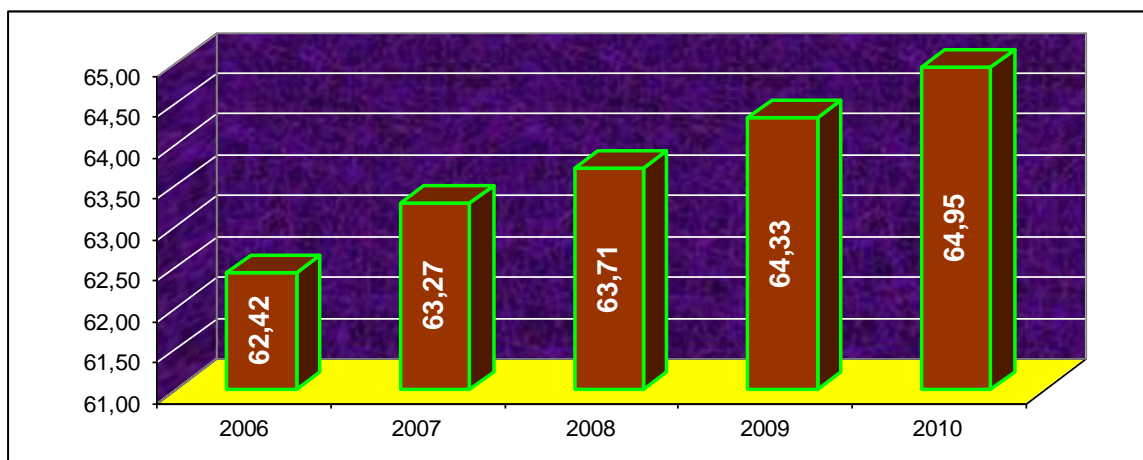
NO.	KECAMATAN	KLASIFIKASI MISKIN			JML RTM
		HAMPIR MISKIN	MISKIN	SANGAT MISKIN	
1	KALISAT	6.810	7.473	1.888	16.171
2	LEDOKOMBO	8.990	5.687	1.082	15.759
3	BANGSALSARI	5.846	6.087	2.830	14.763
4	SUMBERBARU	4.259	6.155	3.534	13.948
5	SILO	5.602	5.848	1.807	13.257
6	SUMBERJAMBE	5.768	5.574	1.485	12.827
7	SUKOWONO	7.044	3.916	868	11.828
8	MUMBULSARI	5.536	3.377	923	9.836
9	TANGGUL	4.585	3.679	1.113	9.377
10	TEMPUREJO	3.527	3.984	1.416	8.927
11	PAKUSARI	4.151	2.989	704	7.844
12	PANTI	3.922	2.716	914	7.552
13	MAYANG	4.119	2.525	756	7.400
14	PATRANG	2.457	3.115	1.827	7.399
15	ARJASA	2.931	2.587	828	6.346
16	AMBULU	2.606	2.062	1.125	5.793
17	JENGGAWAH	3.133	1.755	901	5.789
18	BALUNG	1.508	2.796	1.428	5.732
19	SUMBERSARI	1.570	2.630	1.448	5.648
20	AJUNG	2.575	1.969	1.047	5.591
21	RAMBIPUJI	2.913	1.783	650	5.346
22	JELBUK	3.306	1.692	302	5.300
23	UMBULSARI	2.234	1.924	718	4.876
24	KALIWATES	2.170	1.719	703	4.592
25	PUGER	2.055	1.471	690	4.216
26	JOMBANG	2.036	1.411	666	4.113
27	SUKORAMBI	1.999	1.313	711	4.023
28	WULUHAN	1.737	1.542	697	3.976
29	GUMUKMAS	1.329	1.445	597	3.371
30	KENCONG	1.112	1.381	681	3.174
31	SEMBORO	1.666	945	315	2.926
<b>KABUPATEN JEMBER</b>		<b>109.496</b>	<b>93.550</b>	<b>34.654</b>	<b>237.700</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2011

Komplikasi kemiskinan di Kabupaten Jember seperti wilayah-wilayah lainnya disebabkan karena penyebab kemiskinan tidak saja bisa dibingkai dengan bidang ekonomi yang cukup dilakukan dengan menginjeksi dana kepada masyarakat miskin tersebut, tetapi juga harus menuntaskan masalah yang terkait dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.

Masih banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, kemampuan daya beli dan pendapatan membawa pengaruh yang signifikan pada Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia dimana Kabupaten Jember pada posisi bawah bila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Pada umumnya warga sangat miskin paling banyak tinggal di daerah perkebunan, termasuk di Kabupaten Jember yang memiliki wilayah perkebunan yang luas.

**Gambar 2.5**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember**  
**Tahun 2006 – 2010**



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2006 – 2010, nilai IPM Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan, yang ditopang oleh pencapaian ketiga indikator dalam IPM, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dengan adanya alokasi APBD Kabupaten Jember terhadap ketiga sektor tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diharapkan capaian IPM Kabupaten Jember terus meningkat seiring dengan capaian kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Capaian nilai IPM tentu saja menjadi target bagi setiap daerah dalam mengukuhkan wilayahnya lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Jember di masa mendatang dalam kerangka terwujudnya otonomi daerah yang seutuhnya.

Pada aspek kebudayaan, rata-rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan



satu kebudayaan baru yang bernama budaya (Pendalungan /Pendalungan). Masyarakat (Pendalungan) di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Salah satu kesenian yakni Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember.

Pada aspek pembangunan sosial budaya, upaya peningkatan peran serta pemuda melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pemuda dan olahraga secara lebih terpadu dan sinergis. Pemberian fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan dan juga peningkatan kapasitas dan kualitas, pembinaan, serta pengembangan ketrampilan dan bakat, seni dan budaya, termasuk pembinaan olahraga selama ini telah terselenggara sesuai dengan jalur tugas pokok dan fungsi dari SKPD atau lembaga yang mengampu bidang ini (seperti KONI beserta pengurus cabangnya). Meskipun selama ini sudah berjalan cukup baik, namun dalam proyeksi ke depannya masih perlu dioptimalkan lagi terutama dalam pengembangan dan tindak lanjut terhadap berbagai program penguatan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Pembangunan bidang kepemudaan dan keolah-ragaan di Kabupaten Jember adalah dengan memperhatikan asas kemandirian, yaitu pembangunan kepemudaan dan keolahragaan berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. Asas manfaat meng-hendaki bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insan pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan. Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari kependidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, yang harus dilakukan sejak usia muda. Pembangunan olahraga untuk even-even selama ini dicerminkan pula dari pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mengalami perkembangan yang sangat cepat yang dipusatkan pada kota dan daerah. Dalam rangka pembinaan olahraga telah dibangun dan dikembangkan sejumlah fasilitas olahraga dengan mengacu pada standard internasional.

Prestasi olahraga yang berhasil dicapai atlet-atlet daerah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional sudah pasti akan memberi dampak positif bagi terangkatnya nama baik dan prestise daerah. Oleh karena itu, ke depannya, porsi pembinaan pemuda dan olahraga harus semakin ditingkatkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi dalam suatu wahana yang lebih komprehensif dan integral dengan pelibatan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.



Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat tersaji pada table berikut :

**Tabel 2.14**  
**Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>1.</b>	<b>PDRB</b>					
	Pertumbuhan PDRB atas dasar berlaku	14,368,695	16,306,131	19,210,151	21,412,572	24,518,550
	Pertumbuhan PDRB atas dasar konstan	6,705,996	9.226,767	9.783,828	10,326,735	10,950,020
	PDRB per kapita	6,258,702	7,049,471	8,277,226	9,198,010	10,502,343
<b>2.</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	5,70%	5,99%	6,04%	5,55%	6,04%
<b>3.</b>	<b>Perkembangan laju inflasi</b>	6,84%	7,25%	10,63%	3,66%	7,09%
<b>4.</b>	<b>Perkembangan indeks ketimpangan wilayah</b>	0,451	0,349	0,331	0,525	0,518
<b>5.</b>	<b>Perkembangan IPM</b>	62,42	63,27	63,71	64,33	64,95
<b>6.</b>	<b>Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah</b>					
	APK PAUD Formal	46,67	51,37	61	61,3	94,4
	APK PAUD Non Formal	15	30,52	32,82	35,3	43,99
	APK SD/SDLB/MI/Paket A/Salafiyah	108,95	121,35	122,01	121,20	121,47
	APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B/ Salafiyah	91,42	98,22	99,49	99,51	99,76
	APK SMA/SMALB/MA/SMK/ Paket C	37,80	49,30	56,95	57,01	60,01
	Prosentase Buta Aksara Usia > 15 Tahun	4,85	4,69	4,53	4,33	2,89
<b>7.</b>	<b>Pencapaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>					
	Balita Gizi Buruk (kasus)	248	286	102	98	75
	Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%)	45,16	35,48	54,84	70,96	67,74
	Cakupan Vitamin A (%)	88,08	89,62	85,58	86,07	94,51
<b>8.</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>					
	Keluarga Fakir Miskin	135.041	114.962	102.035	100.160	100.105
	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	15.616	25.567	25.567	16.623	11.223
	Anak Jalanan	69	202	178	270	109



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Penyandang Cacat	4.592	4.831	4.826	4.766	4.234
	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	7.952	1.056	1.056	1.238	1.115
	Anak Terlantar	1.319	1.220	1.100	556	105
	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	255	260	260	202	201
	Tuna Susila	181	156	156	232	108
	Pengemis	200	216	196	336	201
	Gelandangan	83	111	116	272	116

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Capaian indikator aspek pelayanan umum bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu layanan umum wajib dan layanan umum pilihan. Layanan urusan wajib meliputi indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Sedangkan layanan urusan pilihan meliputi indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

**A. Fokus Layanan Urusan Wajib****1. Pendidikan**

Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Selama kurun waktu tahun 2006 – 2010 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan untuk mencapai indikator capaian kinerja perluasan dan pemerataan akses yang dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Jumlah Lembaga, Siswa dan Guru PAUD**  
**Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	<b>Lembaga</b>					
	TK/RA	817	876	832	1.029	1.035
	PAUD (Non Formal)	410	427	620	713	583
2.	<b>Siswa</b>					
	TK/RA	42.759	49.663	45.754	42.197	52.615
	PAUD (Non Formal)	5.100	5.601	22.010	23.673	15.764
3.	<b>Guru</b>					
	TK/RA	2.047	2.839	3.102	3.035	3.035
	PAUD (Non Formal)	1.001	1.077	2.254	3.770	3.770

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

**Tabel 2.16**  
**Perkembangan Jumlah Lembaga, Siswa dan Guru Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	<b>Lembaga</b>					
	SD/SDLB	1.170	1.001	1.015	1.013	1.009
	MI	317	352	348	340	376
	SMP/SMPLB	165	203	239	248	258
	MTs	133	141	146	149	179
	<b>Jumlah</b>	<b>1.785</b>	<b>1.697</b>	<b>1.748</b>	<b>1.750</b>	<b>1.822</b>
2.	<b>Siswa</b>					
	SD/SDLB	223.669	229.683	223.074	222.630	219.070
	MI	39.354	45.989	48.596	42.688	47.726
	SMP/SMPLB	54.540	54.637	61.867	67.755	72.667



No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
	MTs	25.262	28.457	28.376	28.416	30.986
	<b>Jumlah</b>	<b>342.825</b>	<b>358.766</b>	<b>361.913</b>	<b>361.489</b>	<b>370.449</b>
<b>3.</b>	<b>Guru</b>					
	SD/SDLB	11.077	11.893	14.043	12.228	12.316
	MI	2.719	3.051	3.159	3.672	4.171
	SMP/SMPLB	3.626	3.951	4.626	4.615	4.904
	MTs	2.287	2.399	2.133	2.698	3.215
	<b>Jumlah</b>	<b>19.709</b>	<b>21.294</b>	<b>23.961</b>	<b>23.213</b>	<b>24.606</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

**Tabel 2.17**  
Perkembangan Jumlah Lembaga, Siswa dan Guru Pendidikan Menengah  
Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>1.</b>	<b>Lembaga</b>					
	SMA/SMALB	58	61	62	62	70
	MA	49	57	55	55	66
	SMK	36	59	52	52	76
	<b>Jumlah</b>	<b>143</b>	<b>177</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>212</b>
<b>2.</b>	<b>Siswa</b>					
	SMA/SMALB	22.065	24.020	21.674	21.674	22.163
	MA	8.349	9.509	12.950	12.950	11.719
	SMK	13.271	16.576	19.155	19.155	26.906
	<b>Jumlah</b>	<b>43.685</b>	<b>50.105</b>	<b>53.779</b>	<b>53.779</b>	<b>60.788</b>
<b>3.</b>	<b>Guru</b>					
	SMA/SMALB	1.537	1.663	1.779	1.779	1.715
	MA	1.013	1.139	3.669	1.669	1.326
	SMK	1.070	1.637	1.183	1.183	2.225
	<b>Jumlah</b>	<b>3.620</b>	<b>4.439</b>	<b>6.631</b>	<b>4.631</b>	<b>5.266</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

## 2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting dalam proses pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan kesehatan lingkungan serta memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pembangunan kesehatan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Jember dengan



tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencapai “*Terwujudnya Jember Sehat*”. Hal ini mengandung arti bahwa pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mencapai kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Guna meningkatkan akses layanan kesehatan terhadap masyarakat dilaksanakan dengan penambahan tenaga medis dan paramedis, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai berikut.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

Uraian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Dokter Umum	137	146	160	171	186
Dokter Spesialis	54	71	71	85	145
Dokter Gigi	109	73	120	139	148
Perawat	1051	1074	1080	1110	1.453
Bidan	399	403	468	543	546
Bidan Desa	112	120	201	241	376
Dukun Terlatih	1218	1218	1218	1218	1.200

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

No	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Puskesmas	49	49	49	49	49
2.	Puskesmas Perawatan	24	24	28	28	28
3.	Puskesmas Pembantu	132	132	132	136	136
4.	Polindes	117	117	120	122	122
5.	Laboratorium Medis Pemerintah	1	1	1	1	1
6.	Laboratorium Swasta	5	5	5	5	5
7.	RSD	3	3	3	3	3
8.	RS Swasta	8	8	12	12	12
9.	Mobil Pusling	6	5	10	49	49

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*



**Tabel 2.20**  
**Jumlah Posyandu Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

Strata Posyandu	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Pratama	119	44	9	9	15
Madya	1.070	548	326	326	152
Purnama	1.530	2.070	2.217	2.217	2.308
Mandiri	83	157	267	267	344
Jumlah	2.802	2.819	2.819	2.819	2.819

*Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

Dari kondisi posyandu terdapat peningkatan status posyandu purnama dan mandiri tahun 2006 – 2010 cenderung naik karena dilakukan dilaksanakannya revitalisasi posyandu. Dengan demikian diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi.

### 3. Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam menjamin kesinambungan dinamika pembangunan di Kabupaten Jember. Pelestarian sumber-sumber daya alam perlu dilakukan sejak dini sebagai upaya mempertahankan daya dukung wilayah untuk pembangunan saat ini dan masa depan. Terlebih lagi sebagian wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan lindung dan konservasi. Pada kurun waktu 2006 – 2010, pembangunan urusan lingkungan hidup telah menunjukkan kinerja yang baik dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta dalam gerakan rehabilitasi kerusakan lingkungan.

Salah satu aspek dalam pembangunan urusan lingkungan hidup adalah sektor persampahan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah/volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap material yang kita gunakan sehari-hari. Kondisi persampahan Kabupaten Jember periode 2006 – 2010 jumlah timbunan sampah sebesar 15.438.000 m<sup>3</sup> dengan tingkat pertumbuhan sekitar 4,8% per tahun.

Kondisi pelayanan persampahan menunjukkan perkembangan positif. Hal ini dilihat dari timbulan sampah yang terlayani semakin besar pada kurun waktu 2006 – 2010 dengan peningkatan



18,14%, dan sebaliknya sampah yang tidak terlayani semakin menurun. Demikian pula halnya dengan jumlah sampah yang didaur ulang, memiliki peningkatan yang cukup besar (cenderung meningkat), dengan peningkatan rata-rata sebesar 96,57% Secara lengkap kondisi persampahan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.21**  
**Kondisi Persampahan Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

No.	Uraian	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Timbulan Sampah	2.811	2.937	3.069	3.230	3.391	15.438
2.	Terlayani	703	881	1.074	1.292	1.357	5.307
3.	Tidak Terlayani	1.813	1.725	1.716	1.667	1.607	8.528
4.	Daur Ulang	35	88	215	388	427	1.153

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

Akses terhadap air bersih merupakan hal penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Target pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015 yang terkait dengan penyediaan air bersih, antara lain adalah bertujuan untuk mengurangi sampai setengahnya separuh proporsi penduduk tanpa akses yang berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang aman. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember bersama pemangku kepentingan lainnya harus memprioritaskan masalah air bersih menjadi agenda utama dengan cara menyiapkan perencanaan, investasi dan kerangka pendanaan dalam pembangunan infrastruktur bidang air bersih. Kondisi akses masyarakat terhadap air bersih sampai akhir tahun 2010 sebagai berikut.

**Tabel 2.22**  
**Perkembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Masyarakat**  
**Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

Uraian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>A. Perdesaan</b>					
Jumlah KK dg Air Bersih	225.778	233.272	249.681	264.738	272.267
Jumlah KK	358.377	364.487	384.124	395.132	400.636
Persentase Capaian	63	64	65	67	68
<b>B. Perkotaan</b>					
Jumlah KK dg Air Bersih	228.963	243.994	261.774	276.007	283.124
Jumlah KK	305.284	310.820	327.217	336.594	341.183
Persentase Capaian	75	78,5	80	82	83



#### 4. Sarana dan Prasarana Umum

Urusan Pekerjaan Umum merupakan salah satu dari program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan merupakan upaya strategis dalam rangka mendekatkan berbagai pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan pada wilayah Kabupaten Jember pada dasarnya merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kemudahan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan ini mendesak dalam upaya membuka daerah terpencil dan terisolir yang masih ada di wilayah Jember serta meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

Keberhasilan pengelolaan jalan dan jembatan dari tahun 2006 – 2010 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan berbagai potensi wilayah termasuk potensi alam dan ekonomi yang ada di pelosok. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah bertambahnya umur layanan jalan, kelancaran lalu lintas, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku lokal, dan secara umum adalah pemerataan pembangunan prasarana jalan dan jembatan hingga daerah terpencil dan terisolir sehingga komunikasi dan interaksi sosial ekonomi masyarakat makin berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya berbagai kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sampai dengan tahun 2010, maka perkembangan jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

No.	Jalan	Tahun (Km)				
		2006	2007	2008	2009	2010
A.	Jenis Permukaan					
1.	Jalan Aspal	1,501.527	1,560.304	1,654.193	1,705.769	1.768.513
2.	Jalan Kerikil	123.632	90.466	40.321	13.618	262.532
3.	Jalan Tanah	368.901	343.290	299.546	274.673	686.588
	<b>Jumlah</b>	1,994.060	1,994.060	1,994.060	1,994.060	2.717.633
B.	Kondisi Jalan					
1.	Baik	757.743	860.740	909.629	956.309	796.230
2.	Sedang	598.218	631.384	676.384	707.904	960.068
3.	Rusak	458.634	348.082	283.937	259.517	642.086
4.	Rusak Berat	179.465	153.854	124.110	70.330	319.249
	<b>Jumlah</b>	1,994.060	1,994.060	1,994.060	1,994.060	2.717.633

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011



Prasarana jembatan sebagai bagian dari infrastruktur transportasi juga mengalami peningkatan jumlah dan kondisinya. Jumlah jembatan kondisi baik pada tahun 2006 sebanyak 388 buah, pada tahun 2007 sebanyak 344 buah, tahun 2008 sebanyak 353 buah, pada tahun 2009 sebanyak 383 buah dan pada tahun 2010 sebanyak 535 buah. Demikian pula halnya dengan jumlah jembatan kondisi sedang mengalami peningkatan dari 163 buah di tahun 2006 menjadi 167 buah di tahun 2010. Sebaliknya, jembatan kondisi rusak dan rusak berat mengalami penurunan jumlah karena telah dilaksanakannya pembangunan/ pemeliharaan/rehabilitasi terhadap jembatan yang rusak maupun rusak berat. Perkembangan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan tersebut di atas selama tahun 2006 – 2010 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Jumlah dan Panjang Jembatan Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

No.	Kondisi Jembatan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
A.	Jumlah Jembatan					
1.	Baik	338	344	353	383	535
2.	Sedang	163	163	163	163	167
3.	Rusak	40	40	36	15	13
4.	Rusak Berat	12	10	8	8	6
	<b>Jumlah</b>	<b>553</b>	<b>557</b>	<b>560</b>	<b>569</b>	<b>721</b>
B.	Panjang Jembatan					
1.	Baik	414.85	440.35	713.21	973.71	2.370,14
2.	Sedang	985.25	985.25	985.25	985.25	975,99
3.	Rusak	291.15	291.15	243.99	75.19	56,67
4.	Rusak Berat	62.90	50.00	50.00	50.00	31,48
	<b>Jumlah</b>	<b>1754.15</b>	<b>1766.75</b>	<b>1.992.45</b>	<b>2.084.15</b>	<b>3.434,28</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Di bidang perumahan, keberhasilan pembangunan urusan perumahan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai usaha partisipasi dalam rangka menggerakkan budaya swakelola masyarakat dalam bentuk sharing kerja atau sharing dana guna mempercepat pencapaian keseluruhan kebutuhan sarana prasarana lingkungan perumahan melalui pola pemberdayaan.

Pembangunan perumahan dititikberatkan pada penataan permukiman dan lingkungannya, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, dengan maksud untuk mencapai standar kebersihan dan kesehatan sesuai yang dipersyaratkan secara kuantitatif dan kualitatif sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



**Tabel 2.25**  
**Kondisi Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

Uraian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>A. Perdesaan</b>					
Jumlah KK Rumah Sehat	204.275	215.047	245.839	280.544	321.223
Jumlah KK	358.377	364.487	384.124	395.132	432.758
% Capaian	57	59	64	71	74
<b>B. Perkotaan</b>					
Jumlah KK Rumah Sehat	198.435	211.358	235.596	255.811	209.247
Jumlah KK	305.284	310.820	327.217	336.594	260.472
% Capaian	65	68	72	76	80

*Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

**Tabel 2.26**  
**Kondisi Keluarga Yang Menggunakan Jamban Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

Uraian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah KK menggunakan Jamban	325.194	351.362	391.238	424.401	458.353
Jumlah KK	663.661	675.696	711.341	731.726	753.877
Persentase Capaian	49	52	55	58	60

*Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

Di bidang perkoperasian, animo masyarakat Jember untuk mendirikan koperasi baru dari tahun ke tahun relatif stabil rata-rata 40 unit koperasi setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat paling sedikit 800 orang Jember yang bersepakat untuk bekerjasama secara ekonomi. Koperasi apabila dikelola dengan benar merupakan sokoguru perekonomian dan akan memberikan manfaat yang besar bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya sesuai dengan misi “Memberikan kontribusi nyata dalam membangun daerah, regional dan nasional melalui pelayanan, pembinaan, fasilitas dan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan produktifitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM.

Sampai dengan tahun 2010 total koperasi yang ada di Jember berjumlah 1.481 unit dan koperasi yang aktif hanya 900 unit. Tingginya angka koperasi yang tidak aktif disebabkan oleh rendahnya pengetahuan manajemen pengurus, rendahnya kesadaran anggota terkait hak dan kewajibannya serta motivasi pembentukan koperasi.



**Tabel 2.27**  
**Keragaan Koperasi Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

No	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah koperasi yang melaporkan RAT (unit)	309	328	339	392	256
2.	Jumlah anggota (org)	220.765	285.433	343.772	345.937	363.437
3.	Jumlah karyawan (org)	1.685	1.742	1.742	1.797	1.797
4.	Modal (Rp.miliar)	320,604	184,546	220,871	337,284	464.378
5.	Volume usaha (Rp.miliar)	412,579	206,823	259,855	434,371	409.822
6.	SHU (Rp.miliar)	13,933	18,453	19,285	23,305	27.011
7.	Jumlah koperasi (unit)	1.306	1.328	1.340	1.481	1.674
8.	Jumlah koperasi aktif (unit)	997	1.090	748	900	900

**Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011**

Fakta menunjukkan bahwa peran koperasi dalam perekonomian wilayah masih sangat signifikan. Pada tahun buku 2007 dalam kondisi krisis global finansial, volume usaha 328 unit koperasi di Kabupaten Jember masih mencapai Rp. 206,823 miliar meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya akan tetapi masih cukup signifikan member kontribusi dalam PDRB. Angka tersebut masih belum faktual karena masih banyak koperasi wajib RAT yang tidak melaporkan angka-angka secara detail sehingga tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan. Sampai dengan tahun 2010, volume usaha 256 unit koperasi mencapai Rp. 409,822 miliar. Meskipun belum dilakukan kajian menyeluruh pada seluruh koperasi, data menunjukkan indikasi kuat bahwa krisis global finansial yang terjadi sejak tahun 2007 tidak mempengaruhi kinerja koperasi di Kabupaten Jember.

Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Di samping secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, secara mikro Program KB bertujuan untuk membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Program KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jember selama lima tahun dapat diukur melalui peningkatan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Baru sebagaimana tabel-tabel berikut.



**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi**  
**Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

Tahun	PPM	PB	%
2006	86.694	77.426	89,31
2007	84.000	87.403	104,05
2008	90.000	90.457	100,51
2009	84.630	93.831	110,87
2010	90.861	94.918	104,47

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

**Tabel 2.29**  
**Pencapaian KB Mandiri Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember**

Tahun	PA	PA Swasta	%
2006	339.030	127.135	37,50
2007	340.914	126.206	37,02
2008	348.130	131.741	37,84
2009	349.471	133.418	38,18
2010	348.073	130.325	37,44

Sumber : *Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

Peserta KB mandiri rata-rata mencapai 37% - 38% pertahun dari keseluruhan peserta KB aktif. Persentase pencapaian KB mandiri mengalami perubahan yang sedikit fluktuatif, karena peserta KB mandiri memiliki pengetahuan yang cukup baik, sehingga keikutsertaan KB didasarkan atas kebutuhannya. Kemandirian ber-KB di Kabupaten Jember perlu dijaga dan ditingkatkan kesertaannya.

Pembangunan perpustakaan bertujuan mendorong terwujudnya peningkatan SDM, dan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan Jember sampai dengan 2010 telah memiliki 24.966 judul buku dengan jumlah 66.442 eksemplar. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah buku selama kurun waktu 2006 – 2010.



Tabel 2.30

## Perkembangan Jumlah Koleksi Perpustakaan Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember

Koleksi	Tahun					Jmlh
	S/D 2006	2007	2008	2009	2010	
Jumlah Judul	18.553	1.575	2.804	2.034	969	25.935
Jumlah Exemplar	43.604	8.862	9.187	4.789	5.000	71.442

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Jumlah pengunjung Perpustakaan Jember sampai dengan 2010 mencapai 184.032 orang. Tabel berikut menyajikan perkembangan pengunjung perpustakaan kurun waktu 2006 – 2010.

Tabel 2.31

## Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember

No.	Status	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pelajar	6.580	5.073	9.259	8.344	4.473
2.	Mahasiswa	3.981	3.428	7.485	4.182	2.814
3.	Guru	1.007	963	2.665	1.876	1.387
4.	PNS/TNI – Polri	597	491	1.170	513	459
5.	Wiraswasta	2.866	2.563	5.236	3.952	2.518
6.	Pensiunan	249	272	687	303	242
7.	Umum	2.623	2.467	7.785	5.373	4.130
<b>Jumlah</b>		<b>17.903</b>	<b>15.257</b>	<b>34.287</b>	<b>24.543</b>	<b>16.023</b>
<b>Jumlah s/d</b>		<b>93.922</b>	<b>109.179</b>	<b>143.466</b>	<b>168.009</b>	<b>184.032</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah secara terus menerus wajib melaksanakan pemutakhiran data penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelaksanaan kegiatan pelayanan catatan sipil dilakukan untuk mendukung operasional pelayanan dokumen pencatatan sipil, dimana hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32

## Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Jember

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Akta Kelahiran	12.542	8.306	16.255	21.989	8.478



No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
2.	Akta Kelahiran Terlambat	-	5.905	7.582	5.390	8.166
3.	Akta Kelahiran Gratis	1976	807	92	-	-
4.	Akta Perkawinan	51	61	11	39	89
5.	Akta Perceraian	3	2	3	2	21
6.	Akta Kematian	66	79	95	100	79

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Pada aspek ketenagakerjaan kondisi ini mempunyai ancaman yang cukup signifikan di bidang kualifikasi pendidikan, jumlah pengangguran terbuka dan jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas. Pertama kualifikasi pendidikan. Kualifikasi tingkat pendidikan pencari kerja di Kabupaten Jember pada tahun 2005-2009 didominasi oleh tamatan SMA sebesar 60,38% dan sarjana sebesar 23,12%. Sementara itu untuk yang tamat SLTP hanya sebesar 3,79%, sedangkan tenaga kerja yang menamatkan pendidikan tinggi (akademi dan sarjana) hanya sebesar 10,88%. Tabel 2.31 menunjukkan jumlah pencari kerja berdasarkan kualifikasi pendidikan di Kabupaten Jember tahun 2005-2009.

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2005-2009**

Tingkat Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
SD	157	123	229	223	13
SMP	386	263	354	383	157
SMA	10.197	2.191	4.034	4.191	3.973
Akademi	1.786	313	875	1.456	0
Sarjana	3.737	772	1.359	787	2.760

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Peluang adanya persebaran penduduk yang terpusat adalah eratnya hubungan kekerabatan. karakteristik persebaran penduduk (permukiman) pada umumnya dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Artinya bahwa penduduk yang berkoloni (berkelompok) pada suatu tempat tertentu biasanya memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Kondisi ini terutama terjadi di pedesaan, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di perkotaan. Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Jember bersifat *sprawl* atau meloncat sesuai dengan karakteristik fisik alam yang berkontur sangat bervariasi. Persebaran yang terpecah ini merupakan potensi



dalam mewujudkan pola permukiman yang seimbang antara ruang terbangun dan ruang-ruang terbuka hijau, serta memudahkan perwujudan hierarki pelayanan. Namun, dampak negatifnya adalah tingkat pemerataan perekonomian dan sosial yang timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Jember.

Dilihat dari sisi kebudayaan masyarakatnya, budaya Madura dan campuran Madura-Jawa sangat melekat di masyarakat Kabupaten Jember secara umum. Sebagian besar masyarakat masih memelihara budaya gotong royong dan kebersamaan, serta kekeluargaan dan kekerabatan yang kental. Nilai-nilai sosial yang tinggi tersebut merupakan potensi besar dalam mendukung perencanaan partisipatif maupun konsep pengembangan *bottom-up planning*. Oleh karena itu, adat istiadat yang telah ada secara turun temurun tersebut perlu terus dipertahankan sebagai salah satu modal dasar dalam pengembangan wilayah Kabupaten Jember.

Perkembangan tempat ibadah sebagai sarana menjalankan ibadah bagi pemeluk masing-masing pemeluk agama yang ada di Kabupaten Jember dapat diketahui pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Tempat Ibadah Tahun 2005-2010 di Kabupaten Jember**

No	Agama	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Masjid	2.351	2.006	1.974	1.999	2.112	2.355
2.	Langgar/Musholla	17.885	17.885	9.539	9.561	13.102	10.285
3.	Gereja	68	84	84	86	87	86
4.	Pura	11	10	10	11	11	12
5.	Vihara	4	3	2	2	2	2

Berdasarkan tabel 2.33 diketahui bahwa jumlah Masjid pada empat tahun pertama mengalami penurunan, pada tahun 2005 jumlah masjid sebanyak 2.351 menurun menjadi 1.999 pada tahun 2008, namun mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan 2010, begitu juga dengan Musholla/Langgar mengalami penurunan dari 17.885 pada tahun 2005 menjadi 9.539 pada tahun 2007, kemudian mengalami peningkatan pada dua tahun selanjutnya yaitu naik menjadi 13.102 sampai tahun 2009. Jumlah tempat ibadah agama Katholik mengalami kenaikan tetapi tidak begitu tinggi, dari 68 gereja pada tahun 2005 menjadi 86 gereja pada tahun 2010, begitu juga dengan pura. Hal sebaliknya yaitu Vihara mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah aspek pelayanan umum fokus pada layanan wajib tersaji pada table berikut :



Tabel 2.35  
Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan  
Pada Aspek Layanan Wajib di Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>A</b>	<b>Pendidikan</b>					
<b>1</b>	<b>Pendidikan paud</b>					
	<b>Lembaga</b>					
	TK/RA	817	876	832	1.029	1.035
	PAUD (Non Formal)	410	427	620	713	583
	<b>Siswa</b>					
	TK/RA	42.759	49.663	45.754	42.197	52.615
	PAUD (Non Formal)	5.100	5.601	22.010	23.673	15.764
	<b>Guru</b>					
	TK/RA	2.047	2.839	3.102	3.035	3.035
	PAUD (Non Formal)	1.001	1.077	2.254	3.770	3.770
	<b>Lembaga</b>					
	SD/SDLB	1.170	1.001	1.015	1.013	1.009
	MI	317	352	348	340	376
	SMP/SMPLB	165	203	239	248	258
	MTs	133	141	146	149	179
<b>2</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>					
	<b>Siswa</b>					
	SD/SDLB	223.669	229.683	223.074	222.630	219.070
	MI	39.354	45.989	48.596	42.688	47.726
	SMP/SMPLB	54.540	54.637	61.867	67.755	72.667
	MTs	25.262	28.457	28.376	28.416	30.986
	<b>Guru</b>					
	SD/SDLB	11.077	11.893	14.043	12.228	12.316
	MI	2.719	3.051	3.159	3.672	4.171
	SMP/SMPLB	3.626	3.951	4.626	4.615	4.904
	MTs	2.287	2.399	2.133	2.698	3.215
<b>3</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>					
	<b>Lembaga</b>					
	SMA/SMALB	58	61	62	62	70



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	MA	49	57	55	55	66
	SMK	36	59	52	52	76
	<b>Siswa</b>					
	SMA/SMALB	22.065	24.020	21.674	21.674	22.163
	MA	8.349	9.509	12.950	12.950	11.719
	SMK	13.271	16.576	19.155	19.155	26.906
	<b>Guru</b>					
	SMA/SMALB	1.537	1.663	1.779	1.779	1.715
	MA	1.013	1.139	3.669	1.669	1.326
	SMK	1.070	1.637	1.183	1.183	2.225
<b>B</b>	<b>Kesehatan</b>					
<b>1.</b>	<b>Tenaga Kesehatran</b>					
	Dokter Umum	137	146	160	171	186
	Dokter Spesialis	54	71	71	85	145
	Dokter Gigi	109	73	120	139	148
	Perawat	1051	1074	1080	1110	1.453
	Bidan	399	403	468	543	546
	Bidan Desa	112	120	201	241	376
	Dukun Terlatih	1218	1218	1218	1218	1.200
<b>2.</b>	<b>Sarana Prasarana Kesehatan</b>					
	Puskesmas	49	49	49	49	49
	Puskesmas Perawatan	24	24	28	28	28
	Puskesmas Pembantu	132	132	132	136	136
	Polindes	117	117	120	122	122
	Laboratorium Medis Pemerintah	1	1	1	1	1
	Laboratorium Swasta	5	5	5	5	5
	RSD	3	3	3	3	3
	RS Swasta	8	8	12	12	12
	Mobil Pusling	6	5	10	49	49
<b>3.</b>	<b>Jumlah Posyandu</b>					
	Pratama	119	44	9	9	15



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Madya	1.070	548	326	326	152
	Purnama	1.530	2.070	2.217	2.217	2.308
	Mandiri	83	157	267	267	344
<b>C.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
<b>1.</b>	<b>Kondisi Persampahan</b>					
	Timbulan Sampah	2.811	2.937	3.069	3.230	3.391
	Terlayani	703	881	1.074	1.292	1.357
	Tidak Terlayani	1.813	1.725	1.716	1.667	1.607
	Daur Ulang	35	88	215	388	427
<b>2.</b>	<b>Sarana Prasarana Air Bersih</b>					
	C. Perdesaan					
	Jumlah KK dg Air Bersih	225.778	233.272	249.681	264.738	272.267
	Jumlah KK	358.377	364.487	384.124	395.132	400.636
	Persentase Capaian	63	64	65	67	68
	D. Perkotaan					
	Jumlah KK dg Air Bersih	228.963	243.994	261.774	276.007	283.124
	Jumlah KK	305.284	310.820	327.217	336.594	341.183
	Persentase Capaian	75	78,5	80	82	83
<b>D,</b>	<b>Sarana Prasarana Umum</b>					
<b>1.</b>	<b>Perkembangan Kondisi Jalan</b>					
	Jenis Permukaan					
	Jalan Aspal	1,501.527	1,560.304	1,654.193	1,705.769	1.768.513
	Jalan Kerikil	123.632	90.466	40.321	13.618	262.532
	Jalan Tanah	368.901	343.290	299.546	274.673	686.588
	Kondisi Jalan					
	Baik	757.743	860.740	909.629	956.309	796.230
	Sedang	598.218	631.384	676.384	707.904	960.068
	Rusak	458.634	348.082	283.937	259.517	642.086
	Rusak Berat	179.465	153.854	124.110	70.330	319.249
<b>2.</b>	<b>Perkembangan Jumlah dan Panjang Jembatan</b>					
	Jumlah Jembatan					



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Baik	338	344	353	383	535
	Sedang	163	163	163	163	167
	Rusak	40	40	36	15	13
	Rusak Berat	12	10	8	8	6
	Panjang Jembatan					
	Baik	414.85	440.35	713.21	973.71	2.370,14
	Sedang	985.25	985.25	985.25	985.25	975,99
	Rusak	291.15	291.15	243.99	75.19	56,67
	Rusak Berat	62.90	50.00	50.00	50.00	31,48
<b>3.</b>	<b>Kondisi Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan</b>					
	C. Perdesaan					
	Jumlah KK Rumah Sehat	204.275	215.047	245.839	280.544	321.223
	Jumlah KK	358.377	364.487	384.124	395.132	432.758
	% Capaian	57	59	64	71	74
	D. Perkotaan					
	Jumlah KK Rumah Sehat	198.435	211.358	235.596	255.811	209.247
	Jumlah KK	305.284	310.820	327.217	336.594	260.472
	% Capaian	65	68	72	76	80
<b>4.</b>	<b>Kondisi Keluarga Yang Menggunakan Jamban</b>					
	Jumlah KK menggunakan Jamban	325.194	351.362	391.238	424.401	458.353
	Jumlah KK	663.661	675.696	711.341	731.726	753.877
	Persentase Capaian	49	52	55	58	60
<b>5.</b>	<b>Keragaan Koperasi Keragaan Koperasi</b>					
	Jumlah koperasi yang melaporkan RAT (unit)	309	328	339	392	256
	Jumlah anggota (org)	220.765	285.433	343.772	345.937	363.437
	Jumlah karyawan (org)	1.685	1.742	1.742	1.797	1.797
	Modal (Rp.miliar)	320,604	184,546	220,871	337,284	464.378
	Volume usaha (Rp.miliar)	412,579	206,823	259,855	434,371	409.822
	SHU (Rp.miliar)	13,933	18,453	19,285	23,305	27.011
	Jumlah koperasi (unit)	1.306	1.328	1.340	1.481	1.674
	Jumlah koperasi aktif (unit)	997	1.090	748	900	900



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>6.</b>	<b>Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil</b>					
	Akta Kelahiran	12.542	8.306	16.255	21.989	8.478
	Akta Kelahiran Terlambat	-	5.905	7.582	5.390	8.166
	Akta Kelahiran Gratis	1976	807	92	-	-
	Akta Perkawinan	51	61	11	39	89
	Akta Perceraian	3	2	3	2	21
	Akta Kematian	66	79	95	100	79
<b>7.</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Kabupaten</b>					
	SD	157	123	229	223	13
	SMP	386	263	354	383	157
	SMA	10.197	2.191	4.034	4.191	3.973
	Akademi	1.786	313	875	1.456	0
	Sarjana	3.737	772	1.359	787	2.760
<b>8.</b>	<b>Perkembangan Tempat Ibadah</b>					
	Masjid	2.006	1.974	1.999	2.112	2.355
	Langgar/Musholla	17.885	9.539	9.561	13.102	10.285
	Gereja	84	84	86	87	86
	Pure	10	10	11	11	12
	Vihara	3	2	2	2	2

## B. Fokus Layanan Umum Pilihan

### 1. Penanaman Modal

Terkait dengan penanaman modal di kabupaten Jember, swasta baik modal dalam negeri maupun modal asing perlu terus didorong untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dan menarik bagi penanaman modal. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan, peningkatan pelayanan penanaman modal, dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Pembangunan dibidang penanaman modal diprioritaskan pada peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing



melalui peningkatan pelayanan\_penanaman modal dengan berbasis sistem teknologi informasi-komunikasi, dan memanfaatkan data base peluang investasi di tingkat lokal dan regional.

Penanaman Modal Kabupaten Jember juga mencanangkan pertumbuhan industri yang salah satunya dengan mendorong perkembangan agroindustri dan industri pengolahan lainnya mengingat potensi dari sektor pertanian yang sangat besar. Agroindustri adalah salah satu cabang industri yang mempunyai kaitan erat serta langsung dengan pertanian. Apabila pertanian diartikan sebagai proses yang menghasilkan produk pertanian di tingkat primer, maka kaitannya dengan industri dapat berkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun ke depan (*forward linkage*). Untuk besaran nilai investasi di Kabupaten Jember terbesar pada bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan. Pada Tahun 2005 besaran nilai investasi sebesar 34.025.717.000 sedang pada Tahun 2009 sebesar 68.865.279.000. Dengan demikian selama periode Tahun 2005 sampai dengan 2009 terjadi peningkatan sebesar 3,49 %.

Pada aspek layanan urusan pilihan, yakni pada pengembangan usaha pertanian dan perkebunan diarahkan melalui pendekatan wilayah terpadu. Pendekatan ini menggunakan konsep pengembangan agribisnis guna meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, yang nantinya akan lebih efisien dan meningkatkan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah. Pengembangan pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu juga mendukung pengembangan agroindustri terkait dengan daya saing produk pertanian dan perkebunan, salah satunya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen, pengolahan hasil pertanian dan juga hasil perkebunan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian, perkebunan, dan keamanan pangan, serta melindungi petani dari persaingan tidak sehat.

Karakteristik potensi ekonomi Kabupaten Jember terletak di sektor pertanian, maka pengembangan industri di Kabupaten Jember juga harus mendorong produktivitas pertanian. Apabila model industrialisasi tersebut dijalankan, maka akan diperoleh keuntungan ganda, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai dan jumlah tenaga kerja yang dapat terlibat dalam proses industrialisasi sangat banyak.

Pengembangan agroindustri di Kabupaten Jember sesuai dengan arahan pengembangan sistem kegiatan pada cluster Jember – Bondowoso – Situbondo dalam SWP Jember dan sekitarnya bahwa Kabupaten Jember merupakan daerah potensi pertanian tinggi, oleh karena itu peningkatan produksi pertanian, perlu didorong dan dikembangkan dengan peningkatan nilai tambah dari hasil-hasil pertanian (industri pengolahan) dan industri kecil/kerajinan.

Sektor pertanian dari tahun ke tahun memberi kontribusi sangat besar dalam PDRB Kabupaten Jember, dimana pada tahun 2007 sektor pertanian mencapai 7.257.038,34 (dalam jutaan



3 rupiah) atau 44,50% dari keseluruhan total nilai PDRB pada tahun 2007 sebesar 16.306.131,96 (dalam jutaan rupiah). Sub sektor tanaman pangan memberikan sumbangan terbesar di atas sub sektor yang lain yaitu pada tahun 2005 sebesar 2.735.647,17 (dalam jutaan rupiah), pada tahun 2006 meningkat sebesar 3.106.492,19 (dalam jutaan rupiah), dan pada tahun 2007 meningkat lagi sebesar 3.521.941,20 (dalam jutaan rupiah).

Potensi pertanian di Kabupaten Jember lainnya dapat dilihat dari dominasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Jember tahun 2008, yaitu sebesar 30,1% untuk pertanian kemudian perkebunan, 16,22% dan kawasan lindung 13,34%. Banyaknya penduduk Kabupaten Jember yang bermata pencaharian di sektor agraris, juga merupakan potensi sumber daya manusia yang tersedia. Penduduk yang bekerja di sektor agraris adalah sebesar 59 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Jember.

Terkait dengan sektor pertanian, bahwa sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Jember. Dari potensi yang ada padi, jagung dan kedele merupakan komoditi yang dapat mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Jember (tabel 2.36).

**Tabel 2.36**  
**Keragaan Perkembangan Luas panen, produktivitas dan Produksi**  
**Tanaman Pangan Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2010**

No	Uraian	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Padi						
	a. Luas Panen	135,031	141,804	140,186	141,066	143,597	154,438
	b. Produksi	7,207,748	7,379,444	7,492,430	7,737,860	8,139,950	8,807,500
	c. Produktivitas	53.38	52.04	53.45	54.85	56.69	57.03
2.	Jagung						
	a. Luas Panen	58,495	54,248	54,914	56,991	67,869	65,318
	b. Produksi	3,033,414	2,891,963	3,069,220	3,855,850	3,968,180	3,939,860
	c. Produktivitas	51.86	53.31	55.89	67.66	58.47	60.32
3.	Sayuran						
	a. Luas Panen	6,407	5,893	5,744	7,799	7,889	8,203
	b. Produksi	3,033,414	2,891,963	3,069,220	3,855,850	3,968,180	3,939,860
	c. Produktivitas	47.07	27.19	42.20	47.53	60.00	57.58
4.	Kacang Tanah						
	a. Luas Panen	5,473	4,564	5,302	4,342	4,461	3,498
	b. Produksi	53,845	49,599	64,930	57,560	59,620	46,841
	c. Produktivitas	9.84	10.87	12.25	13.26	13.37	13.39
5.	Ubi Jalar						
	a. Luas Panen	1,315	1,288	1,141	718	578	873
	b. Produksi	113,122	126,030	120,450	85,040	70,850	105,887
	c. Produktivitas	86.02	97.85	105.57	118.44	122.55	121.29
6.	Kedele						
	a. Luas Panen	17,337	16,291	19,064	11,555	12,186	12,714
	b. Produksi	196,883	134,023	219,850	132,380	145,450	161,850
	c. Produktivitas	11.36	8.23	11.53	11.46	11.94	12.73
7.	Ubi Kayu						
	a. Luas Panen	4,008	5,071	5,105	3,636	4,479	4,307
	b. Produksi	852,761	1,024,720	793,710	559,250	745,840	714,564
	c. Produktivitas	212.76	202.07	155.48	153.81	166.53	165.91

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011



Potensi pertanian lainnya adalah ubi kayu, sayuran, dan buah – buahan seperti durian, alpukat, mangga, dan rambutan, yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan komoditas unggulan Kabupaten Jember. Potensi tanaman perkebunan yang menjadi unggulan daerah antara lain, tembakau, kopi, kelapa. Komoditas - komoditas tersebut mempunyai peluang pasar dalam dan luar negeri yang cukup besar baik dalam bentuk segar maupun olahan.

Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan khususnya padi di Kabupaten Jember memegang peranan yang strategis dalam rangka memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani, mendorong pertumbuhan agroindustri serta menghasilkan devisa negara mengingat potensi produksi kabupaten dalam produksi padi yang meningkat jumlahnya hingga tahun 2009, sehingga potensi bagi para pelaku usaha pengolahan padi untuk terus mengembangkan usahanya dengan volume bahan baku yang tetap terjaga. Hasil dari industri pengolahan padi berupa beras dapat diolah menjadi bahan baku industri, panganan, pangan fungsional, pangan pokok, untuk hasil industri berupa jerami dan sekam dapat diolah menjadi hasil olahan lainnya.

Kabupaten Jember diarahkan pada daerah perkotaan yang mendekati sumber bahan baku. Daerah perkotaan kecamatan atau biasa disebut Ibu Kota Kecamatan (IKK) merupakan wilayah kecamatan yang telah memiliki karakteristik kota yaitu dominasi kegiatan non pertanian, namun lokasinya masih berdekatan dengan sumber bahan baku pertanian (daerah pedesaan). Sehingga aktivitas agroindustri tersebut tidak akan mengganggu produktivitas pertanian. Namun industri pengolahan hasil pertanian yang ada saat ini hanya terbatas pada komoditas perkebunan sehingga perlu adanya industri pengolahan hasil pertanian, hal ini mengingat komoditas tanaman pangan lebih berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jember.

**Tabel 2.37**  
**Keragaan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Jember**  
**Tahun 2005 – 2010**

No	Uraian	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kelapa						
	a. Luas Panen	12,867.23	12,411.82	12,451.82	12,598.62	12,904.22	12,699.44
	b. Produksi	140,600.80	107,206.01	99,806.46	100,595.13	100,652.17	101,897.86
	c. Produktivitas	168.80	123.90	11.53	11.62	11.62	11.42
2.	Kapuk Randu						
	a. Luas Panen	1,749.89	1,826.36	1,749.89	1,751.39	1,751.29	1,739.29
	b. Produksi	6,916.60	5,056.44	3,458.25	3,599.23	3,601.54	4,326.16
	c. Produktivitas	4.86	3.53	2.43	2.52	2.52	3.02
3.	Cengkeh						
	a. Luas Panen	110.34	110.31	110.31	110.31	110.31	206.49
	b. Produksi	226.90	202.54	184.57	183.98	186.81	174.48
	c. Produktivitas	6.48	5.15	4.03	3.98	3.98	3.69



4.	Kopi						
	a. Luas Panen	5,481.15	5,524.01	5,474.52	5,535.25	5,591.99	5,601.24
	b. Produksi	21,738.22	19,768.68	16,628.21	17,010.91	17,052.26	22,073.26
	c. Produktivitas	6.79	6.09	5.18	5.30	5.30	5.17
5.	Kasturi						
	a. Luas Panen	2,115.60	2,659.40	3,602.00	4,220.00	6,328.85	8,288.00
	b. Produksi	16,759.80	20,609.42	60,707.30	62,428.00	94,232.03	94,488.43
	c. Produktivitas	79.20	77.50	16.85	14.79	14.89	10.97
6.	Rajangan						
	a. Luas Panen	414.30	806.60	2,064.00	1,674.22	2,148.05	2,196.50
	b. Produksi	2,900.10	5,628.93	16,226.30	16,337.11	21,126.80	24,005.40
	c. Produktivitas	70.00	69.79	7.86	9.76	9.84	10.41
7.	Berly						
	a. Luas Panen	547.60	1,071.80	773.50	96.00	34.00	319.00
	b. Produksi	8,761.60	17,545.10	14,334.61	1,256.00	543.50	4,540.43
	c. Produktivitas	160.00	163.70	18.53	13.08	15.99	15.24
8.	N-Ooghst						
	a. Luas Panen	3,551.50	3,776.25	23,407.80	3,205.00	2,578.25	3,142.50
	b. Produksi	52,944.40	56,184.50	526,838.7	36,411.40	36,487.20	37,194.09
	c. Produktivitas	14.91	14.88	22.51	11.36	14.15	11.43

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Terkait dengan potensi peternakan, komoditas yang dapat mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Jember adalah ternak kambing, sapi dan ayam, sedangkan untuk bidang peternakan antara lain sapi kereman, sapi perah dan domba. Adapun perkembangan populasi ternak di Kabupaten Jember adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 2.38**  
Keragaan Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Jember  
Tahun 2005 – 2009

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Sapi	182.398	183.266	194.202	186.310	186.422
2.	Sapi Perah	621	626	631	635	616
3.	Kerbau	982	984	985	987	991
4.	Kuda	436	437	438	441	445
5.	Kambing	43.076	43.593	44.116	44.648	45.184
6.	Domba	63.424	63.290	64.958	65.743	66.531
7.	Babi	652	658	685	661	663
8.	Ayam Buras	1.583.707	1.523.616	1.538.844	1.554.241	1.569.716
9.	Ayam Pedaging	896.784	877.978	884.418	893.267	903.987
10.	Ayam Petelur	396.524	374.991	377.810	381.651	766.627
	<b>Jumlah</b>	<b>3.335.522</b>	<b>3.237.067</b>	<b>326.144</b>	<b>3.297.820</b>	<b>3.712.778</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Di bidang perikanan, perkembangan produksi budidaya perikanan air tawar adalah sebagai berikut ini :



**Tabel 2.39**  
**Keragaan Perkembangan Produksi Ikan Air Tawar di Kabupaten Jember**  
**Tahun 2005 – 2009**

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Ikan Mas/Tombro	54.80	58.86	61.80	64.89	68.13
2.	Ikan Nila	99.39	76.90	88.44	101.71	116.97
3.	Ikan Gurami	604.93	498.05	547.86	602.65	711.13
4.	Ikan Lele	1.991.38	1.713.73	1.970.79	2.266.41	2.606.37
5.	Ikan Tawes	20.86	13.64	14.32	15.04	15.79
6.	Ikan Lain-lain	3.20	487.22	511.58	537.16	564.02
<b>Jumlah</b>		<b>2.774.56</b>	<b>2.848.40</b>	<b>3.194.79</b>	<b>3.587.86</b>	<b>4.082.41</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Berdasarkan tabel 2.36 dapat dijelaskan bahwa perkembangan populasi ternak di kabupaten Jember antara tahun 2004 – 2009, jumlah populasi terbanyak terdapat pada unggas dengan jumlah pada tahun 2010 populasi sebanyak 3.885.646 berikutnya adalah ternak besar sebanyak 227.752 dan disusul kemudian oleh ternak kecil dengan jumlah populasi 112.380.

**Tabel 2.40**  
**Keragaan Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Jember**  
**Tahun 2004 – 2009**

Populasi (Ekor)	Tahun					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ternak Besar	183.523	184.437	185.313	186.256	187.369	227.752
Ternak Kecil	105.883	107.152	108.439	109.734	111.053	112.380
Unggas	3.014.288	3.043.933	2.944.213	2.970.129	2.999.398	3.885.646

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2005 - 2010

Secara umum populasi ternak menunjukkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2004 populasi ternak besar mencapai 183.523 ekor, pada tahun 2007 naik menjadi 186.256 ekor dan tahun 2009 mencapai 227.752 ekor terjadi kenaikan 41.496 ekor, begitu juga untuk ternak kecil dan unggas dari tahun 2007 sampai 2009 terjadi kenaikan sebesar 2.646 ekor dan 915.517 ekor.



**Tabel 2.41**  
**Produksi Peternakan Kabupaten Jember Tahun 2004 – 2009**

Produksi (kg)	Tahun					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Daging	12.846.965	12.946.164	13.075.625	13.150.574	13.797.828	13.838.064
Telur	9.486.471	9.581.336	9.677.149,36	9.779.150,67	9.872.095	9.980.576

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2005 - 2010

Berdasar tabel 2.38, perkembangan produksi peternakan Kabupaten Jember antara tahun 2004 - 2009 dapat dijelaskan bahwa untuk produksi hasil ternak yang ada adalah daging dan telur. Produksi daging pada tahun 2004 mencapai 12.846.965 Kg, pada tahun 2007 meningkat menjadi 13.150.574 Kg dan tahun 2009 mencapai 13.838.064 Kg, terjadi kenaikan sebesar 687.490 Kg. Untuk produksi telur antara tahun 2004 - 2009 hasil produksi terus mengalami kenaikan pada tahun 2004 mencapai 9.486.471 Kg, pada tahun 2007 naik menjadi 9.779.150 kg dan tahun 2009 mencapai 9.980.576 Kg, terjadi peningkatan sebesar 201426,33.

Perkembangan luas hutan (tabel 2.40) secara umum mengalami peningkatan dari 60.376,54 Ha pada tahun 2004 menjadi 60.376,87 Ha pada tahun 2009. Peningkatan luas area hutan paling tinggi adalah luas area hutan lindung, yaitu 28.360,90 Ha pada tahun 2004 meningkat menjadi 39.504,40 Ha, kemudian LDTI dengan luas area pada tahun 2004 seluas 378,54 Ha meningkat menjadi 543,25 Ha pada tahun 2009, demikian juga dengan hutan wisata dari 20 Ha luas areanya pada tahun 2004 naik menjadi 174,90 Ha pada tahun 2007, luas hutan wisata ini tidak mengalami perubahan sampai tahun 2008. Sebaliknya untuk hutan produksi mengalami penurunan luasannya, dari 31.617,43 Ha pada tahun 2004 turun menjadi 31.161,35 Ha pada tahun 2009, secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan untuk sub sektor kehutanan lahan kritis yang ada semakin berkurang.

**Tabel 2.42**  
**Luas Area Kehutanan Kabupaten Jember Tahun 2004-2009**

Jenis Hutan	Luas Area Kehutanan (Ha)					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hutan Produksi	31.617,43	31.617,43	31.617,43	30.977,65	30.977,65	31.161,35
Hutan Lindung	28.360,90	28.360,90	28.360,90	28.360,90	28.360,90	39.504,40
Hutan Wisata	20,00	20,00	20,00	174,90	174,90	-
LDTI	378,54	378,54	378,54	464,88	464,88	543,25
<b>Total</b>	<b>60.376,87</b>	<b>60.376,87</b>	<b>60.376,87</b>	<b>60.376,87</b>	<b>60.376,87</b>	<b>60.376,87</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2005 - 2010



Akan tetapi pemanfaatan terhadap Sumber Daya Kehutanan masih perlu dioptimalkan mengingat kebutuhan akan SDA hutan terus meningkat dan dipakai juga sebagai penjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan pembangunan ekonomi Kabupaten Jember kedepan akan memperhatikan lebih cermat potensi ekonomi yang ada. Pembangunan kepariwisataan adalah salah satu bidang ekonomi yang harus dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jember bersama masyarakat yang diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, termasuk pula didalamnya kegiatan sektor pertanian, industri kecil dan kerajinan tradisional serta jasa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan negara.

Pada aspek pariwisata, di Kabupaten Jember masih kurang tertintegrasikan dan belum mempunyai skala prioritas. Hal ini akan menyebabkan pengembangan obyek wisata tidak akan mempunyai fokus pada obyek wisata utama. Dengan pengembangan obyek wisata yang terfokus, diharapkan nantinya Kabupaten Jember akan mempunyai obyek wisata unggulan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memajukan wilayah di sekitar obyek wisata utama. Dampak lain adalah peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi akibat adanya kegiatan pariwisata yang terfokus.

Peningkatan program-program pengembangan pariwisata, kedepan harus mencakup aspek promosi maupun hasil karya obyek wisata setempat. Hal ini didasari pada kurangnya pengembangan pariwisata di kabupaten Jember seperti pembuatan paket-paket wisata yang memudahkan para wisatawan untuk memilih obyek wisata yang akan di kunjungi di masa yang akan datang. Hal penting lainnya adalah pengembangan dan pengenalan hasil karya penduduk lokal (handycraft) ataupun makanan-makanan khas (suwar-suwir dan lain-lain) di sekitar wilayah obyek wisata utama sebagai pendukung dalam upaya peningkatan sektor pariwisata.

Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan transmigrasi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib. Hal ini disebabkan karena pada umumnya orang-orang tersebut yang diberikan kesempatan transmigrasi merupakan kalangan menengah kebawah. Dengan hal tersebut maka dengan adanya program transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup karena oleh pemerintah mereka diberikan fasilitas yang menunjang seperti rumah dan lahan untuk digarap.

Untuk Kabupaten Jember, jumlah Kepala keluarga yang melaksanakan kegiatan transmigrasi umum pada Tahun 2007 sebesar 25 KK (78 jiwa) meningkat menjadi 35 KK (107 jiwa) pada Tahun 2010. Tujuan utama transmigrasi dari Kabupaten Jember terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Sedangkan keberangkatan



penduduk yang melaksanakan transmigrasi Swakarsa pada Tahun 2007 sebesar 25 KK (51 jiwa) meningkat menjadi 107 jiwa dengan jumlah kk sebesar 25 KK pada Tahun 2010.

Pada penyelenggaraan urusan sumberdaya energi dan mineral, bahwa Potensi Sumber daya tambang di Kabupaten Jember cukup besar. Paling tidak jenis sumber daya tambang yang ada meliputi 7 jenis, dari pasir, batu belah, batu poles, Tras, batu gamping, Kalsit, Gypsum. Dimana tersebar pada beberapa lokasi kecamatan di Kabupaten Jember. Pasar produk tambang akan terjadi jika permintaan dan penawaran menemukan titik temunya.

Dengan semakin surutnya produk tambang dari luar daerah Jember ekspansi pasar akan mendesak pasar tambang Jember. Kekhawatiran ini perlu mendapat perhatian dan antasipasi dari pihak pemerintah daerah dengan adanya perda terkait pertambangan tidak saja masalah eksplorasi, pengembangan, eksploitasi namun juga pemasaran produk tambang Jember. Namun demikian potensi penggalan pada sumber daya alam tak terbarukan perlu dikendalikan dengan cermat untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat Jember ke depan. Untuk sumbangan PRDB Kabupaten Jember sektor pertambangan dan penggalan menurut sektor atas harga dasar berlaku (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 – 2010 pada tabel 2.41 berikut :

**Tabel 2.43**  
**PRDB Kabupaten Jember Menurut Sektor Pertambangan Dan Penggalan Atas Harga Dasar Berlaku (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 – 2010**

Sektor	2005	2006	2007	2008
Pertambangan dan Penggalan	493.723,06	550.411,08	625.293,54	734.743,60

*Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011*

Untuk jaringan listrik yang dikelola oleh PLN cabang Jember di Kabupaten Jember telah mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan di wilayahnya naum masih terdapat beberapa wilayah di pedesaan yang belum mendapatkan pelayanan listrik antara lain wilayah pedesaan. Sehingga untuk rencana kedepannya di perlukan peningkatan wilayah pelayanan jaringan listrik dan pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanannya maka pengembangan daya listrik perlu terus diupayakan dalam rangka meningkatkan dan mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Sehubungan dengan itu perlu terus ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana tenaga listrik serta efisiensi dalam pengelolaan, sehingga diperoleh tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan mutu yang dapat diandalkan serta tersedia secara merata dengan pelayanan yang semakin baik.



**Tabel 2.44**  
**Perkembangan Pelanggan dan KVA Terpasang Listrik PLN Menurut Jenis Tarif dan Penggunaan Tahun 2006 - 2010**

No	Golongan Tarif	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Rumah Tangga	283,798,974	296,857,840	318,911,165	336,605,640	359,944,666
2.	Usaha	35,979,106	40,463,962	46,183,963	57,082,154	67,863,715
3.	Industri	17,913,278	20,652,096	21,955,113	28,514,211	32,013,326
4.	Sosial	16,622,686	17,869,030	21,562,256	22,579,986	21,762,992
5.	Jalan	12,408,067	16,422,772	19,442,312	22,133,581	26,659,893
6.	Gedung Kantor	5,642,490	5,965,716	6,593,640	6,999,741	7,807,081
<b>Jumlah</b>		<b>372,364,601</b>	<b>398,231,416</b>	<b>434,648,449</b>	<b>473,915,313</b>	<b>516,051,673</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah aspek pelayanan umum fokus layanan pilihan tersaji pada table berikut :

**Tabel 2.45**  
**Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fokus Layanan Wajib di Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	<b>Pertanian</b>					
	Padi					
	a. Luas Panen	141,804	140,186	141,066	143,597	154,438
	b. Produksi	7,379,444	7,492,430	7,737,860	8,139,950	8,807,500
	c. Produktivitas	52.04	53.45	54.85	56.69	57.03
	Jagung					
	a. Luas Panen	54,248	54,914	56,991	67,869	65,318
	b. Produksi	2,891,963	3,069,220	3,855,850	3,968,180	3,939,860
	c. Produktivitas	53.31	55.89	67.66	58.47	60.32
	Sayuran					
	a. Luas Panen	5,893	5,744	7,799	7,889	8,203
	b. Produksi	2,891,963	3,069,220	3,855,850	3,968,180	3,939,860
	c. Produktivitas	27.19	42.20	47.53	60.00	57.58



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Kacang Tanah					
	a. Luas Panen	4,564	5,302	4,342	4,461	3,498
	b. Produksi	49,599	64,930	57,560	59,620	46,841
	c. Produktivitas	10.87	12.25	13.26	13.37	13.39
	Ubi Jalar					
	a. Luas Panen	1,288	1,141	718	578	873
	b. Produksi	126,030	120,450	85,040	70,850	105,887
	c. Produktivitas	97.85	105.57	118.44	122.55	121.29
	Kedele					
	a. Luas Panen	16,291	19,064	11,555	12,186	12,714
	b. Produksi	134,023	219,850	132,380	145,450	161,850
	c. Produktivitas	8.23	11.53	11.46	11.94	12.73
	Ubi Kayu					
	a. Luas Panen	5,071	5,105	3,636	4,479	4,307
	b. Produksi	1,024,720	793,710	559,250	745,840	714,564
	c. Produktivitas	202.07	155.48	153.81	166.53	165.91
<b>2.</b>	<b>Perkebunan</b>					
	Kelapa					
	a. Luas Panen	12,411.82	12,451.82	12,598.62	12,904.22	12,699.44
	b. Produksi	107,206.01	99,806.46	100,595.13	100,652.17	101,897.86
	c. Produktivitas	123.90	11.53	11.62	11.62	11.42
	Kapuk Randu					
	a. Luas Panen	1,826.36	1,749.89	1,751.39	1,751.29	1,739.29
	b. Produksi	5,056.44	3,458.25	3,599.23	3,601.54	4,326.16
	c. Produktivitas	3.53	2.43	2.52	2.52	3.02
	Cengkeh					
	a. Luas Panen	110.31	110.31	110.31	110.31	206.49
	b. Produksi	202.54	184.57	183.98	186.81	174.48
	c. Produktivitas	5.15	4.03	3.98	3.98	3.69
	Kopi					
	a. Luas Panen	5,524.01	5,474.52	5,535.25	5,591.99	5,601.24



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	b. Produksi	19,768.68	16,628.21	17,010.91	17,052.26	22,073.26
	c. Produktivitas	6.09	5.18	5.30	5.30	5.17
	Kasturi					
	a. Luas Panen	2,659.40	3,602.00	4,220.00	6,328.85	8,288.00
	b. Produksi	20,609.42	60,707.30	62,428.00	94,232.03	94,488.43
	c. Produktivitas	77.50	16.85	14.79	14.89	10.97
	Rajangan					
	a. Luas Panen	806.60	2,064.00	1,674.22	2,148.05	2,196.50
	b. Produksi	5,628.93	16,226.30	16,337.11	21,126.80	24,005.40
	c. Produktivitas	69.79	7.86	9.76	9.84	10.41
	Berly					
	a. Luas Panen	1,071.80	773.50	96.00	34.00	319.00
	b. Produksi	17,545.10	14,334.61	1,256.00	543.50	4,540.43
	c. Produktivitas	163.70	18.53	13.08	15.99	15.24
	N-Ooghst					
	a. Luas Panen	3,776.25	23,407.80	3,205.00	2,578.25	3,142.50
	b. Produksi	56,184.50	526,838.7	36,411.40	36,487.20	37,194.09
	c. Produktivitas	14.88	22.51	11.36	14.15	11.43
<b>3.</b>	<b>Peternakan</b>					
	Sapi	182.398	183.266	194.202	186.310	186.422
	Sapi Perah	621	626	631	635	616
	Kerbau	982	984	985	987	991
	Kuda	436	437	438	441	445
	Kambing	43.076	43.593	44.116	44.648	45.184
	Domba	63.424	63.290	64.958	65.743	66.531
	Babi	652	658	685	661	663
	Ayam Buras	1.583.707	1.523.616	1.538.844	1.554.241	1.569.716
	Ayam Pedaging	896.784	877.978	884.418	893.267	903.987
	Ayam Petelur	396.524	374.991	377.810	381.651	766.627
<b>4.</b>	<b>Perikanan</b>					
	Ikan Mas/Tombro	54.80	58.86	61.80	64.89	68.13



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Ikan Nila	99.39	76.90	88.44	101.71	116.97
	Ikan Gurami	604.93	498.05	547.86	602.65	711.13
	Ikan Lele	1.991.38	1.713.73	1.970.79	2.266.41	2.606.37
	Ikan Tawes	20.86	13.64	14.32	15.04	15.79
	Ikan Lain-lain	3.20	487.22	511.58	537.16	564.02
<b>5.</b>	<b>Perkembangan Luas Area Hutan</b>					
	Hutan Produksi	31.617,43	31.617,43	30.977,65	30.977,65	31.161,35
	Hutan Lindung	28.360,90	28.360,90	28.360,90	28.360,90	39.504,40
	Hutan Wisata	20,00	20,00	174,90	174,90	-
	LDTI	378,54	378,54	464,88	464,88	543,25
<b>6.</b>	<b>Perkembangan Pelanggan dan KVA Terpasang Listrik PLN</b>					
	Rumah Tangga	283,798,974	296,857,840	318,911,165	336,605,640	359,944,666
	Usaha	35,979,106	40,463,962	46,183,963	57,082,154	67,863,715
	Industri	17,913,278	20,652,096	21,955,113	28,514,211	32,013,326
	Sosial	16,622,686	17,869,030	21,562,256	22,579,986	21,762,992
	Jalan	12,408,067	16,422,772	19,442,312	22,133,581	26,659,893
	Gedung Kantor	5,642,490	5,965,716	6,593,640	6,999,741	7,807,081

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional, terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Penanaman modal di Kabupaten Jember diarahkan kepada pengendalian data dan informasi potensi pelayanan investasi dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengendalian lapangan kerja dan terbukanya kesempatan berusaha melalui kerjasama kemitraan antara unit-unit usaha baru dengan investor.

Adapun hasil pelaksanaan program selama kurun waktu 2005 – 2009 adalah terdapat 6



(enam) investor PMA, yaitu PT. Sanyo Sales, PT. Indosat Tbk, PT. Semen Puger Jaya Raya Sentosa, PT. G'Seeds, PT. Indonesia Indah Tobacco Citra Niaga dan PT. Carrefour) dengan jumlah investasi sebesar Rp.217.335.750.000 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.523 orang.

Selanjutnya, pertanian sebagai salah satu urusan prioritas, pada saat ini masih memiliki peran yang strategis dan memberikan kontribusi yang dominan bagi pembangunan baik sebagai penghasil bahan pangan, bahan baku industri, bahan baku ekspor, devisa negara, sumber pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah serta penyerap tenaga kerja. Adapun potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha tani terdiri dari lahan sawah, tegal dan pekarangan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 2.46**  
**Luas dan Tata Guna Lahan Pertanian Tahun 2006 – 2010**

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Sawah Teknis	75.031	77.117	76.403	76.421	77.658
2.	Sawah Setengah Teknis	3.807	2.029	2.806	2.527	2.114
3.	Sawah Irigasi Sederhana	5.508	5.150	5.049	5.044	4.629
4.	Sawah Irigasi Desa/Non PU	539	539	539	539	545
5.	Sawah Tadah Hujan	125	120	120	40	114
6.	Tegal / Kebun	35.383	34.378	36.824	35.129	34.204
7.	Pekarangan	31.773	31.543	33.278	32.907	36.111

**Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011**

Peningkatan produksi berbagai komoditi pertanian dan upaya-upaya yang telah dilakukan dapat menjaga ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kecukupan gizi masyarakat. Capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan pangan daerah, utamanya beras dari produksi Kabupaten Jember.

**Tabel 2.47**  
**Ketersediaan Pangan Tahun 2006 – 2010**

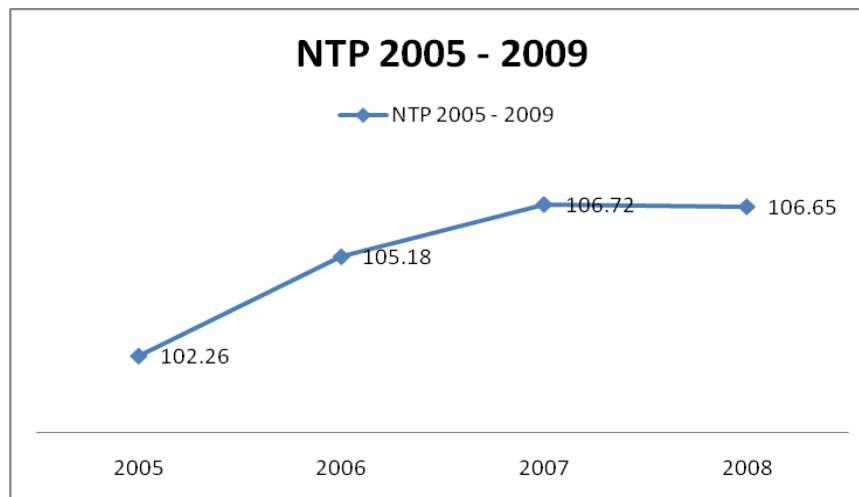
No.	Komoditi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Padi (Beras)	434,937.13	449,278.18	472,745.79	512,224.74	490.792,70
2.	Jagung	271,622.96	341,574.90	351,267.69	300,908.45	349.909,88
3.	Kedelai	19,952.62	12,010.48	13,221.25	13,478.97	17.260,59
4.	Kacang Tanah	5,961.55	5,292.31	5,483.18	4,915.20	3.664,66
5.	Ubi Kayu	67,465.35	47,536.25	63,396.40	59,527.07	46.943,80
6.	Ubi Jalar	10,522.16	7,483.52	6,234.80	8,111.84	10.051,36

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Peningkatan produksi yang dicapai dari tahun 2005 – 2009 berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan petani yang dicapai melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dan Perluasan Areal Tanam (PAT). Untuk mengetahui peningkatan pendapatan petani indikator yang dipergunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Nilai NTP diperoleh dari prosentase antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB).  $NTP > 100$  menunjukkan kemampuan atau daya beli petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Peningkatan NTP petani sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat disajikan sebagai berikut :

**Gambar 2.6**  
**Nilai Tukar Petani Tahun 2006 – 2010**





Terkait dengan pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan kualitas, pemasaran obyek pariwisata, kunjungan wisata, pelayanan pariwisata dan kelestarian obyek pariwisata. Adapun jumlah wisatawan dalam kurun waktu 2006 – 2010 sebagai berikut :

**Tabel 2.48**  
**Perkembangan Jumlah Wisatawan Tahun 2006 – 2010**

Tahun	Wisman	Wisnu
2006	710	233.268
2007	620	332.583
2008	1.472	63.717
2009	559	534.436
2010	628	549.602
<b>Jumlah</b>		

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Pembangunan industri dan perdagangan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember memiliki peranan yang cukup berarti sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Jember dan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang industri bahwa pembangunan industri berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2008 – 2010**

Klasifikasi	Tahun		
	2008	2009	2010
Industri Kecil			
- Unit	33.348	35.263	35.368
- Tenaga Kerja	85.743	89.263	89.403
Industri Sedang			
- Unit	1.982	2.249	2.549



Klasifikasi	Tahun		
	2008	2009	2010
- Tenaga Kerja	23.283	24.634	24.708
Industri Besar			
- Unit	53	71	75
- Tenaga Kerja	4.558	6.251	6.710

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2009 - 2011

Sedangkan di sektor perdagangan, keberhasilan pembangunan urusan perdagangan dicerminkan oleh indikator-indikator diantaranya adalah penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagai berikut :

**Tabel 2.50**  
**Perkembangan Pengeluaran SIUP dan Investasi Tahun 2008 – 2010**

No	Uraian	Tahun		
		2008	2009	2010
1.	Golongan Perusahaan			
	a. Besar	19	50	14
	b. Menengah	126	104	138
	c. Kecil	1.090	715	1.119
	d. Mikro			22
2.	Nilai Investasi (Rp.000)	212.094.000	227.420.180	1.914.998.832
3.	Jumlah Tenaga Kerja	5.962	5.072	4.404
4.	Pembukaan Cabang		36	18

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2009 - 2011

**Tabel 2.51**  
**Perkembangan Penerbitan TDP dan TDG Tahun 2008 – 2010**

Bentuk Perusahaan	Tahun		
	2008	2009	2010
PT	69	118	157
CV	283	411	377
Koperasi	38	25	36
Perseorangan	930	810	831
Lainnya	1	3	0
<b>Jumlah TDP</b>	<b>1.321</b>	<b>1.367</b>	<b>1.401</b>
TDG		36	39

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2009 - 2011



Sumberdaya manusia aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai peningkatan daya saing daerah. Pada Tahun 2010, jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 18.657 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 2.52**  
**Jumlah PNS sesuai Jenjang Kepangkatan Tahun 2006 – 2010**

No.	Pangkat/Gol	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Golongan IV	3683	5238	6143	6437	6.782
2.	Golongan III	10148	8341	7372	6951	6.295
3.	Golongan II	2859	2858	3897	4276	4.310
4.	Golongan I	455	343	1023	1217	1.180
<b>Jumlah</b>		<b>17.145</b>	<b>16.780</b>	<b>18.435</b>	<b>18.881</b>	<b>18.657</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Terkait dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM), aparatur / pegawai Pemerintah Kabupaten Jember serta sebarannya pada jenjang struktural dan fungsional sebagai berikut :

**Tabel 2.53**  
**Perkembangan Tingkat Pendidikan PNS Tahun 2006 – 2010**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	SD	959	7.24	1.145	1.206	1.123
2.	SLTP	703	501	702	816	815
3.	SLTA	5.998	5.214	6.010	5.969	5.864
4.	Diploma 1	86	59	56	47	47
5.	Diploma 2	2.979	2.855	2.624	2.666	2.614
6.	Diploma 3	565	837	1.087	1.078	1.243
7.	Diploma IV	1	0	0	0	0
8.	PT ( S1 ) / Akta IV	5.564	6.271	6.500	6.795	6.646
9.	Spesialis	36	38	35	33	33
10.	PT ( S2 )	254	281	276	271	272
11.	PT ( S3 )	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>17.145</b>	<b>16.780</b>	<b>18.435</b>	<b>18.881</b>	<b>18.657</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011



**Tabel 2.54**  
**Perkembangan Jumlah PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional**  
**Tahun 2006 – 2010**

No.	Jabatan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Struktural					
	> Eselon II a	1	1	1	1	1
	> Eselon II b	23	25	25	27	27
	> Eselon III a	139	140	133	78	76
	> Eselon III b	4	4	5	121	119
	> Eselon IV a	546	544	491	608	601
	> Eselon IV b	89	89	81	216	183
2.	Fungsional Umum/Staff	4.797	4.213	6.004	5.956	5.707
3.	Fungsional Tertentu					
	> Guru dan Pengawas	10.519	10.636	10.601	10.729	10.856
	> Tenaga Medis	647	797	778	873	806
	> PPL Pertanian	99	99	93	91	86
	> Penyuluh Keluarga Berencana	178	122	117	77	79
	> Penyuluh Kehutanan	73	73	72	70	70
	> Penguji Kendaraan Bermotor	0	10	10	11	12
	> PPL Pertanian (Peternakan)	30	27	24	23	27
	> Penyuluh Perindag					7
	<b>Jumlah</b>	<b>17.145</b>	<b>16.780</b>	<b>18.435</b>	<b>18.881</b>	<b>18.657</b>

Sumber : Jember Dalam Angka, Tahun 2007 - 2011

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah aspek daya saing daerah tersaji pada tabel berikut :



**Tabel 2.55**  
**Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Pada Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>1.</b>	<b>Luas dan Tata Guna Lahan Pertanian</b>					
	Sawah Teknis	75.031	77.117	76.403	76.421	77.658
	Sawah Setengah Teknis	3.807	2.029	2.806	2.527	2.114
	Sawah Irigasi Sederhana	5.508	5.150	5.049	5.044	4.629
	Sawah Irigasi Desa/Non PU	539	539	539	539	545
	Sawah Tadah Hujan	125	120	120	40	114
	Tegal / Kebun	35.383	34.378	36.824	35.129	34.204
	Pekarangan	31.773	31.543	33.278	32.907	36.111
<b>2.</b>	<b>Ketersediaan Pangan</b>					
	Padi (Beras)	434,937.13	449,278.18	472,745.79	512,224.74	490.792,70
	Jagung	271,622.96	341,574.90	351,267.69	300,908.45	349.909,88
	Kedelai	19,952.62	12,010.48	13,221.25	13,478.97	17.260,59
	Kacang Tanah	5,961.55	5,292.31	5,483.18	4,915.20	3.664,66
	Ubi Kayu	67,465.35	47,536.25	63,396.40	59,527.07	46.943,80
	Ubi Jalar	10,522.16	7,483.52	6,234.80	8,111.84	10.051,36
<b>3.</b>	<b>Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja</b>					
	Industri Kecil			33.348	35.263	35.368
	- Unit			85.743	89.263	89.403
	- Tenaga Kerja					
	Industri Sedang			1.982	2.249	2.549
	- Unit			23.283	24.634	24.708
	- Tenaga Kerja					
	Industri Besar			53	71	75
	- Unit			4.558	6.251	6.710
	- Tenaga Kerja					
<b>4.</b>	<b>Perkembangan Pengeluaran SIUP dan Investasi</b>					
	Golongan Perusahaan					
	a. Besar			19	50	14
	b. Menengah			126	104	138
	c. Kecil			1.090	715	1.119



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	d. Mikro					22
	Nilai Investasi (Rp.000)			212.094.000	227.420.180	1.914.998.832
	Jumlah Tenaga Kerja			5.962	5.072	4.404
	Pembukaan Cabang				36	18
<b>5.</b>	<b>Perkembangan Penerbitan TDP dan TDG</b>					
	PT			69	118	157
	CV			283	411	377
	Koperasi			38	25	36
	Perseorangan			930	810	831
	Lainnya			1	3	0
<b>6.</b>	<b>Jumlah PNS sesuai Jenjang Kepangkatan</b>					
	Golongan IV	3683	5238	6143	6437	6.782
	Golongan III	10148	8341	7372	6951	6.295
	Golongan II	2859	2858	3897	4276	4.310
	Golongan I	455	343	1023	1217	1.180
<b>7.</b>	<b>Perkembangan Tingkat Pendidikan PNS</b>					
	SD	959	7.24	1.145	1.206	1.123
	SLTP	703	501	702	816	815
	SLTA	5.998	5.214	6.010	5.969	5.864
	Diploma 1	86	59	56	47	47
	Diploma 2	2.979	2.855	2.624	2.666	2.614
	Diploma 3	565	837	1.087	1.078	1.243
	Diploma IV	1	0	0	0	0
	PT ( S1 ) / Akta IV	5.564	6.271	6.500	6.795	6.646
	Spesialis	36	38	35	33	33
	PT ( S2 )	254	281	276	271	272
	PT ( S3 )	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Perkembangan Jumlah PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional</b>					
	Struktural					
	> Eselon II a	1	1	1	1	1
	> Eselon II b	23	25	25	27	27



No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2006	2007	2008	2009	2010
	> Eselon III a	139	140	133	78	76
	> Eselon III b	4	4	5	121	119
	> Eselon IV a	546	544	491	608	601
	> Eselon IV b	89	89	81	216	183
	Fungsional Umum/Staff	4.797	4.213	6.004	5.956	5.707
	Fungsional Tertentu					
	> Guru dan Pengawas	10.519	10.636	10.601	10.729	10.856
	> Tenaga Medis	647	797	778	873	806
	> PPL Pertanian	99	99	93	91	86
	> Penyuluh Keluarga Berencana	178	122	117	77	79
	> Penyuluh Kehutanan	73	73	72	70	70
	> Penguji Kendaraan Bermotor	0	10	10	11	12
	> PPL Pertanian (Peternakan)	30	27	24	23	27
	> Penyuluh Perindag					7



## **BAB III**

### **ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

##### **3.1.1 Bidang Pendidikan**

Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan bidang pendidikan saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yang dilakukan dengan cara memperluas dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Ini dikarenakan masih adanya penduduk yang tidak tamat sekolah, putus sekolah dan bahkan tidak sekolah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jember berupaya agar tingkat pendidikan masyarakat meningkat. Mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan formal hingga penyelenggaraan pendidikan luar sekolah salah satunya dengan Pemberantasan Buta Aksara (PBA). Fasilitas pendidikan dasar tersebar di semua kecamatan. Sedangkan untuk pendidikan setingkat SMA sederajat terdapat di hampir semua kecamatan di Kabupaten Jember. Untuk pendidikan tinggi berada di Kabupaten Jember yaitu Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam, STIE Mandala, STIE Kosgoro, Politeknik Negeri Jember, Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Universitas Islam Jember, dan Universitas M.Seroedji.

Jumlah SMK Negeri dan Swasta Tahun 2007 ada 37 sekolah terdiri 7 SMKN dan 30 SMK Swasta. Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Jember masih rendah. Pada Tahun 2000 proporsi terbesar adalah kelompok belum tamat sekolah SD sebesar 46,82%. Tamat SD sebesar 34,05% sedangkan tamat SLTP hingga perguruan-perguruan tinggi tidak lebih 19,12%.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan permasalahan serius bagi pembangunan daerah dimasa mendatang. Sementara perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Jember yang mulai mengarah pada perkembangan dan jasa serta industri pengolahan tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja yang memadai (tingkat pendidikan dan ketrampilan yang lebih baik). Tantangan globalisasi menuntut semua pelaku ekonomi untuk semakin profesional di bidangnya, dengan pengembangan SDM melalui pendidikan dan ketrampilan.

Kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan prospek pengembangan investivasi SDM. Semakin lengkapnya lembaga pendidikan (formal dan non formal)



di kabupaten Jember akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap, dan menjadi prospek penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan industri, perdagangan dan jasa di Kabupaten Jember.

### **3.1.2 Bidang Kesehatan**

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember masih dihadapkan dengan masalah yaitu rendahnya angka harapan hidup (AHH), pada Tahun 2007 AHH mencapai 62,27 tahun. Angka ini lebih rendah dari kabupaten sekitar dan masih jauh di bawah AHH provinsi Jawa Timur, yaitu 68,89 tahun. Permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi di masyarakat kabupaten Jember yaitu masih adanya kualitas hidup masyarakat yang masih relatif rendah, yang disebabkan oleh kondisi pendidikan masih rendah dan tingkat ekonomi masyarakat yang juga rendah. Pemecahan masalah tersebut adalah dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama membenahi sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus dan berkisenambungan.

Bidang kesehatan merupakan satu dari dua SKPD (pendidikan dan kesehatan) yang ada di seluruh Kabupaten Jember yang memiliki standar pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2005 diketahui jumlah Rumah Sakit Umum sebanyak 8 unit, Puskesmas 49 unit, Puskesmas Keliling 49 unit, Poliklinik 28 unit, Laboratium Medis 6 unit, Rumah Bersalin 6 unit, Apotek 41 unit, Toko Obat berijin 24 unit dan Posyandu sebanyak 2.755 unit. Untuk itu perlu disiapkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang memadai, Sistem dan Prosedur pelayanan bidang kesehatan yang baik, terutama untuk SKPD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada publik. Dengan demikian pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jember perlu mendapat perhatian serius, yang dititik beratkan pada usaha mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah sarana prasarana kesehatan maupun peningkatan mutu pelayanan.

### **3.1.3 Bidang Sarana Prasarana Daerah**

Sarana prasarana daerah merupakan aspek penting dan vital dalam pembangunan daerah terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, kesatuan dan persatuan daerah. Secara umum pengembangan sarana prasarana ditujukan untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan esensial masyarakat. Sarana prasarana juga memiliki



peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, industri dan input proses produksi.

Beberapa kelemahan yang dihadapi bidang sarana prasarana adalah : (1) Bertambahnya jumlah penduduk meningkatkan permintaan terhadap air, energi listrik dan prasarana jalan, (2) beberapa wilayah khususnya daerah terpencil masih terisolir karena minimnya sarana jalan yang masih berupa tanah dan dalam kondisi rusak berat sehingga mempersulit akses mobilitas masyarakat, (3) kondisi geografis yang lebih banyak daerah pegunungan dan perbukitan mempersulit akses baik jalan, pemasangan jaringan listrik maupun pemanfaatan air bersih, (4) moda transportasi darat antara lain MPU dan bus AKDP dari sisi kuantitas masih terbatas termasuk jumlah trayek yang masih terbatas pada daerah tertentu. Dari sisi kualitas antara lain dalam hal pelayanan, kondisi MPU/bus yang kurang representatif dan multifungsi serta keterlambatan pemberangkatan, menjadi kendala utama dalam bidang transportasi. Tidak adanya angkutan umum di wilayah pedesaan yang multifungsi untuk manusia dan hasil bumi, menyebabkan lambatnya mobilitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat.

Secara umum terkait dengan bidang sarana prasarana daerah memang perlu untuk mendapat perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan perencanaan pada periode mendatang, hal ini disebabkan karena : (1) Besarnya biaya pembangunan infrastruktur menjadi kendala utama dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (2) Terbatasnya APBD dalam alokasi perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi kendala dalam peningkatan kualitas infrastruktur, (3) Tuntutan masyarakat yang makin kritis terhadap perbaikan infrastruktur publik, (4) Globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut adanya penyempurnaan dalam pembangunan pos dan informatika yang menyebabkan terjadinya konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, (5) Meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan kerawanan kerusakan lingkungan.

#### **a. Energi Listrik**

Selama Tahun 2004 hingga 2009, jumlah pelanggan menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini seiring dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan penggunaan listrik. Dari 288.437 pelanggan PT PLN (Persero) Tahun 2004, KWH terjual sebanyak 338.365.786 KWH senilai Rp 188.956.989.534,00 Sedangkan Tahun 2009, sebanyak 516.051.673 KWH senilai Rp 320.163.618.446,00.

Sistem jaringan listrik sebagai salah satu sumber energi bagi penerangan, industri maupun perdagangan dan lain-lain, sebagian besar telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di



wilayah Kabupaten Jember. Sistem distribusi ini telah melayani seluruh desa yang ada, walaupun pada beberapa bagian desa (dusun) belum terjangkau layanan listrik PLN.

Sejalan dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, diprediksi kebutuhan akan penggunaan listrik juga mengalami peningkatan. Rata-rata konsumen terbesar dalam penggunaan listrik adalah rumah tangga. Hal ini diharapkan kenaikan permintaan masyarakat terhadap listrik berbanding lurus dengan supply listrik yang dihasilkan. Permasalahan utama pemenuhan kebutuhan energi listrik terutama pada daerah terpencil. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang umumnya adalah daerah pegunungan sehingga mempersulit pemasangan jaringan listrik. Beberapa daerah terpencil juga potensial dalam pengembangan tenaga surya dan mikro hidro.

Diprediksi jenis pengguna terbesar pada periode 2011 – 2025 diperkirakan adalah rumah tangga dengan perkiraan jumlah pelanggan sebanyak 385.464. Jumlah pelanggan terbesar secara rata – rata selanjutnya adalah untuk kegiatan sosial dengan jumlah pelanggan diperkirakan sebesar 11.256 sedangkan jumlah pelanggan terkecil adalah jenis usaha dengan jumlah jenis usaha diperkirakan 11.464. Sedangkan untuk prediksi kebutuhan listrik (Kwh) secara keseluruhan pada periode 2011 – 2025 laju perkembangan kebutuhan listrik sebesar 4,70 % per tahun. Kebutuhan listrik sebagian besar terserap di rumah tangga dengan rata – rata listrik yang terjual pada periode 2011 – 2025 sebesar 510.391.009 Kwh per tahun. Rata – rata terbesar selanjutnya adalah untuk kebutuhan usaha dengan rata – rata listrik yang terjual sebesar 120.916.459 Kwh per tahun sedangkan rata – rata penggunaan listrik yang terkecil terserap oleh kebutuhan gedung kantor dengan nilai Kwh yang terjual sebesar 11.205.691 per tahun.

## **b. Air Bersih**

Tingkat pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan masyarakat Jember masih relatif rendah dan masih dibawah standart cakupan pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan. Masyarakat masih banyak menggunakan sungai sebagai sarana mencuci, mandi, buang air besar dan lain-lain. Kebutuhan pemenuhan air bersih tersebut dipenuhi dari sumur gali, sumur pompa tangan dangkal/dalam, Perlindungan Mata Air (PMA) dan Perlindungan Air Hujan (PAH).

Untuk prediksi jumlah pelanggan pada periode 2011 – 2025 mengalami laju peningkatan yang positif dimana laju peningkatan rata – rata untuk semua jenis pelanggan sebesar 2,12 % per tahun. Semakin bertambahnya pelanggan disebabkan karena prediksi kebutuhan air bersih makin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan air. Jumlah konsumen air bersih PDAM diperkirakan terus meningkat, dengan konsumen terbesar adalah rumah tempat



tinggal dengan prediksi jumlah pelanggan sebesar 24.510 pelanggan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih diprediksi mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,28 % per tahun.

### **c. Jaringan Drainase**

Sistem pembuangan/drainase merupakan sarana untuk menangani masalah genangan dan banjir di lingkungan pemukiman yang diakibatkan air buangan limbah rumah tangga dan air hujan, agar kawasan pemukiman terbebas dari ancaman genangan dan berbagai penyakit, serta meningkatkan kualitas pemukiman menjadi lebih bersih dan sehat. Prediksi perkembangan saluran drainase menunjukkan tren yang meningkat, sehingga kerusakan lingkungan dan banjir dapat diatasi.

Rencana pengelolaan sistem drainase yang terdapat di Kabupaten Jember, meliputi pengelolaan pada prasarana :

- Saluran primer, yaitu sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember.
- Saluran sekunder, yaitu saluran yang berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan air luapan dari saluran tersier (dari permukiman penduduk) ke saluran primer. Saluran sekunder ini terdiri dari anak-anak sungai, serta saluran permanen yang dibuat secara khusus.
- Saluran tersier merupakan jaringan drainase yang terdapat pada kawasan permukiman penduduk serta fasilitas pendukungnya (fasilitas umum, sosial dan komersial).

Pengembangan sistem drainase di Kabupaten Jember sebagian besar masih terintegrasi (multi fungsi) antara fungsi pembuangan air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga, bahkan dengan saluran irigasi. Memperhatikan hal ini maka diperlukan koordinasi yang intensif dan keterpaduan dalam penanganan sistem drainase.

### **d. Jalan dan Jembatan**

Tahun 2009, pajang lahan secara keseluruhan di Kabupaten Jember adalah 2.299.410 Km, terdiri dari jalan yang sudah diaspal, makadam, dan jalan tanah. 86,39% merupakan jalan yang sudah di aspal, 1,10% merupakan jalan makadam dan tanah 12,51% pada Tahun 2009. Sepanjang Tahun 2004-2009, kondisi jalan beraspal terus ditingkatkan dan jalan makadam berkurang hingga menjadi 25.321 km pada Tahun 2009, dibandingkan Tahun 2004, yaitu sepanjang 83.530 km. Begitu pula dengan kondisi jalan tanah, meskipun sempat bertambah pada Tahun 2004 hingga 2005, dari 514.220 km menjadi 573.115 km pada 2005, namun pada Tahun 2009 berkurang menjadi 287.546 km



Permasalahan jaringan jalan yang terdapat di Kabupaten Jember adalah masih banyaknya jalan tanah dan makadam yang memerlukan peningkatan kualitas menjadi jalan beraspal, khususnya pada jalan yang menuju pusat-pusat SSWP ataupun simpul-simpul pertumbuhan. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Jember dalam 5 tahun terakhir masih memerlukan perbaikan terutama pada daerah pedesaan dimana kondisi jalan tanah masih relatif. Diharapkan dalam beberapa tahun mendatang kondisi infrastruktur jalan dan jembatan menjadi lebih baik dan memenuhi standar kelayakan jalan dan jembatan sebagai barang publik. Prioritas pengembangan jaringan jalan akan sejalan dengan rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan lahan.

#### **e. Sarana Angkutan Umum**

Moda transportasi jalan raya yang terdapat di Kabupaten Jember, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu meliputi bus besar (kapasitas 54 tempat duduk), bus sedang (kapasitas 32 tempat duduk), dan Mobil Penumpang Umum (MPU). Sedangkan angkutan barang berupa pick-up, truk sedang, dan besar yang sebagian besar digunakan untuk mengangkut hasil bumi, seperti tebu, tembakau, dan tanaman pertanian lainnya. Untuk pelayanan transportasi skala kawasan, masih terdapat angkutan tradisional yaitu becak dan ojek. Keberadaan sarana angkutan ini masih sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penyediaan sarana angkutan umum tidak hanya secara kuantitas tetapi juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan yaitu ketepatan waktu dan kondisi angkutan umum. Pengembangan link (koneksi) angkutan antar kota juga perlu mempertimbangkan akses terhadap pelabuhan laut di Situbondo dan Banyuwangi, sehingga aksesibilitas regional dan nasional Kabupaten Jember semakin mudah dan cepat.

#### **f. Telekomunikasi dan Informasi**

Sistem jaringan telekomunikasi dan informasi merupakan kebutuhan vital masyarakat seiring dengan dinamika proses pembangunan daerah. Perluasan area pelayanan penting untuk meningkatkan jumlah pelanggan fasilitas telekomunikasi dan informasi, mengingat pada masa mendatang, komunikasi merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat baik daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.

Sarana komunikasi melalui sambungan telepon terpasang baik pribadi maupun umum diprediksi masih menjadi minat masyarakat beberapa tahun mendatang ditengah meningkatnya penggunaan telepon seluler saat ini. Pengembangan jaringan telepon di Kabupaten Jember dapat



dilakukan ditempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat, sedangkan sarana komunikasi lainnya seperti warung internet juga mengalami peningkatan.

### 3.1.4 Permasalahan Pembangunan Aspek Daya Saing Daerah

Pembangunan sektor **pertanian** Kabupaten Jember diarahkan pada pendapatan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk mencapai ini, arah Pembangunan sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Jember selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategi dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effect* yang besar, karena di sektor ini sekitar 60,67% masyarakat Kabupaten Jember menggantungkan hidupnya. Selain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas.

Sektor **pertanian perkebunan** harus diantisipasi dengan seksama, mengingat pada posisi ini akan juga mengakibatkan angkatan kerja yang terserap hanya pada kapasitas yang optimal skala ekonomi pada sektor tersebut. Kemungkinan ikutan yang muncul adalah sektor ekonomi masih didominasi sektor informal bagi mereka yang tidak tertampung, Kondisi ini akan mengalami berbagai kendala teknis menyangkut akses pasar maupun akses modal dalam mengerakkan perekonomian lapis bawah.

Pada perekonomian yang didukung oleh sektor agraris dengan dominasi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, masalah yang sering timbul adalah rendahnya penyerapan angkata kerja. Hal ini juga di alami pada sektor **industri** di Kabupaten Jember. Sebagian besar jenis industri yang berkembang di Kabupaten Jember adalah industri kecil yang hanya menyerap tenaga kerja yang relatif sedikit. Hal ini cukup mengkhawatirkan dalam upaya mengantisipasi pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember sebesar 0,4 % tiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa daya serap industri terhadap tenaga kerja masih rendah sehingga berpotensi bertambahnya jumlah pengangguran. Secara spasial, persebaran lokasi industri belum terkonsentrasi pada kawasan khusus, atau masih menyebar pada banyak lokasi. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam penyediaan prasarana dan pengendalian dampak lingkungan. Diperlukan penegasan lokasi kawasan industri, khususnya industri besar dan menengah yang sesuai dengan jenis/sifat usaha industrinya.



Dalam era otonomi dan potensi akses pasar yang kian besar dan cepat, perekonomian Kabupaten Jember akan terus bergulir dengan cepat dan besar. Pada posisi ini kemungkinan yang terlupakan dan terus harus diwaspadai adalah degradasi **lingkungan hidup** yang berpotensi besar terjadi. Topangan ekonomi yang gampang dieksploitasi inilah yang akan menjadi potensi degradasi permanen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Paling tidak jika kerusakan lingkungan hidup tidak diantisipasi akan berakibat pada kelestarian hutan akan menyebabkan berkurangnya sumber air, pangan, energi dan memperbesar peluang terjadinya bencana alam yang akan sangat merugikan pada perekonomian.

Secara **klimatologi**, wilayah Kabupaten Jember yang merupakan bagian dari Pulau Jawa tepatnya pada Provinsi Jawa Timur berada relatif dekat dengan garis khatulistiwa yang secara langsung mempengaruhi perubahan iklim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan temperatur rata-rata 22,52°. Pada saat musim hujan, Kabupaten Jember merupakan kawasan rawan bencana banjir karena merupakan kawasan bersudut lereng lebih dari 40%. Permasalahan lain yang akan muncul adalah kondisi topografis dan klimatologis Kabupaten Jember yang berbukit dan berlereng. Secara topografis, wilayah Kabupaten Jember adalah berbukit-bukit bahkan sebagian besar adalah wilayah berlereng sangat curam diatas 40°.

Di bidang **Pariwisata**, Kabupaten Jember sampai saat ini masih kurang tertintegrasikan dan belum mempunyai skala prioritas. Hal ini akan menyebabkan pengembangan obyek wisata tidak akan mempunyai fokus pada obyek wisata utama. Dengan pengembangan obyek wisata yang terfokus, diharapkan nantinya Kabupaten Jember akan mempunyai obyek wisata unggulan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memajukan wilayah di sekitar obyek wisata utama. Dampak lain adalah peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi akibat adanya kegiatan pariwisata yang terfokus.

Peningkatan program-program pengembangan pariwisata, kedepan harus mencakup aspek promosi maupun hasil karya obyek wisata setempat. Hal ini didasari pada kurangnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember seperti pembuatan paket-paket wisata yang memudahkan para wisatawan untuk memilih obyek wisata yang akan di kunjungi di masa yang akan datang. Hal penting lainnya adalah pengembangan dan pengenalan hasil karya penduduk lokal (*handycraft*) ataupun makanan-makanan khas di sekitar wilayah obyek wisata utama sebagai pendukung dalam upaya peningkatan sektor pariwisata.

Dinamika kehidupan **politik** dalam negeri dewasa ini telah mengalami perubahan secara signifikan pada kurun waktu dua periode pemilihan umum (pemilu) terakhir, yakni pemilu Tahun 2004 dan 2009. Perubahan ini terjadi pada berbagai sistem dan mekanisme politik penentu pimpinan



nasional. Dinamika ini menuntut kedewasaan dan kesadaran politik berbangsa dan bernegara diantara seluruh rakyat. Bagaimanapun, dinamika pemilu tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik horisontal yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Jember. Untuk itu, perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat dalam membangun kedewasaan dan kesadaran politik warga daerah memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas politik nasional.

### **3.2 Isu Strategis**

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Jember serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah lain di sekitar daerah. Isu strategis merupakan dasar dalam penelaahan visi misi daerah pada periode 20 tahun mendatang.

#### **a. Kependudukan**

Pada periode mendatang, Kabupaten Jember akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar dimana kemungkinan Tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Jember mencapai 2,306,209 jiwa. Namun pada berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami gejala perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup dimana usia harapan hidup yang panjang merupakan representasi banyak faktor antara lain kondisi ekonomi yang menjamin kesejahteraan rumahtangga dan ketercukupan kebutuhan dasarnya, pelayanan kesehatan yang efektif dalam mengatasi penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan yang baik, dan sosio-kultural masyarakat yang menjamin hidup lebih tenteram (Tahun 2007 AHH Kabupaten Jember adalah 62,27 tahun), dan menurunnya angka kematian bayi (terjadi penurunan dari Tahun 2006 sebesar 61,72 % menjadi 57,74 % pada Tahun 2010).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Jember, penyediaan lapangan kerja semakin tidak sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Tantangan yang dihadapi pada pembangunan tenaga kerja antara lain adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan masih tingginya angka pencari kerja, termasuk di dalamnya adalah para pencari kerja ke luar negeri untuk menjadi TKI dan TKW. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mendukung terjadinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Persebaran dan



mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

Isu kemiskinan merupakan masalah serius yang perlu memperoleh perhatian secara khusus. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Jember termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Rendahnya kualitas SDM petani dalam meningkatkan kesejahteraannya, belum sinerginya pengolahan hasil pertanian dan pengembangan diversifikasi tanaman, masih belum terbukanya secara luas aksesibilitas pasar hasil produksi pertanian dan masih belum optimalnya penerapan teknologi pertanian. Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember pada periode mendatang. Penanggulangan kemiskinan juga merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Secara konkrit amanat konstitusi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan tercantum dalam Undang - Undang 1945. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut maka tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, serta menurunkan jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan pula dengan komitmen bangsa Indonesia dalam mendukung pencapaian Pembangunan Milenium (*Milenium Development Goals* atau MDG's).

#### **b. Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan**

Perkembangan perekonomian Kabupaten Jember akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jika sumber pertumbuhan ekonomi makin kokoh dengan ditopang oleh faktor investasi yang tepat. Peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan sangat tergantung pada adanya kebijakan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, disamping keberanian dalam memberikan insentif kepada investor berupa kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di Kabupaten Jember serta peningkatan fasilitasi kerjasama strategis antar Kabupaten/Kota, serta perbaikan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengembangan investasi daerah. Layanan perijinan yang kurang responsif terhadap kemudahan berinvestasi merupakan kendala besar bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, berbagai kendala dan tantangan tersebut harus dieliminir untuk direkayasa dan dikelola



menjadi peluang dan kesempatan yang terbuka bagi kemajuan ekonomi daerah. Investasi daerah akan lebih didominasi oleh investasi baru dari pada perluasan investasi yang sudah ada. Peningkatan persaingan dengan kompetitor regional dan global pada periode mendatang menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan barang dan jasa. Selain itu dituntut pula untuk melakukan peningkatan efisiensi proses produksi mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas serta kenaikan ongkos produksi lainnya; terutama diprioritaskan pada sektor-sektor basis ekonomi daerah yang berfungsi sebagai sektor dengan kontribusi PDRB terbesar.

Pembangunan Koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Tantangan yang dihadapi pada pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah, adalah rendahnya produktivitas pengelolaan koperasi dan rendahnya akses UMKM pada sumberdaya produktif baik berupa akses permodalan, informasi dan pemasaran.

Pada bidang ketahanan pangan, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pengembangan dan peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor sektor pertanian untuk ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.

Berkenaan dengan pembangunan pariwisata ditujukan pada pengembangan obyek wisata dan peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata, oleh karenanya tantangan yang dihadapi pada pembangunan pariwisata adalah masih rendahnya pengelolaan pariwisata, masih kurangnya even-even wisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang, serta masih kurangnya promosi atau pemasaran pariwisata, ditunjang dengan perbaikan - perbaikan infrastruktur daerah wisata yang memadai sehingga dapat memberikan efek positif untuk memperkenalkan Jember pada dunia luar daerah sampai internasional.

Pembangunan perdagangan ditujukan pada ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, pengembangan produk unggulan, pengembangan potensi sumberdaya dan sarana prasarana perdagangan. Oleh karena itu tantangan urusan perdagangan adalah lemahnya daya saing produk-produk lokal, akses pasar baik regional maupun internasional dan terbatasnya jaringan pasar, selain itu juga adanya ketergantungan terhadap bahan baku serta lemahnya akses permodalan dan sistem distribusi yang terlalu panjang. Pada masa datang perlu disiapkan kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam mengantisipasi era globalisasi.



Pada struktur perekonomian daerah dibedakan menjadi 9 sektor ekonomi yang tertuang dalam PDRB Kabupaten Jember, yakni mulai sektor pertanian sampai sektor jasa. Berkenaan dengan pembangunan ekonomi jangka panjang di Kabupaten Jember diharapkan mampu untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dimana sektor pertanian diharapkan menjadi basis aktivitas kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan dan manufaktur perlu diarahkan hingga memiliki daya saing global.

Terkait pada bidang pendapatan daerah adalah meningkatnya belanja pemerintah daerah sehingga menuntut peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Usaha untuk meningkatkan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Tantangan didalam pengelolaan keuangan dimasa depan adalah makin tingginya tuntutan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas serta pemerataan pembangunan di daerah. Sedangkan dibidang pengelolaan aset daerah pada masa yang akan datang dihadapkan pada tantangan pengelolaan aset yang efektif, efisien serta produktif.

Rendahnya kapasitas dan ketrampilan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan berimbas kepada kurang kuatnya tekad dan semangat untuk memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan prasarana dan sarana yang sudah tersedia. Mentalitas dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta etos kerja yang belum terbangkitkan dan terbina dalam wujud struktur kerangka berpikir manajerial yang berorientasi kepada capaian peningkatan produktivitas kerja yang tinggi berimbas pada rendahnya daya juang untuk mandiri, sehingga sikap mental menggantungkan diri pada yang lain baik yang bersifat individu maupun kelembagaan masih sulit untuk dihilangkan.

Semakin menyempitnya lahan pertanian sebagai akibat dari semakin tingginya pengalihan fungsi lahan produktif yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk (perumahan ataupun bangunan fisik). Kondisi demikian akan menambah beban pembangunan apabila tidak ditangani dengan seksama, aspek pembangunan kewilayahan (tata ruang) juga akan menjadi pertarungan, demikian pula dengan penegakan hukum bidang pertanahan dan tata ruang.

Perkembangan penggunaan lahan oleh masyarakat Jember yang didukung dengan mekanisme pasar lahan yang kurang terarah dan tidak terkendali, akan mengakibatkan pembangunan yang tidak merata. Oleh karena itu konsolidasi tanah merupakan salah satu



instrumen penting untuk mengendalikan mekanisme pasar dalam kaitannya dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal, seimbang dan lestari dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah di wilayah perkotaan. Konsolidasi tanah dapat didefinisikan sebagai suatu model penataan lingkungan yang dari tidak teratur menjadi teratur. Dalam penerapannya terdapat dua aspek penting yang menjadi sasaran utama konsolidasi tanah yaitu (1) penataan fisik atas penggunaan serta (2) pemanfaatan tanah dan penataan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah. Dengan demikian diharapkan kawasan kumuh dan penguasaan lahan luas oleh sebagian masyarakat akan terkendalikan. Keterbatasan lahan akan bukan menjadi permasalahan dengan tertatanya penggunaan lahan oleh masyarakat sehingga pembangunan kota akan lebih merata.

Intervensi pemerintah dalam penggunaan lahan oleh masyarakat perlu dilakukan demikian juga sebaliknya pemerintah juga perlu memberikan insentif atas penggunaan tanah secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan memberikan pengakuan hukum atas kepemilikan dan mempermudah birokrasi kepengurusannya. Diharapkan sebelum kurun waktu akhir dari periodisasi rencana pembangunan 25 tahun kedepan berakhir pensertifikatan atas kepemilikan lahan dapat terealisasi keseluruhan.

Belum optimal dan terfokusnya kepedulian serta perhatian pemerintah terhadap upaya-upaya mempertahankan kelestarian berbagai bentuk pelayanan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan dalam tradisi kemasyarakatan, seperti: arisan, pembuatan lumbung pangan, usaha simpan pinjam sampai mekanisme rotasi kerja secara gotong royong dan sebagainya. Berbagai bentuk itu merupakan mekanisme pertahanan hidup secara informal dan tradisional, yang dilaksanakan oleh warga masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama warga. Pendekatan yang menggunakan mekanisme tradisi lokal tersebut, ternyata telah dipakai sebagai cara yang cukup handal oleh kelompok-kelompok miskin dan marginal sehingga membuktikan bahwa mereka mempunyai kemampuan dasar untuk membangun dan mempertahankan dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, tantangan ke depannya adalah lebih memfokuskan dan menitikberatkan pemberdayaannya kepada upaya-upaya untuk memelihara, meningkatkan, memantapkan, mengembangkan, dan mendayagunakan modal sosial yang mencakup iklim kerja yang mendukung ketahanan sosial masyarakat dan



penjaring kerja/kemitraan dalam mendukung berjalan dan berfungsinya sistem kesejahteraan sosial. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh dan berkembang keberdayaan serta kemandirian masyarakat dengan mengedepankan paradigma yang lebih bertumpu kepada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan peran masyarakat sipil.

Selain itu juga perlu dibangun wadah bagi keluarga di daerah, terutama keluarga yang kondisi sosial ekonominya lemah, untuk diajak bergabung dalam suatu proses pemberdayaan bersama dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Penyelenggaraannya melalui proses pendampingan perorangan yang peduli, atau petugas pemerintah dan organisasi masyarakat, keluarga yang lebih mampu bergotong royong membantu keluarga yang lemah dengan cara memberikan tambahan wawasan, pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan fungsi keluarga sehingga keluarga yang terbelakang mampu memberdayakan keluarganya. Tujuannya adalah (1) Disegarkannya kembali modal sosial berupa kehidupan gotong royong dalam masyarakat untuk peduli dan saling membantu dalam proses pemberdayaan atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan sehingga keluarga yang ertinggal dapat memenuhi kebutuhan dan membangun keluarga sejahtera secara mandiri; (2) Tumbuh dan berkembangnya lembaga dalam masyarakat dengan terorganisasinya infrastruktur sosial yang sudah ada, yaitu keluarga, yang memiliki kegiatan

atau usaha bersama yang akan menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun dan dinamis untuk mencapai kesejahteraan bersama; dan (3) Terbentuknya wadah organisasi atau wahana partisipasi sosial, di mana setiap keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan yang bisa membantu proses pemantapan fungsi-fungsi keluarga sehingga mampu membangun kehidupan keluarga dengan mulus dan sejuk.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial harus diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN) serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.

Peningkatan pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Jember masih belum diikuti dengan



pembangunan di bidang kesejahteraan terutama bagi masalah penyandang sosial masyarakat seperti pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial, organisasi sosial dan organisasi perlindungan sosial. Meskipun pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial semakin baik, namun berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih kompleks terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia karena keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai upaya pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah rawan sosial ekonomi, ketuna sosialan, keterlantaran, kecacatan, serta kerentanan sosial bagi sejumlah masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang kesejahteraan sosial. Dengan demikian permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara tepat seperti maraknya anak-anak dibawah usia produktif yang banyak terdapat di jalan-jalan meskipun berbagai upaya telah dilakukan membuat semakin sulitnya meningkatkan tingkat kualitas pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Adapun tantangan kedepan bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, penyandang masalah sosial masih relatif tinggi (warga telantar, anak nakal & anak jalanan, WTS gelandangan & pengemis), menangani masalah kecacatan, meliputi: anak cacat, penyandang cacat, penyandang cacat eks penyakit kronis dan bagaimana menangani masalah Korban HIV AIDS, yang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat.

Pada hal lain, menyimak beberapa kendala yang terjadi dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) selama ini, dalam wacana ke depannya dipandang perlu memformulasikan kembali pendekatan dalam upaya menangani PMKS secara lebih komprehensif dan terfokus. Tantangan yang dihadapinya adalah mereaktualisasi dan merevitalisasi substansi pemberdayaan PMKS yang berorientasi kepada peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*) dan peningkatan kelembagaan (*institutional building*) dalam wadah pendekatan komunitas (*community development approach*) dengan menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan kemandiriannya. Pendekatan-pendekatan yang responsif dan aspiratif yang perlu Dilakukan Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan masih rendah di lihat dari kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan peran sertanya dan rendahnya perlindungan terhadap anak. Serta tidak kalah pentingnya paramater tingginya tingkat eksploitasi terhadap anak dibawah usia produktif. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang, dan



memberikan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

### c. Lingkungan

Letak geografis Kabupaten Jember yang cukup strategis karena berada di jalur transportasi alternatif darat di antara Provinsi Jawa Timur dan Propinsi Bali disamping menguntungkan dari sisi perkembangan kota dan ekonomi, di sisi lain juga berpotensi menyebabkan semakin meningkat pula resiko pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, tanah, suara maupun air yang berakibat pada degradasi kualitas lingkungan. Dalam periode mendatang, persoalan-persoalan lingkungan hidup semakin kompleks. Meningkatnya volume sampah belum diimbangi dengan pengelolaan yang memadai, kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir semakin meningkat serta terjadinya kerusakan hutan akibat pencurian kayu.

Masalah lingkungan tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran udara dan sungai-sungai yang di akibatkan sisa buangan industri, tetapi mencakup tata lingkungan yang semakin memburuk akibat benturan tekanan penduduk, pengembangan sumber alam dan energi, proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gabungan dari hubungan tersebut pada periode mendatang yang saling mempengaruhi lambat laun pasti akan berlangsung bersama-sama, terus menerus, dan pada suatu saat di gerakan oleh suatu kejadian, misalnya kemarau yang panjang, menjelma menjadi bencana alam dan malapetaka yang sangat besar. Kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, daya dukung alam, dan *global warming* (pemanasan global) merupakan ancaman yang serius yang perlu diwaspadai di masa mendatang.

Dalam upaya menghadapi fenomena perubahan iklim sebagai akibat pemanasan global diperlukan adaptasi terhadap perubahan iklim khususnya terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman dan tata ruang. Akibat dari semakin memburuknya lingkungan hidup akan segera di rasakan pada usaha-usaha penyediaan energi, air, pada kesehatan penduduk dan lenyapnya lingkungan hidup yang nyaman dan segar. Masalah tata lingkungan yang semakin buruk, lebih dekat, lebih nyata dan lebih langsung terasa bagi masyarakat. Ironi yang besar ialah bahwa korban yang di akibatkan semakin memburuknya tata lingkungan dan lebih langsung terkena benturannya adalah golongan penduduk miskin.

Permasalahan lain yang penting untuk diselesaikan adalah adanya sistem mitigasi bencana. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana harus ditangani secara terpadu, terlebih pada wilayah yang padat penduduk. Hal ini terkait antisipasi jatuhnya korban jiwa.



Pengamanan terhadap wilayah daerah aliran sungai perlu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah antisipasi terhadap kerawanan bencana harus direncanakan oleh lembaga terkait dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat

Bencana banjir yang pernah terjadi di Kecamatan Panti yang dikategorikan bencana nasional merupakan contoh nyata akibat dari rusaknya lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu maka untuk mengantisipasi hal - hal yang berhubungan dengan rusaknya lingkungan pada periode mendatang perlu untuk diantisipasi melalui setiap perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Dalam upaya pencegahan degradasi lingkungan terkait dengan ketersediaan air bagi kebutuhan warga dimasa depan perlu dilakukan peningkatan kuantitas resapan limpasan air permukaan dalam upaya mengembalikan kandungan air tanah dan mengendalikan daya tampung sungai seiring dengan meningkatnya luas lahan terbangun, selain itu perlu mengembalikan fungsi konservasi kawasan bantaran sungai, perlindungan mata air, sumur resapan dan pengalokasian ruang terbuka hijau kota perlu secara bertahap yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif

#### **d. Pendidikan**

Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: *pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar *output*-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis merupakan prioritas pembangunan di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pematapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan daerah, setiap warga di Kabupaten Jember berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga di Kabupaten Jember tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya selama 12 tahun.



Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan sosial. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan permasalahan serius bagi pembangunan daerah dimasa mendatang. Sementara perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Jember yang mulai mengarah pada perkembangan jasa serta industri pengolahan tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja yang memadai (tingkat pendidikan dan ketrampilan yang lebih baik). Tantangan globalisasi menuntut semua pelaku ekonomi untuk semakin profesional di bidangnya dengan pengembangan SDM melalui pendidikan dan ketrampilan. Hal ini perlu ditunjang dengan penyediaan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa yang miskin, dan pelajar/mahasiswa yang mempunyai prestasi, baik di bidang akademik, olahraga, seni ataupun bidang lainnya baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Dengan kondisi saat ini dimana jumlah tenaga pengajar belum memadai dalam rangka memenuhi tingkat standar pelayanan minimum mutu pendidikan, maka tantangan ke depan adalah bagaimana menambah jumlah guru, kualitas sarana pendidikan, peningkatan mutu dan kualifikasi guru melalui penyaringan tenaga pengajar yang sesuai dengan standar, pelatihan bagi seluruh tenaga pengajar untuk mencapai pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Tantangan dunia pendidikan yang menuntut daya saing peserta didik menuntut pula realisasi penyelenggaraan pendidikan yang bertaraf internasional, sehingga standart sarana prasarana yang disediakan harus diupayakan untuk selalu ditingkatkan dengan mengacu kepada standar pendidikan salah satu negara maju yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

#### **e. Kesehatan**

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan, haruslah menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten



Jember. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit.

Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan, seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan,

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit. Dalam upaya terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat maka pada periode mendatang arah pembangunan kesehatan Di Kabupaten Jember harus berfokus pada : a) Memberikan akses dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama keluarga miskin; b) Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah tertinggal; pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit. c) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, melalui pencegahan dan penanggulangan faktor resiko, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah berbagai penyakit; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein, anemia zat besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; d) Peningkatan ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan melalui peningkatan ketersediaan obat generik, pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, zat adiktif); e) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan



tenaga kesehatan; f) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat; g) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan; h) Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan

#### **f. Sumberdaya Alam**

Menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan produktif, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktek pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Disisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan tanpa pengawasan intensif akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata guna air tanah. Memburuknya kondisi wilayah konservasi tangkapan air yang meningkat pesat menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian. Akses terhadap air bersih di Kabupaten Jember memerlukan optimalisasi.

Untuk sumberdaya alam terbarukan di Kabupaten Jember yang meliputi tanaman pangan dan Hortikultura, perkebunan, kehutanan, dan peternakan /perikanan mempunyai kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pembangunan di bidang pertanian ke depan menghadapi masalah antara lain semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkaan sumberdaya alam pertanian. Pada sisi lain kesempatan usaha pertanian sebagai upaya penanggulangan krisis ekonomi belum menunjukkan efektivitas dan belum mendorong terwujudnya sistem usaha agribisnis. Pengembangan agribisnis terutama agroindustri mempunyai peluang pengembangan yang sangat besar dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna belum optimal.



Dengan mencermati kondisi faktual bidang pertanian di Kabupaten Jember, persoalan mendasar yang masih banyak dihadapi oleh petani dan sektor pertanian di Jember adalah masih lemahnya *interlinkage* antara penyedia input, pasar, industri pengolahan dan lembaga keuangan dengan para petani kita. Sebenarnya daerah kita memiliki potensi pertanian dan sumber bahan baku yang luar biasa namun belum dikelola dengan efisien. Komoditas perikanan, perkebunan, tanaman pangan dan hutan yang luar biasa belum dikelola secara profesional dan efisien untuk meningkatkan daya saing daerah, regional maupun internasional dan memberikan nilai tambah bagi petani yang terlibat di dalamnya.

Pembangunan perikanan ditujukan pada terwujudnya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal yang memberikan manfaat pada masyarakat kawasan pesisir dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan. Oleh karenanya tantangan yang dihadapi pada pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Jember adalah optimalisasi lahan baik di darat maupun di laut, sehingga mampu memberikan produksi yang tinggi disertai dengan tantangan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar akan jumlah, mutu dan jenis hasil perikanan, serta penggunaan teknologi pada armada penangkapan ikan (Tonase kapal, mesin dan teknologi penangkapan). Disamping itu, pada periode mendatang perlu upaya dalam memberdayakan potensi kawasan pesisir dengan memanfaatkan potensi untuk kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan optimalisasi produksi perikanan laut.

Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang di Kabupaten Jember akan juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari.

Dengan potensi alam yang dimiliki dan berada di wilayah Kabupaten Jember yang terdiri dari potensi pegunungan, laut, pulau – pulau kecil, air terjun, hutan, dan sumber daya mineral serta “gumuk” untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun potensi - potensi tersebut pada periode mendatang juga menghadapi tantangan terutama dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mana akan bersinggungan dengan keberadaan dan fungsi dari potensi sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu pada periode mendatang untuk menjaga kelestariannya maka perlu adanya



perlindungan terhadap potensi sumber daya alam tersebut sehingga tetap akan menjadi asset kekayaan daerah Kabupaten Jember yang terjaga kelestariannya.

Terkait dengan keberadaan pulau - pulau kecil di kawasan wilayah Kabupaten Jember pada periode mendatang tidak lebih hanya dapat digunakan sebagai garis batas patokan dengan daerah/Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Jember. Keberadaan pulau - pulau kecil selain gugusan pulau di sekitar Nusa Barong yang terdapat di sekitar wilayah perairan laut secara fisik tidak dapat digunakan sebagai hunian ataupun berfungsi sebagai zona keanekaragaman hayati karena hanya berupa gugusan karang dengan kondisi luasan area yang kecil.

#### **g. Keagamaan Masyarakat**

Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan, agama belum sepenuhnya dijadikan landasan kehidupan pribadi dan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya aliran keagamaan yang menyimpang dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat dan belum optimalnya peran pemuka agama dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat.

Tantangan lainnya dalam pembangunan kehidupan beragama adalah memperkuat jaringan kerja sama dan koordinasi antar umat beragama terutama ketika dihadapkan dengan permasalahan - permasalahan sensitif sebagai pengaruh negatif dari globalisasi ataupun isu-isu yang mendiskreditkan salah satu agama yang dapat mengakibatkan terganggunya kerukunan antar umat beragama. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pembangunan bidang agama menjadi tantangan tersendiri untuk memperkuat jalinan kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, ormas, dan pemimpin informal lainnya dalam suasana interaksi yang dialogis dan saling menghargai adanya perbedaan antar satu agama dengan yang lain.

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang religius diperlukan landasan kesalehan sosial dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Pembangunan kesalehan sosial diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai masyarakat Jember yang bermartabat. Kesalehan sosial dalam beragama juga akan menciptakan iklim kondusif bagi



terciptanya harmonisasi kehidupan sosial, sehingga ketegangan sosial yang memicu konflik internal dan/atau antar-umat beragama dapat dicegah secara dini tanpa harus merusak tatanan kehidupan masyarakat. Selama ini telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan para pemuka agama di Kabupaten Jember, untuk membangun harmoni sosial, dan hubungan internal dan antar-umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Pada periode mendatang, dimensi kerukunan yang sudah terjaga ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat Jember yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme, dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Hal – hal yang perlu diperhatikan pada bidang keagamaan pada periode mendatang adalah : (1) perhatian dan upaya pembinaan umat serta peningkatan kualitas keidupan beragama dalam aspek yang menyeluruh, (2) Adanya fenomena munculnya pemahaman agama yang eksklusif, cenderung radikal dan tertutup, (3) Kecenderungan munculnya konflik inter dan antar umat beragama, (4) Terjadinya kerusakan moral dan akhlak yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang beradab dan beragama dan (5) Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan masyarakat Kabupaten Jember untuk dapat mempertahankan moral dan ajaran-ajaran agama dan memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap perbedaan keyakinan melalui penerapan nilai-nilai agama dan penyerapan nilai-nilai universal.

#### **h. Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan sistem pendukung yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Jumlah, mutu dan kemudahan akses terhadap infrastruktur akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara material maupun non material. Berkenaan dengan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan penataan ruang di Kabupaten Jember pada periode mendatang terkait dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang adalah kurang terpadunya rumusan rencana dengan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta masih kurangnya perencanaan tata ruang dalam mengakomodasi perkembangan kota yang begitu cepat. Selain itu perkembangan kawasan yang tidak sesuai dengan potensi dan nilai strategis kawasan pada masa datang akan menurunkan kualitas lingkungan pada beberapa kawasan. Oleh karena itu perencanaan tata ruang kota selalu memprioritaskan identifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan, seperti kawasan lindung serta kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana, baik banjir, longsor, maupun bencana lainnya.



Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana. Proses perencanaan ruang kedepan tetap memerlukan kajian mendalam terhadap kondisi eksternal yang berkembang dan regulasi-regulasi yang mengikat baik dari tingkat propinsi maupun nasional. Hal ini untuk menghindari benturan kebijakan yang terkait dengan pengaturan pola ruang. Proses perencanaan lainnya yang harus diperhatikan pada masa depan adalah penetapan kawasan-kawasan strategis yang didasarkan pada potensi wilayah, kriteria dan penilaian yang disepakati secara bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini terkait dengan usaha membuka peluang - peluang investasi di Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan aspek sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan.

Di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat dan kompleksnya kegiatan, diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di masa mendatang, diharapkan sudah tersedia kajian dan pengaturan RTH kota dalam bentuk Masterplan RTH.

Selain itu perlunya perlindungan terhadap kawasan-kawasan budaya peninggalan masa lalu baik berupa bangunan maupun situs perlu dilestarikan.

Pengelolaan sampah selama periode mendatang harus lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat baik dari sumbernya (rumah tangga dan kegiatan ekonomi kota) sampai pemanfaatan sebagai nilai ekonomi kota seperti kompos maupun material daur ulang, selain didukung oleh peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang baik tingkat lingkungan maupun tingkat kota. Untuk itu upaya nyata kemitraan dan pembinaan terhadap masyarakat baik rumah tangga maupun swasta dilakukan dengan prinsip kemudahan dan keberlanjutan. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diharapkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (sanitary landfill) untuk mencegah dampak lingkungan dan dampak sosial yang negatif.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terkait dalam fungsi pelayanan umum pada bidang transportasi harus dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut dan udara guna mendorong pemerataan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat luas, mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat, melancarkan mobilitas



distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional. Terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu pada periode mendatang di Kabupaten Jember perlu adanya peningkatan transportasi yang terpadu serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya lokal. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan transportasi di Kabupaten Jember maka dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah Kabupaten Jember, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan. Era globalisasi menyebabkan adanya integrasi antara kepentingan Pemerintah Kabupaten Jember dengan kepentingan masyarakat serta sektor-sektor strategis lainnya yang memerlukan teknologi informasi. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi masyarakat pengguna jasa serta semakin tinggi kebutuhan sarana prasana komunikasi dan informasi. Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi informasi diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus informasi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah melakukan reformasi perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; dan melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah melalui penyediaan fasilitas pembangunan rumah sederhana layak huni.

Untuk menunjang pengembangan industri dan pertumbuhan investasi serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka diperlukan ketersediaan energi listrik yang cukup. Dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, diperlukan alternatif pilihan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi listrik.

Pembangunan di bidang sumberdaya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperilaku yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumberdaya air juga ditujukan



untuk mengendalikan daya rusak air. Potensi volume air yang cukup melimpah berupa sungai dan mata air, merupakan keunggulan dalam rangka peningkatan volume dan kualitas produk pertanian serta kualitas hidup masyarakat dalam bentuk penyediaan air bersih. Potensi tersebut juga merupakan peluang bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah sendiri melalui kerjasama investasi/ pengelolaan sumber air dengan daerah lain.

#### **i. Politik, Hukum Dan Pemerintahan**

Perlunya mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis dan bermartabat serta penguatan *check and balances* Pemerintah Daerah dan DPRD. Pengembangan budaya politik ini memerlukan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Jember. Hal itu meliputi aspek keadilan sosial dan masalah hubungan antar kelompok kepentingan di Kabupaten Jember.

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis dan bermartabat, perlunya mereformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Jember agar memenuhi syarat profesionalisme. Selain itu mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat.

Peran media massa sangat menentukan proses penguatan budaya politik yang demokratis dan bermartabat. Upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Penguatan kapasitas masyarakat agar mampu merespon dan memahami dinamika sosial untuk mewujudkan demokrasi ditingkat lokal sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan partisipasi pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam bentuk kemandirian asosiasi-asosiasi sosial kemasyarakatan dan kelompok kepentingan untuk berperan baik sebagai mitra pemerintah ataupun mediator dan advokator masyarakat diperlukan untuk mendorong akselerasi proses budaya demokrasi yang bermartabat.

Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan dan perwujudan keadilan bagi masyarakat dengan memadukan antara semangat dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dengan kepentingan untuk tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi di tingkat lokal. Melalui keleluasaan dalam menggerakkan dan mengolah segenap sumber daya yang dimilikinya, Kabupaten Jember mempunyai kesempatan, peluang, dan tantangan untuk saling bersaing dan atau berkolaborasi dengan kabupaten/kota lainnya baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Ini semua memerlukan kebijakan pemerintah yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*.



Hukum mempunyai dua peran utama dalam penyelenggaraan semua tingkatan pemerintahan: Pertama, sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan dan mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan, kedua adalah sebagai sarana untuk menjalankan kebijakan pembangunan daerah otonom dalam rangka mencapai tujuan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat. Konsekuensi terhadap peran yang demikian itu, maka hukum sebagai sistem terdapat tiga elemen, yaitu (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaidah peraturan (elemen instrumental) dan (3) elemen perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (Elemen subyektif dan kultural). Terkait dengan kondisi tersebut, dengan memperhatikan kondisi yang sekarang terjadi di Kabupaten Jember bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang, maka pada periode mendatang diperlukan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat Jember.

Masih adanya aset pemerintah daerah dan aset desa yang belum tertib secara administratif, maka diperlukan upaya untuk menata, menertibkan dan mendapatkan kepastian hukum.



## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

### 4.1 Visi Pembangunan Kabupaten Jember

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai angan-angan luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 dibangun atas dasar kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Kabupaten Jember yang akan dihadapi hingga Tahun 2025. Disamping itu juga memperhatikan Visi Pembangunan Nasional dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, maka visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN JEMBER SEBAGAI DAERAH UNGGULAN AGRIBISNIS DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

**AGRIBISNIS** adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Agribisnis adalah suatu kesatuan sistem dalam hal ini terdiri atas penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen (agroindustri), pemasaran, serta berbagai kegiatan pendukungnya. Ditinjau dari potensi lokal, maka agribisnis merupakan pilihan pendekatan pembangunan di Kabupaten Jember untuk memperoleh manfaat yang besar dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran usaha pertanian. Sedangkan daerah Agribisnis adalah suatu potensi geografis yang mempunyai keserupaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama sehingga membentuk daerah yang berisi berbagai kegiatan usaha di bidang agribisnis.

Pendekatan daerah agribisnis merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember terutama bila dikaitkan dengan potensi lokal dan upaya peningkatan daya saing pada era pasar bebas dan globalisasi. Pendekatan ini harus mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan.



Kebijakan pengembangan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan kabupaten Jember sebagai daerah unggul dibidang agribisnis bertujuan untuk : (1) menumbuh kembangkan pusat pertumbuhan ekonomi agribisnis baru di perdesaan; (2) membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat perdesaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi agribisnis; (3) menumbuh kembangkan lembaga-lembaga ekonomi agribisnis yang produktif; (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan; dan (5) mewujudkan tata ruang ideal antara kota dengan desa yang saling mendukung, melengkapi dan memperkuat; (6) meningkatkan produksi agribisnis yang mampu menciptakan spesifikasi yang unggul dalam produktifitas, kualitas dan diterima pasar.

**USAHA EKONOMI PRODUKTIF** merupakan serangkaian kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan produktif. Potensi sumberdaya lokal yang tersedia melimpah di Kabupaten Jember menjadi unggulan yang membedakan dengan daerah lainnya. Usaha ekonomi produktif mengandalkan potensi unggulan di Kabupaten Jember. Usaha ekonomi produktif akan meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas sumberdaya, meningkatkan penghasilan, meningkatkan daya saing dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal. Kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal ini, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan dan kemiskinan serta menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara berbagai kelompok usaha, baik antara kelompok usaha besar, menengah, kecil, mikro bahkan dengan kelompok sektor informal di Kabupaten Jember.

Pengembangan daerah unggulan usaha ekonomi produktif di Kabupaten Jember bertujuan untuk : (1) menumbuh kembangkan pusat pertumbuhan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal secara merata; (2) menumbuhkembangkan diversifikasi produk; (3) membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif; (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat; (5) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan; (6) meningkatkan produksi yang mampu menciptakan spesifikasi yang unggul dalam produktifitas, kualitas dan diterima pasar; serta (7) menumbuhkan kerjasama saling mendukung, melengkapi, memperkuat, menguntungkan antara berbagai kelompok usaha dan lembaga ekonomi.

## **POTENSI LOKAL**

Potensi lokal merupakan segala sesuatu kemampuan lokal yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan bisa juga berupa hasil bumi, kreasi seni,



tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Potensi lokal merupakan suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk atau jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik serta memiliki keunggulan yang komparatif.

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember, khususnya kebutuhan pokok dan kebutuhan prioritas dalam pembangunan. Keterbatasan sumberdaya yang tersedia menjadi pertimbangan demi kelangsungan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan mengacu pada kondisi dimana kelangsungan hidup manusia tidak melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam rangka mencapai standar kehidupan masyarakat Jember yang sejahtera dan bermartabat, maka pembangunan yang dilaksanakan perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan pembangunan mempunyai 2 efek yang berjalan bersamaan, efek positif berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan dari proses pembangunan, efek negatif berupa kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Untuk itu diperlukan kesadaran bersama antara Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

**SEJAHTERA**, dalam arti umum menunjuk kepada *keadaan yang baik*, kondisi manusia dalam kondisi makmur, sehat, aman dan tenteram. Dalam arti ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, terpenuhinya kebutuhan, tersedianya lapangan pekerjaan dan diperolehnya penghasilan yang layak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat sejahtera merupakan cita-cita yang diinginkan dalam proses pembangunan di Kabupaten Jember, dalam hal ini sejahtera yang berkelanjutan.

Pembangunan di kabupaten Jember ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin. Sejahtera lahir, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik secara memadai, sedangkan sejahtera batin ditandai dengan perilaku yang menjunjung norma agama, moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-sehari.



Dari segi pemerataan kesejahteraan, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi berkeadilan, yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan perkapita tinggi dan terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk itu, pendekatan yang diambil untuk terwujudnya pertumbuhan berkeadilan adalah memberdayakan masyarakat agar masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan agribisnis serta usaha ekonomi produktif.

**BERMARTABAT** adalah tingkatan harkat kemanusiaan atau harga diri, yang berkualitas, bernilai, berdaya saing ataupun berkaitan dengan status. Bermartabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat, bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Jember menghasilkan kedudukan yang terhormat, bernilai dan berkualitas, sehingga harkat dan martabat masyarakat Jember dipandang baik.

#### **4.2 Misi Pembangunan Kabupaten Jember**

Misi dibangun bertujuan untuk mencapai visi yang dicita-citakan. Adapun misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Maksudnya adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu tata kelola yang berwawasan ke depan, transparan, partisipatoris, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, profesional, kompeten, daya tanggap, efisien, efektif dan desentralisasi.
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia.  
Maksudnya adalah upaya mencetak SDM yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia dalam proses pembangunan, melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta perbaikan bidang kesehatan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
3. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat  
Maksudnya adalah upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan akses untuk mendapatkan layanan sumberdaya ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.
4. Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal



Maksudnya adalah upaya mewujudkan penataan dan pemberdayaan agribisnis yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya lokal yang potensial yang terdapat di Kabupaten Jember seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Maksudnya adalah upaya menumbuhkan usaha ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan diversifikasi produk, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal, pemerataan akses sumberdaya ekonomi, integrasi antar usaha, kemitraan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan Maksudnya adalah upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mampu mendukung pembangunan baik secara kuantitas maupun kualitas dalam jangka panjang.

7. Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan

Maksudnya adalah upaya mewujudkan tata kelola lingkungan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan saat ini dan dimasa yang akan datang.

#### 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jember

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok Pembangunan Jangka panjang
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	a. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah.</li><li>2. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur.</li><li>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</li><li>4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.</li><li>5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.</li><li>6. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam kapasitas penguatan kelembagaan.</li><li>7. Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat</li><li>8. Fasilitasi penguatan pemerintahan desa/kelurahan.</li><li>9. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan</li></ol>



		<p>kepada daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Peningkatan fungsi pengawasan internal</li><li>11. Pengembangan kerjasama antara daerah dan antar lembaga.</li><li>12. Standarisasi kompetensi jabatan.</li><li>13. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.</li></ol>
	<p>b. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan dan penguatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.</li><li>2. Penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar PAD.</li><li>3. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.</li></ol>
	<p>c. Mewujudkan ketertiban sosial dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan produk hukum baik yang berkaitan dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah maupun yang berkaitan dengan substansi materi sesuai dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat dan pemerintahan;</li><li>2. Optimalisasi kelembagaan hukum di tingkat pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;</li><li>3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum;</li><li>4. Melakukan advokasi ataupun pendampingan hukum;</li><li>5. Mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;</li><li>6. Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-anak;</li><li>7. Pengembangan kerjasama dengan aparat penegak hukum;</li><li>8. Pengamanan aset-aset pemerintah daerah;</li><li>9. Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat; dan</li><li>10. Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.</li></ol>
	<p>d. Menciptakan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi.</li><li>2. Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan.</li><li>3. Peningkatan peran pemuda dan</li></ol>



		perempuan dalam bidang politik.
	e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember.</li><li>2. Peningkatan pemanfaatan, pengembangan jaringan teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember.</li><li>3. Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar.</li><li>4. Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi.</li></ol>
MISI KE 2 Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia	a. Mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,</li><li>2. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD),</li><li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa,</li><li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun,</li><li>5. Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat,</li><li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal,</li><li>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan,</li><li>8. Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif.</li></ol>
	b. Membentuk akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terciptanya lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika;</li><li>2. Terbentuknya kurikulum pendidikan yang berbasis pada moralitas dan etika;</li><li>3. Terwujudnya kepemimpinan yang mengedepankan suri tauladan moral dan etika; dan</li><li>4. Terlaksananya nilai-nilai luhur bangsa, agama dan budaya lokal yang baik (<i>local wisdom</i>) dalam kehidupan sehari-hari..</li></ol>
	c. Penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ekonomi</li><li>2. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah, dan</li></ol>



		3. Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda.
	d. Peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi.	1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta ketrampilan pemuda. 2. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda. 3. Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang. 4. Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga; dan 5. Pembinaan karakter kebangsaan bagi pemuda.
	e. Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.	1. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang. 2. Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. 3. Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dibidang agribisnis. 4. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 5. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
MISI KE 3 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan; 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan; 4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata; 5. Peningkatan promosi kesehatan; 6. Peningkatan kesehatan lingkungan dan keluarga; 7. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana; dan 8. Peningkatan gizi masyarakat.
	b. Mewujudkan struktur kependudukan yang ideal melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi.	1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan. 2. Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan lapangan pekerjaan di seluruh wilayah. 3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas. 4. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan klaster spasial.
	c. Menciptakan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing	1. Penciptaan perluasan lapangan kerja khususnya yang bersifat padat karya



	dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha.	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja.</li><li>3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.</li><li>4. Pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal.</li><li>5. Peningkatan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja baik dalam daerah maupun di luar negeri sehingga terjamin hak-haknya.</li><li>6. Peningkatan standar pengupahan yang layak; dan</li><li>7. Peningkatan keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja.</li></ol>
	d. Meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial.</li><li>2. Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar.</li><li>3. Penanganan dampak sosial akibat bencana.</li><li>4. Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.</li></ol>
MISI KE 4 Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal	a. Memanfaatkan dan menerapkan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan komoditas unggulan daerah;</li><li>2. Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi dan teknologi pasca panen serta pengolahan; dan</li><li>3. Peningkatan, penguatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.</li></ol>
	b. Mengembangkan Sistem Agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan produksi komoditi pertanian dan perikanan dalam lingkup luas dalam rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional;</li><li>2. Mengembangkan usaha pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi kewilayahan;</li><li>3. Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan;</li><li>4. Meningkatkan sistem informasi produksi dan informasi pasar;</li><li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;</li><li>6. Menyediakan tempat pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis agribisnis secara terpadu;</li><li>7. Menguatkan dan mengembangkan akses pasar dan permodalan;</li><li>8. Memanfaatkan, optimalisasi hutan</li></ol>



		lestari untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan 9. Mengembangkan penguasaan sistem informasi produksi dan informasi pasar.
MISI KE 5 Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	a. Penataan Struktur Industri diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar.	1. Menata struktur industri kecil dan menengah; 2. Mengembangkan, menguatkan, memantapkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri; 3. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal; 4. Menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana bagi kluster industri; dan 5. Meningkatkan kapasitas IPTEK produksi bagi Industri Kecil dan Menengah. 6. Menguatkan dan mengembangkan akses pasar dan permodalan industry kecil dan menengah.
	b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah.	1. Pengembangan dan penguatan sistem informasi pasar; 2. Menjamin ketersediaan dan harga produk kebutuhan pokok masyarakat; dan 3. Memberikan perlindungan konsumen dan produsen.
	c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.	1. Penguatan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank; dan 2. Memfasilitasi dan optimalisasi kredit lembaga keuangan terhadap Koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank
	d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal.	1. Peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM koperasi dan UMKM. 2. Menumbuhkan dan menguatkan wirausaha untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing. 3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif. 4. Memfasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha skala besar.
	e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, pembangunan infrastruktur ekonomi, penyederhanaan sistem perijinan, dan kepastian usaha.	1. Pengembangan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi. 2. Peningkatan investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif. 3. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur penunjang investasi. 4. Peningkatan promosi untuk mendukung investasi di bidang



		<p>agribisnis dan usaha ekonomi produktif; dan</p> <p>5. Menjamin kepastian usaha melalui kepastian hukum.</p>
	<p>f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri pariwisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, dan daya tarik wisata, serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.</p>	<p>1. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata.</p> <p>2. Pengembangan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan berbasis potensi lokal.</p> <p>3. Peningkatan promosi pariwisata daerah.</p> <p>4. Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata.</p> <p>5. Peningkatan daya saing pariwisata.</p> <p>6. Peningkatan SDM pariwisata.</p> <p>7. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata daerah; dan</p> <p>8. Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan.</p>
<p>MISI KE 6 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan</p>	<p>a. Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas, daya dukung dan kualitas transportasi.</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, dan jembatan</p> <p>3. Pengembangan jalan lingkar kota (<i>Outer ring road</i>)</p> <p>4. Pengembangan trayek angkutan antar dan inter moda serta menjangkau kawasan strategis serta pedesaan.</p> <p>5. Peningkatan aksesibilitas regional dengan mengembangkan jaringan transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara diwilayah sekitar.</p> <p>6. Pengembangan sistem terminal dan sub terminal secara hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah.</p> <p>7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi terutama kawasan strategis, kawasan terpencil dan kawasan rawan bencana.</p>
	<p>b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah.</p>	<p>1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis. .</p> <p>2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral.</p> <p>3. Pengendalian pemanfaatan ruang terkait peraturan zonasi dan perijinan.</p>
	<p>c. Pembangunan Infrastruktur Wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, dan kawasan budidaya.</p>	<p>1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan.</p> <p>2. Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana .</p> <p>3. Pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis</p>



		ekonomis dan kawasan tertinggal.
	d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal, tertatanya lingkungan sehat dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan.</li><li>2. Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.</li></ol>
	e. Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan dalam pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan konservasi sumberdaya air dalam melestarikan kuantitas dan kualitas air.</li><li>2. Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.</li><li>3. Pengendalian daya rusak air melalui manajemen pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS</li><li>4. Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.</li></ol>
MISI KE 7 Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan	a. Pengembangan Sumber Daya Alam Hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan pelestarian keanekaragaman hayati.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA Hayati;</li><li>2. Pemanfaatan potensi SDA Hayati dan menjaga kelestariannya;</li><li>3. Perlindungan dan pengembangan plasma nutfah spesifik lokal;</li><li>4. Perlindungan dari klaim pihak lain (hak paten) serta peningkatan nilai tambah; dan</li></ol>
	b. Pengembangan Energi diarahkan untuk pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan dan pemerataan Distribusi Energi;</li><li>2. Pengembangan dan kemandirian energi alternatif yang ramah lingkungan; dan</li><li>3. Kemandirian energi alternatif yang ramah lingkungan.</li></ol>
	c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam terbarukan;</li><li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan;</li><li>3. Peningkatan kawasan konservasi SDA terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat;</li><li>4. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan kerusakan terhadap SDA terbarukan;</li><li>5. Penanganan pencemaran, kerusakan terhadap SDA terbarukan (tanah dan lahan, udara, hutan dan vegetasi);</li><li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA terbarukan;</li><li>7. Penataan kelembagaan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan; dan</li><li>8. Rehabilitasi dan pemulihan SDA</li></ol>



		terbarukan.
	d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Tak Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang efisien, bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam tak terbarukan;</li><li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara inovatif, efisien, bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan;</li><li>3. Peningkatan kawasan konservasi SDA tak terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat;</li><li>4. Identifikasi dan inventarisasi potensi pencemaran, perusakan terhadap SDA tak terbarukan;</li><li>5. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA tak terbarukan;</li><li>6. Penegakan hukum terhadap perusakan SDA tak terbarukan;</li><li>7. Penataan kelembagaan pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan; dan</li><li>8. Rehabilitasi SDA tak terbarukan;</li></ol>
	e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat dan penanganan paska bencana.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap informasi kewaspadaan wilayah rentan dan rawan bencana;</li><li>2. Pengembangan sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan terhadap wilayah rentan dan rawan bencana;</li><li>3. Peningkatan upaya dan koordinasi lembaga dalam pengurangan resiko bencana alam;</li><li>4. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan pra, saat dan paska bencana alam;</li><li>5. Penguatan kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan hidup; dan</li><li>6. Penataan kelembagaan kebencanaan</li></ol>



## BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

### 5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan Propinsi Jawa Timur. Masyarakat yang maju, adil dan makmur ini adalah penggambaran dari situasi masyarakat yang hidup dalam pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Jember dengan stabilitas kondisi dan situasi yang terus terjaga. Secara rinci rumusan maksud dan sasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan

MISI DAERAH	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
MISI KE 1 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	a. Penyelenggaraan Pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah.</li><li>2. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur.</li><li>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</li><li>4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.</li><li>5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.</li><li>6. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam kapasitas penguatan kelembagaan.</li><li>7. Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat</li><li>8. Fasilitasi penguatan pemerintahan desa/kelurahan.</li><li>9. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepada daerah.</li><li>10. Peningkatan fungsi pengawasan internal</li><li>11. Pengembangan kerjasama antara daerah dan antar lembaga.</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>12. Standarisasi kompetensi jabatan.</li><li>13. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.</li></ol>
	<p>b. Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan dan penguatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.</li><li>2. Penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar PAD.</li><li>3. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.</li></ol>
	<p>c. Pembangunan Hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan produk hukum baik yang berkaitan dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah maupun yang berkaitan dengan substansi materi sesuai dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat dan pemerintahan;</li><li>2. Optimalisasi kelembagaan hukum di tingkat pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;</li><li>3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum;</li><li>4. Melakukan advokasi ataupun pendampingan hukum;</li><li>5. Mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;</li><li>6. Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-anak;</li><li>7. Pengembangan kerjasama dengan aparat penegak hukum;</li><li>8. Pengamanan aset-aset pemerintah daerah;</li><li>9. Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat; dan</li><li>10. Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.</li></ol>
	<p>d. Pembangunan Politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi.</li><li>2. Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan.</li><li>3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik.</li></ol>



	<p>e. Pembangunan Komunikasi dan Informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember.</li><li>2. Peningkatan pemanfaatan, pengembangan jaringan teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember.</li><li>3. Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar.</li><li>4. Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi.</li></ol>
<p>MISI KE 2 Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia</p>	<p>a. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,</li><li>2. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD),</li><li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa,</li><li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun,</li><li>5. Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat,</li><li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal,</li><li>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan,</li><li>8. Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif.</li></ol>
	<p>b. Pembangunan Moral Dan Etika diarahkan pada pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terciptanya lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika;</li><li>2. Terbentuknya kurikulum pendidikan yang berbasis pada moralitas dan etika;</li><li>3. Terwujudnya kepemimpinan yang mengedepankan suri tauladan moral dan etika; dan</li><li>4. Terlaksananya nilai-nilai luhur bangsa, agama dan budaya lokal yang baik (<i>local wisdom</i>) dalam kehidupan sehari-hari..</li></ol>
	<p>c. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ekonomi</li></ol>



	<p>kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah, dan</li><li>3. Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda.</li></ol>
	<p>d. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta ketrampilan pemuda.</li><li>2. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda.</li><li>3. Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang.</li><li>4. Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga; dan</li><li>5. Pembinaan karakter kebangsaan bagi pemuda.</li></ol>
	<p>e. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang.</li><li>2. Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.</li><li>3. Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dibidang agribisnis.</li><li>4. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</li><li>5. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.</li></ol>
<p>MISI KE 3 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat</p>	<p>a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan;</li><li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;</li><li>3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan;</li><li>4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata;</li><li>5. Peningkatan promosi kesehatan;</li><li>6. Peningkatan kesehatan lingkungan dan keluarga;</li><li>7. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana; dan</li><li>8. Peningkatan gizi masyarakat.</li></ol>
	<p>b. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang ideal melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan.</li><li>2. Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan lapangan pekerjaan di seluruh wilayah.</li><li>3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas.</li></ol>



		4. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan klaster spasial.
	c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penciptaan perluasan lapangan kerja khususnya yang bersifat padat karya</li><li>2. Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja.</li><li>3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.</li><li>4. Pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal.</li><li>5. Peningkatan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja baik dalam daerah maupun di luar negeri sehingga terjamin hak-haknya.</li><li>6. Peningkatan standar pengupahan yang layak; dan</li><li>7. Peningkatan keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja.</li></ol>
	d. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial.</li><li>2. Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar.</li><li>3. Penanganan dampak sosial akibat bencana.</li><li>4. Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.</li></ol>
MISI KE 4 Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal	a. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan komoditas unggulan daerah;</li><li>2. Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi dan teknologi pasca panen serta pengolahan; dan</li><li>3. Peningkatan, penguatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.</li></ol>
	b. Pengembangan Sistem Agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan produksi komoditi pertanian dan perikanan dalam lingkup luas dalam rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional;</li><li>2. Mengembangkan usaha pertanian dan perikanan dengan pendekatan potensi kewilayahan;</li><li>3. Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan;</li><li>4. Meningkatkan sistem informasi</li></ol>



		<p>produksi dan informasi pasar;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;</li><li>6. Menyediakan tempat pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis agribisnis secara terpadu;</li><li>7. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan permodalan;</li><li>8. Memanfaatkan, optimalisasi hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan</li><li>9. Mengembangkan penguasaan sistem informasi produksi dan informasi pasar.</li></ol>
MISI KE 5 Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	a. Penataan Struktur Industri diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menata struktur industri kecil dan menengah;</li><li>2. Mengembangkan, memperkuat, memantapkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri;</li><li>3. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal;</li><li>4. Menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana bagi kluster industri; dan</li><li>5. Meningkatkan kapasitas IPTEK produksi bagi Industri Kecil dan Menengah.</li><li>6. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan permodalan industry kecil dan menengah.</li></ol>
	b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan dan penguatan sistem informasi pasar;</li><li>2. Menjamin ketersediaan dan harga produk kebutuhan pokok masyarakat; dan</li><li>3. Memberikan perlindungan konsumen dan produsen.</li></ol>
	c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank; dan</li><li>2. Memfasilitasi dan optimalisasi kredit lembaga keuangan terhadap Koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank</li></ol>
	d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM koperasi dan UMKM.</li><li>2. Menumbuhkan dan memperkuat wirausaha untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing.</li><li>3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif.</li><li>4. Memfasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha skala besar.</li></ol>



	<p>e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, pembangunan infrastruktur ekonomi, penyederhanaan sistem perijinan, dan kepastian usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi.</li><li>2. Peningkatan investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif.</li><li>3. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur penunjang investasi.</li><li>4. Peningkatan promosi untuk mendukung investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif; dan</li><li>5. Menjamin kepastian usaha melalui kepastian hukum.</li></ol>
	<p>f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri pariwisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, dan daya tarik wisata, serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata.</li><li>2. Pengembangan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan berbasis potensi lokal.</li><li>3. Peningkatan promosi pariwisata daerah.</li><li>4. Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata.</li><li>5. Peningkatan daya saing pariwisata.</li><li>6. Peningkatan SDM pariwisata.</li><li>7. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata daerah; dan</li><li>8. Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan.</li></ol>
<p>MISI KE 6 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan</p>	<p>a. Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kapasitas, daya dukung dan kualitas transportasi.</li><li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, dan jembatan</li><li>3. Pengembangan jalan lingkar kota (<i>Outer ring road</i>)</li><li>4. Pengembangan trayek angkutan antar dan inter moda serta menjangkau kawasan strategis serta pedesaan.</li><li>5. Peningkatan aksesibilitas regional dengan mengembangkan jaringan transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara di wilayah sekitar.</li><li>6. Pengembangan sistem terminal dan sub terminal secara hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah.</li><li>7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi terutama kawasan strategis, kawasan terpencil dan kawasan rawan bencana.</li></ol>
	<p>b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis. .</li><li>2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral.</li><li>3. Pengendalian pemanfaatan ruang</li></ol>



	rangka mendukung pembangunan daerah.	terkait peraturan zonasi dan perijinan.
	c. Pembangunan Infrastruktur Wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, dan kawasan budidaya.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan.</li><li>2. Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana .</li><li>3. Pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis ekonomis dan kawasan tertinggal.</li></ol>
	d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal, tertatanya lingkungan sehat dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan.</li><li>2. Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.</li></ol>
	e. Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan dalam pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan konservasi sumberdaya air dalam melestarikan kuantitas dan kualitas air.</li><li>2. Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.</li><li>3. Pengendalian daya rusak air melalui manajemen pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS</li><li>4. Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.</li></ol>
MISI KE 7 Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan	a. Pengembangan Sumber Daya Alam Hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan pelestarian keanekaragaman hayati.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA Hayati;</li><li>2. Pemanfaatan potensi SDA Hayati dan menjaga kelestariannya;</li><li>3. Perlindungan dan pengembangan plasma nutfah spesifik lokal;</li><li>4. Perlindungan dari klaim pihak lain (hak paten) serta peningkatan nilai tambah; dan</li></ol>
	b. Pengembangan Energi diarahkan untuk pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan dan pemerataan Distribusi Energi;</li><li>2. Pengembangan dan kemandirian energi alternatif yang ramah lingkungan; dan</li><li>3. Kemandirian energi alternatif yang ramah lingkungan.</li></ol>
	c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam terbarukan;</li><li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan;</li></ol>



	berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peningkatan kawasan konservasi SDA terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat;</li><li>4. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan kerusakan terhadap SDA terbarukan;</li><li>5. Penanganan pencemaran, kerusakan terhadap SDA terbarukan (tanah dan lahan, udara, hutan dan vegetasi);</li><li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA terbarukan;</li><li>7. Penataan kelembagaan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan; dan</li><li>8. Rehabilitasi dan pemulihan SDA terbarukan.</li></ol>
	d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Tak Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang efisien, bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam tak terbarukan;</li><li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara inovatif, efisien, bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan;</li><li>3. Peningkatan kawasan konservasi SDA tak terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat;</li><li>4. Identifikasi dan inventarisasi potensi pencemaran, kerusakan terhadap SDA tak terbarukan;</li><li>5. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan kerusakan terhadap SDA tak terbarukan;</li><li>6. Penegakan hukum terhadap kerusakan SDA tak terbarukan;</li><li>7. Penataan kelembagaan pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan; dan</li><li>8. Rehabilitasi SDA tak terbarukan;</li></ol>
	e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat dan penanganan paska bencana.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap informasi kewaspadaan wilayah rentan dan rawan bencana;</li><li>2. Pengembangan sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan terhadap wilayah rentan dan rawan bencana;</li><li>3. Peningkatan upaya dan koordinasi lembaga dalam pengurangan resiko bencana alam;</li><li>4. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan pra, saat dan paska bencana alam;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Penguatan kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan hidup; dan</li><li>6. Penataan kelembagaan kebencanaan.</li></ol>
--	--	--



## 5.2 Tahapan dan Prioritas

Dalam melaksanakan RPJPD Kabupaten Jember haruslah diperlukan suatu upaya pentahapan dan penentuan skala prioritas kebijakan yang akan diambil pada setiap periodisasinya. empat periode termasuk penetapan skala prioritas pada masing–masing periode tersebut sampai dengan Tahun 2025.

Pembagian rencana pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah, harus tetap mengarah pada pencapaian visi Kabupaten Jember 2005-2025, yaitu Kabupaten Jember Sebagai Wilayah Agribisnis dan Ekonomi Produktif Yang Religius, Berdaya Saing dan Berkeadilan. Artinya, substansi visi, misi dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

### 5.2.1 Tahap Lima Tahun ke-1 (2005-2010)

#### MISI KE 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
<p>a. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur;</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> <li>4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;</li> <li>5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan;</li> <li>6. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam kapasitas penguatan kelembagaan;</li> <li>7. Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat;</li> <li>8. Penguatan pemerintahan desa/kelurahan;</li> <li>9. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepada daerah;</li> <li>10. Peningkatan fungsi pengawasan internal;</li> <li>11. Pengembangan kerjasama antara daerah dan antar lembaga; dan</li> <li>12. Standarisasi kompetensi jabatan</li> </ol>
<p>b. Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan penguatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah</li> <li>2. Penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar PAD</li> <li>3. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisien, efektif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan</li> </ol>



<p>c. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat</li> <li>2. Optimalisasi kelembagaan hukum</li> <li>3. Peningkatan advokasi dan kesadaran hukum masyarakat</li> <li>4. Mengupayakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme</li> <li>5. Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-anak</li> <li>6. Pengamanan aset-aset pemerintah daerah</li> <li>7. Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat</li> <li>8. Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>9. Pengembangan kerjasama dengan aparat penegak hukum</li> </ol>
<p>d. Pembangunan politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi;</li> <li>2. Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; dan</li> <li>3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik</li> </ol>
<p>e. Pembangunan komunikasi dan informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember;</li> <li>2. Peningkatan pemanfaatan, pengembangan jaringan teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember;</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar; dan</li> <li>4. Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi.</li> </ol>

**MISI KE 2 : Menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia**

<p><b>ARAHAN KEBIJAKAN</b></p>	<p><b>AGENDA</b></p>
<p>a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>2. Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan bagi pendidikan anak usia dini (PAUD);</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa;</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah dalam rangka memenuhi wajib belajar 9 tahun;</li> <li>5. Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal;</li> <li>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan; dan</li> <li>8. Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif.</li> </ol>
b. Pembangunan moral dan etika diarahkan pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman nilai – nilai moral dan etika dalam lingkungan keluarga dan masyarakat</li> <li>2. Mewujudkan kurikulum pendidikan yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan etika</li> <li>3. Mengedepankan kepemimpinan yang mengedepankan suri tauladan moral dan etika</li> <li>4. Terlaksananya nilai – nilai luhur bangsa, agama dan budaya lokal dalam kehidupan sehari – hari</li> </ol>
c. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ekonomi</li> <li>2. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah serta budaya-budaya religius</li> <li>3. Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda</li> </ol>
d. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan serta karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta ketrampilan pemuda</li> <li>2. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda</li> <li>3. Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang</li> <li>4. Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga</li> <li>5. Pembinaan karakter kebangsaan bagi pemuda</li> </ol>
e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi yang wajar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta perlindungan dan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang;</li> <li>2. Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan;</li> <li>3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan</li> <li>4. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.</li> </ol>

### MISI KE 3 : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan;</li> <li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan;</li> <li>4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata;</li> <li>5. Peningkatan promosi kesehatan;</li> <li>6. Peningkatan kesehatan lingkungan dan keluarga;</li> <li>7. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana; dan</li> <li>8. Peningkatan gizi masyarakat</li> </ol>



<p>b. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang ideal melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas;</li> <li>2. Pengendalian mobilitas penduduk dengan menata penyebaran lapangan pekerjaan di seluruh wilayah;</li> <li>3. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan <i>klaster spasial</i>; dan</li> <li>4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan.</li> </ol>
<p>c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan perluasan lapangan kerja khususnya yang bersifat padat karya;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja;</li> <li>3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;</li> <li>4. Pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal;</li> <li>5. Peningkatan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja;</li> <li>6. Peningkatan standar pengupahan yang layak; dan</li> <li>7. Peningkatan keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja.</li> </ol>
<p>d. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial ;</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar;</li> <li>3. Penanganan dampak sosial akibat bencana; dan</li> <li>4. Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.</li> </ol>

**MISI KE 4 : Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Sumberdaya Lokal**

<p><b>ARAHAN KEBIJAKAN</b></p>	<p><b>AGENDA</b></p>
<p>a. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan komoditas unggulan daerah</li> <li>2. Penerapan teknologi budidaya, produksi serta pasca panen dan pengolahan</li> <li>3. Penguatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan</li> </ol>
<p>b. Pengembangan sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi pertanian dan perikanan dalam lingkup luas dalam rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional;</li> <li>2. Mengembangkan usaha pertanian dan perikanan dengan pendekatan basis potensi kewilayahan;</li> <li>3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan;</li> <li>4. Meningkatkan sistem informasi produksi dan informasi pasar;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;</li><li>6. Menyediakan tempat pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis agribisnis secara terpadu;</li><li>7. Mengembangkan akses pasar dan permodalan;</li><li>8. Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan</li><li>9. Menata jaringan dalam sistem informasi produksi dan informasi pasar..</li></ol>
--	--

**MISI KE 5 : Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>AGENDA</b>
a. Penataan Struktur industri diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menata struktur industri kecil dan menengah;</li><li>2. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri;</li><li>3. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal;</li><li>4. Menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana bagi kluster industri;</li><li>5. Menerapkan IPTEK dalam produksi bagi Industri Kecil dan Menengah; dan</li><li>6. Mengembangkan akses pasar dan permodalan Industri Kecil dan Menengah.</li></ol>
b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan sistem informasi pasar;</li><li>2. Menjamin ketersediaan dan harga produk kebutuhan pokok masyarakat;</li><li>3. Memberikan perlindungan konsumen dan produsen.</li></ol>
c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank;</li><li>2. Memfasilitasi kredit lembaga keuangan terhadap koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.</li></ol>
d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;</li><li>2. Menumbuhkan jiwa wirausaha untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing;</li><li>3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;</li><li>4. Memfasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha skala besar.</li></ol>
e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan sistem perijinan dan kepastian usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi;</li><li>2. Penataan sistem investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li><li>3. Penyediaan infrastruktur penunjang investasi;</li><li>4. Meningkatkan promosi investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li><li>5. Menjamin kepastian usaha melalui kepastian hukum.</li></ol>
f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri wisata dengan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inventarisasi potensi obyek-obyek wisata di berbagai wilayah;</li></ol>



meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, daya tarik wisata, serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Inventarisasi potensi-potensi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan berbasis potensi lokal;</li><li>3. Peningkatan promosi pariwisata daerah;</li><li>4. Identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha pariwisata;</li><li>5. Inventarisasi potensi obyek wisata daerah;</li><li>6. Identifikasi dan inventarisasi SDM pariwisata;</li><li>7. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata daerah;</li><li>8. Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan.</li></ol>
---	---

### MISI KE 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kapasitas, daya dukung dan kualitas transportasi;</li><li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;</li><li>3. Pengembangan jalan lingkaran kota (<i>Outer ring road</i>);</li><li>4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung trayek angkutan;</li><li>5. Pengembangan jaringan transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara di wilayah sekitar;</li><li>6. Pengembangan sistem terminal dan sub terminal secara hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah;</li><li>7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi terutama kawasan strategis, kawasan terpencil dan kawasan rawan bencana.</li></ol>
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis;</li><li>2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral; dan</li><li>3. Pengendalian pemanfaatan ruang terkait peraturan zonasi dan perijinan.</li></ol>
c. Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan;</li><li>2. Identifikasi dan inventarisasi kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana;</li><li>3. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis ekonomis dan kawasan tertinggal.</li></ol>
d. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal serta tertatanya lingkungan sehat dan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan;</li><li>2. Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses</li></ol>



	kegiatan kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.
e. Pengelolaan sumber daya air diarahkan dalam pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konservasi sumberdaya air dalam melestarikan kuantitas dan kualitas air;</li><li>2. Identifikasi sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku;</li><li>3. Identifikasi penyebab terjadinya daya rusak air;</li><li>4. Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air</li></ol>

### MISI KE 7 : Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pengembangan Sumber daya alam hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah serta pelestarian keanekaragaman hayati.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA Hayati</li><li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya</li><li>3. Identifikasi dan inventarisasi plasma nutfah spesifik local</li><li>4. Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati</li></ol>
b. Pengembangan energi diarahkan menuju pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Energi</li><li>2. Identifikasi dan inventarisasi potensi energi alternatif yang ramah lingkungan</li></ol>
c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi SDA terbarukan</li><li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan</li><li>3. Identifikasi kawasan konservasi SDA terbarukan</li><li>4. Pencegahan dan pengawasan terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap SDA terbarukan</li><li>5. Identifikasi dan inventarisasi pencemaran, perusakan terhadap SDA terbarukan (tanah, dan lahan, udara, hutan, dan vegetasi)</li><li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA terbarukan</li><li>7. Penataan kelembagaan, pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA terbarukan</li><li>8. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan SDA terbarukan</li></ol>
d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam tak Terbarukan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang efisien, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi dan inventarisasi SDA tak terbarukan</li><li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan</li><li>3. Identifikasi kawasan konservasi SDA tak terbarukan</li><li>4. Identifikasi dan inventarisasi terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap SDA tak terbarukan</li><li>5. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA Tak terbarukan</li><li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA tak terbarukan</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penataan kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan</li> <li>8. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan SDA tak terbarukan</li> </ol>
e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada upaya pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat paska bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi, sosialisasi dan membangun kesadaran masyarakat wilayah rentan dan rawan bencana</li> <li>2. Penataan sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan</li> <li>3. Inventarisasi kelembagaan bencana alam</li> <li>4. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan pra, saat dan paska bencana alam</li> <li>5. Identifikasi, sosialisasi dan membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup</li> <li>6. Pembentukan kelembagaan kebencanaan</li> </ol>

### 5.2.2 Tahap Lima Tahun ke-2 (2010-2015)

#### MISI KE 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur;</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> <li>4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;</li> <li>5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan;</li> <li>6. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam kapasitas penguatan kelembagaan;</li> <li>7. Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat;</li> <li>8. Penguatan pemerintahan desa/kelurahan;</li> <li>9. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepada daerah;</li> <li>10. Peningkatan fungsi pengawasan internal;</li> <li>11. Pengembangan kerjasama antara daerah dan antar lembaga; dan</li> <li>12. Standarisasi kompetensi jabatan</li> </ol>
b. Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan penguatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah</li> <li>2. Penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar PAD</li> <li>3. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisien, efektif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan</li> </ol>
c. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat</li> <li>2. Optimalisasi kelembagaan hukum</li> <li>3. Peningkatan advokasi dan kesadaran hukum masyarakat</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengupayakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme</li> <li>5. Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-anak</li> <li>6. Pengamanan aset-aset pemerintah daerah</li> <li>7. Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat</li> <li>8. Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>9. Pengembangan kerjasama dengan aparat penegak hukum</li> </ol>
d. Pembangunan politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi;</li> <li>2. Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; dan</li> <li>3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik</li> </ol>
e. Pembangunan komunikasi dan informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember;</li> <li>2. Peningkatan pemanfaatan, pengembangan jaringan teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember;</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar; dan</li> <li>4. Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi.</li> </ol>

**MISI KE 2 : Menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia**

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga</li> <li>2. Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan bagi pendidikan anak usia dini (PAUD);</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa;</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah dalam rangka memenuhi wajib belajar 9 tahun;</li> <li>5. Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat;</li> <li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal;</li> <li>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan; dan</li> </ol>



	8. Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif.
b. Pembangunan moral dan etika diarahkan pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanaman nilai – nilai moral dan etika dalam lingkungan keluarga dan masyarakat</li><li>2. Mewujudkan kurikulum pendidikan yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan etika</li><li>3. Mengedepankan kepemimpinan yang mengedepankan suri tauladan moral dan etika</li><li>4. Terlaksananya nilai – nilai luhur bangsa, agama dan budaya lokal dalam kehidupan sehari - hari</li></ol>
c. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ekonomi</li><li>2. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah serta budaya-budaya religius</li><li>3. Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda</li></ol>
d. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan serta karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta ketrampilan pemuda</li><li>2. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda</li><li>3. Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang</li><li>4. Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga</li><li>5. Pembinaan karakter kebangsaan bagi pemuda</li></ol>
e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi yang wajar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta perlindungan dan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan pemahaman dan penerapan kesetaraan serta keadilan gender di segala bidang;</li><li>2. Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan;</li><li>3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan</li><li>4. Peningkatan peran kelembagaan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.</li></ol>

### MISI KE 3 : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan;</li><li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara merata;</li><li>3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan;</li><li>4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata;</li><li>5. Peningkatan promosi kesehatan;</li><li>6. Peningkatan kesehatan lingkungan dan keluarga;</li><li>7. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana; dan</li><li>8. Peningkatan gizi masyarakat.</li></ol>
b. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang ideal melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas;</li><li>2. Pengendalian mobilitas penduduk dengan menata penyebaran lapangan pekerjaan di seluruh wilayah;</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan <i>klaster spasial</i>; dan</li> <li>4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan.</li> </ol>
c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan perluasan lapangan kerja khususnya yang bersifat padat karya;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja;</li> <li>3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;</li> <li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal;</li> <li>5. Peningkatan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja;</li> <li>6. Peningkatan standar pengupahan yang layak; dan</li> <li>7. Peningkatan keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja.</li> </ol>
d. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial;</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar;</li> <li>3. Penanganan dampak sosial akibat bencana; dan</li> <li>4. Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> </ol>

**MISI KE 4 : Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Sumberdaya Lokal**

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan komoditas unggulan daerah</li> <li>2. Peningkatan teknologi budidaya, produksi serta pasca panen dan pengolahan</li> <li>3. Peningkatan, penguatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan</li> </ol>
b. Pengembangan sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi pertanian dan perikanan dalam lingkup luas dalam rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional;</li> <li>2. Mengembangkan usaha pertanian dan perikanan dengan pendekatan basis potensi kewilayahan;</li> <li>3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan;</li> <li>4. Meningkatkan sistem informasi produksi dan informasi pasar;</li> <li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;</li> <li>6. Menyediakan dan menambah sarana dan prasarana tempat pemasaran hasil pertanian dan</li> </ol>



	<p>perikanan berbasis agribisnis secara terpadu;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar dan permodalan;</li><li>8. Peningkatan pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan</li><li>9. Menata jaringan dalam sistem informasi produksi dan informasi pasar.</li></ol>
--	--

**MISI KE 5 : Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>AGENDA</b>
a. Penataan Struktur industri diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menata struktur industri kecil dan menengah berdasar potensi dan unggulan wilayah;</li><li>2. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri;</li><li>3. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal;</li><li>4. Menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana bagi kluster industri;</li><li>5. Menerapkan IPTEK dalam produksi bagi Industri Kecil dan Menengah; dan</li><li>6. Mengembangkan akses pasar dan permodalan Industri Kecil dan Menengah.</li></ol>
b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan sistem informasi pasar;</li><li>2. Menjamin ketersediaan dan harga produk kebutuhan pokok masyarakat;</li><li>3. Memberikan perlindungan konsumen dan produsen.</li></ol>
c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank;</li><li>2. Memfasilitasi kredit lembaga keuangan terhadap koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.</li></ol>
d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;</li><li>2. Menumbuhkan jiwa wirausaha untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing;</li><li>3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;</li><li>4. Meningkatkan kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha skala besar.</li></ol>
e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan sistem perijinan dan kepastian usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan dan penataan manajemen pengelolaan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi;</li><li>2. Penataan sistem investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li><li>3. Penyediaan infrastruktur penunjang investasi;</li><li>4. Meningkatkan promosi untuk mendukung investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li><li>5. Menjamin kepastian usaha melalui kepastian hukum.</li></ol>



f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri wisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, daya tarik wisata, serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengevaluasi pengelolaan obyek-obyek wisata;</li><li>2. Mengevaluasi pengelolaan potensi – potensi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan berbasis potensi lokal;</li><li>3. Peningkatan promosi pariwisata daerah;</li><li>4. Menumbuhkembangkan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata;</li><li>5. Peningkatan potensi unggulan obyek wisata daerah;</li><li>6. Peningkatan kualitas SDM pariwisata;</li><li>7. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata daerah;</li><li>8. Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan.</li></ol>
--	---

### MISI KE 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kapasitas, daya dukung dan kualitas transportasi;</li><li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;</li><li>3. Peningkatan jalan lingkar kota (<i>Outer ring road</i>);</li><li>4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung trayek angkutan;</li><li>5. Pengembangan jaringan transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara diwilayah sekitar;</li><li>6. Pengembangan sistem terminal dan sub terminal secara hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah;</li><li>7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi terutama kawasan strategis, kawasan terpencil dan kawasan rawan bencana.</li></ol>
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis;</li><li>2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral; dan</li><li>3. Pengendalian pemanfaatan ruang terkait peraturan zonasi dan perijinan</li></ol>
c. Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan;</li><li>2. Identifikasi dan inventarisasi kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana;</li><li>3. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis ekonomis dan kawasan tertinggal.</li></ol>
d. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal serta tertatanya lingkungan sehat dan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan;</li></ol>



diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk	2. Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.
e. Pengelolaan sumber daya air diarahkan dalam pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air	1. Konservasi sumberdaya air dalam melestarikan kuantitas dan kualitas air; 2. Identifikasi sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku; 3. Identifikasi penyebab terjadinya daya rusak air; 4. Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air

### MISI KE 7 : Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pengembangan Sumber daya alam hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah serta pelestarian keanekaragaman hayati.	1. Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA Hayati 2. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya 3. Identifikasi dan inventarisasi plasma nutfah spesifik local 4. Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati
b. Pengembangan energi diarahkan menuju pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan	1. Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Energi 2. Identifikasi dan inventarisasi potensi energi alternatif yang ramah lingkungan
c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan	1. Identifikasi dan inventarisasi SDA terbarukan 2. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan 3. Identifikasi kawasan konservasi SDA terbarukan 4. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Terbarukan 5. Identifikasi dan inventarisasi pencemaran, perusakan terhadap SDA terbarukan (tanah, dan lahan, udaha, hutan, dan vegetasi) 6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA terbarukan 7. Penataan kelembagaan, pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA terbarukan 8. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan SDA terbarukan
d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam tak Terbarukan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang efisien, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan	1. Identifikasi dan inventarisasi SDA tak terbarukan 2. Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan 3. Identifikasi kawasan konservasi SDA tak terbarukan 4. Identifikasi dan inventarisasi terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap SDA tak terbarukan 5. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Tak terbarukan 6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan



	<p>perundang-undangan tentang SDA tak terbarukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penataan kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan</li> <li>8. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan SDA tak terbarukan</li> </ol>
e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada upaya pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat paska bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan membangun kesadaran masyarakat wilayah rentan dan rawan bencana</li> <li>2. Penataan sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan</li> <li>3. Koordinasi antar lembaga dalam pengurangan resiko bencana alam</li> <li>4. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan pra, saat dan paska bencana alam</li> <li>5. Sosialisasi dan membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup</li> <li>6. Peningkatan kelembagaan kebencanaan</li> </ol>

### 5.2.3 Tahap Lima Tahun ke-3 (2015-2020)

#### MISI KE 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur;</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> <li>4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;</li> <li>5. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan;</li> <li>6. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam kapasitas penguatan kelembagaan;</li> <li>7. Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat;</li> <li>8. Penguatan dan pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan;</li> <li>9. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepada daerah;</li> <li>10. Peningkatan fungsi pengawasan internal;</li> <li>11. Peningkatan dan pengelolaan kerjasama antara daerah dan antar lembaga; dan</li> <li>12. Standarisasi kompetensi jabatan</li> </ol>
b. Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah</li> <li>2. Penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar PAD</li> <li>3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisien, efektif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan</li> </ol>



<p>c. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat</li> <li>2. Optimalisasi kelembagaan hukum</li> <li>3. Peningkatan advokasi dan kesadaran hukum masyarakat</li> <li>4. Mengupayakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme</li> <li>5. Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-anak</li> <li>6. Pengamanan aset-aset pemerintah daerah</li> <li>7. Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat</li> <li>8. Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>9. Pengembangan kerjasama dengan aparat penegak hukum</li> </ol>
<p>d. Pembangunan politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;</li> <li>2. Mengedepankan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; dan</li> <li>3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik</li> </ol>
<p>e. Pembangunan komunikasi dan informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember;</li> <li>2. Peningkatan pemanfaatan, pengembangan jaringan teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember;</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar; dan</li> <li>4. Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi.</li> </ol>

**MISI KE 2 : Menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia**

<p><b>ARAHAN KEBIJAKAN</b></p>	<p><b>AGENDA</b></p>
<p>a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyempurnaan pelayanan pendidikan;</li> <li>2. Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan bagi pendidikan anak usia dini (PAUD);</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa;</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh masyarakat;</li> <li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal;</li> <li>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan; dan</li> <li>8. Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif.</li> </ol>
b. Pembangunan moral dan etika diarahkan pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman nilai – nilai moral dan etika dalam lingkungan keluarga dan masyarakat</li> <li>2. Mewujudkan kurikulum pendidikan yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan etika</li> <li>3. Mengedepankan kepemimpinan yang mengedepankan suri tauladan moral dan etika</li> <li>4. Terlaksananya nilai – nilai luhur bangsa, agama dan budaya lokal dalam kehidupan sehari - hari</li> </ol>
c. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ekonomi</li> <li>2. Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya religius</li> <li>3. Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda</li> </ol>
d. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan serta karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta ketrampilan pemuda</li> <li>2. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda</li> <li>3. Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang</li> <li>4. Peningkatan peran dan pengelolaan organisasi pemuda dan olahraga</li> <li>5. Pembinaan karakter kebangsaan bagi pemuda</li> </ol>
e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi yang wajar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta perlindungan dan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemahaman dan penerapan kesetaraan serta keadilan gender di segala bidang;</li> <li>2. Pencegahan trafficking melalui pemberdayaan ekonomi perempuan;</li> <li>3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan</li> <li>4. Peningkatan peran kelembagaan dan kualitas serta layanan dalam perlindungan perempuan dan anak.</li> </ol>

### MISI KE 3 : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan;</li> <li>2. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan secara merata;</li> <li>3. Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan;</li> <li>4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan promosi kesehatan;</li> <li>6. Peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dan keluarga;</li> <li>7. Optimalisasi pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana; dan</li> <li>8. Peningkatan gizi masyarakat.</li> </ol>
b. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang ideal melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas;</li> <li>2. Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan lapangan pekerjaan di seluruh wilayah;</li> <li>3. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan <i>klaster spasial</i>; dan</li> <li>4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan.</li> </ol>
c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan perluasan lapangan kerja berdasar tata ruang wilayah dan potensi lokal khususnya yang bersifat padat karya;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja;</li> <li>3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;</li> <li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal;</li> <li>5. Optimalisasi sistem perlindungan terhadap tenaga kerja;</li> <li>6. Peningkatan standar pengupahan yang layak; dan</li> <li>7. Peningkatan keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja.</li> </ol>
d. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial;</li> <li>2. Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar;</li> <li>3. Peningkatan penanganan dampak sosial akibat bencana; dan</li> <li>4. Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.</li> </ol>

**MISI KE 4 : Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Sumberdaya Lokal**

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan komoditas unggulan daerah</li> <li>2. Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, produksi serta pasca panen dan pengolahannya</li> <li>3. Peningkatan, penguatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan</li> </ol>
b. Pengembangan sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi pertanian dan perikanan dalam lingkup luas dalam</li> </ol>



<p>subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar</p>	<p>rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan usaha pertanian dan perikanan dengan pendekatan basis potensi kewilayahan;</li> <li>3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan;</li> <li>4. Optimalisasi pengelolaan sistem informasi produksi dan informasi pasar;</li> <li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;</li> <li>6. Pengembangan sarana dan prasarana tempat pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis agribisnis secara terpadu;</li> <li>7. Menguatkan dan mengembangkan akses pasar dan permodalan;</li> <li>8. Optimalisasi pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan</li> <li>9. Mengembangkan penguasaan dan memperluas sistem informasi produksi dan informasi pasar.</li> </ol>
---	---

**MISI KE 5 : Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

<p><b>ARAHAN KEBIJAKAN</b></p>	<p><b>AGENDA</b></p>
<p>a. Penataan Struktur industri diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan struktur industri kecil dan menengah berdasar potensi dan unggulan wilayah;</li> <li>2. Mengembangkan, menguatkan, memantapkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;</li> <li>3. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal;</li> <li>4. Menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana bagi klaster industri;</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam produksi bagi Industri Kecil dan Menengah; dan</li> <li>6. Memperkuat akses pasar dan permodalan Industri Kecil dan Menengah</li> </ol>
<p>b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat sistem dan jaringan informasi pasar;</li> <li>2. Memperkuat stabilitas ketersediaan dan harga produk kebutuhan pokok masyarakat;</li> <li>3. Memberikan perlindungan konsumen dan produsen.</li> </ol>
<p>c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank;</li> <li>2. Peningkatan kredit lembaga keuangan terhadap koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.</li> </ol>



<p>d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;</li> <li>2. Menguatkan jiwa wirausaha untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing;</li> <li>3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha skala besar.</li> </ol>
<p>e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan sistem perijinan dan kepastian usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penataan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi;</li> <li>2. Meningkatkan sistem investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li> <li>3. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur penunjang investasi;</li> <li>4. Optimalisasi promosi untuk mendukung investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li> <li>5. Menjamin kepastian usaha melalui kepastian hukum.</li> </ol>
<p>f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri wisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, daya tarik wisata, serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penataan pengelolaan obyek-obyek wisata;</li> <li>2. Pengembangan dan penataan pengelolaan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan berbasis potensi lokal;</li> <li>3. Peningkatan promosi pariwisata daerah;</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata;</li> <li>5. Peningkatan daya saing obyek wisata daerah;</li> <li>6. Peningkatan kualitas SDM pariwisata;</li> <li>7. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata daerah;</li> <li>8. Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan.</li> </ol>

**MISI KE 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan**

<p><b>ARAHAN KEBIJAKAN</b></p>	<p><b>AGENDA</b></p>
<p>a. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas, daya dukung dan kualitas transportasi;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;</li> <li>3. Peningkatan jalan lingkar kota (<i>Outer ring road</i>);</li> <li>4. Pengembangan trayek angkutan antar dan inter moda serta menjangkau kawasan strategis serta pedesaan;</li> <li>5. Peningkatan aksesibilitas transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara di wilayah sekitar;</li> <li>6. Peningkatan sistem terminal dan sub terminal secara hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah;</li> <li>7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi terutama kawasan strategis, kawasan terpencil dan kawasan rawan bencana.</li> </ol>



<p>b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan evaluasi tata ruang wilayah dan kawasan strategis;</li> <li>2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral; dan</li> <li>3. Pengendalian pemanfaatan ruang terkait peraturan zonasi dan perijinan.</li> </ol>
<p>c. Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan;</li> <li>2. Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana;</li> <li>3. Pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis ekonomis dan kawasan tertinggal.</li> </ol>
<p>d. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal serta tertatanya lingkungan sehat dan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan;</li> <li>2. Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.</li> </ol>
<p>e. Pengelolaan sumber daya air diarahkan dalam pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan konservasi sumberdaya air dalam melestarikan kuantitas dan kualitas air;</li> <li>2. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku;</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air melalui manajemen pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS;</li> <li>4. Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air</li> </ol>

### MISI KE 7 : Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan

<p><b>ARAHAN KEBIJAKAN</b></p>	<p><b>AGENDA</b></p>
<p>a. Pengembangan Sumber daya alam hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah serta pelestarian keanekaragaman hayati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan potensi SDA Hayati</li> <li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya</li> <li>3. Perlindungan dan pengembangan plasma nutfah spesifik lokal</li> <li>4. Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati</li> </ol>
<p>b. Pengembangan energi diarahkan menuju pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan dan pemerataan Distribusi Energi</li> <li>2. Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan</li> </ol>
<p>c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan SDA terbarukan</li> <li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan</li> <li>3. Peningkatan kawasan konservasi SDA terbarukan melalui perdayaan masyarakat</li> <li>4. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Terbarukan</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penanganan pencemaran, perusakan terhadap SDA terbarukan (tanah, dan lahan, udara, hutan, dan vegetasi)</li> <li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA terbarukan</li> <li>7. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA terbarukan</li> <li>8. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA terbarukan</li> </ol>
d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam tak Terbarukan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang efisien, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan SDA tak terbarukan</li> <li>2. Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan</li> <li>3. Peningkatan konservasi kawasan SDA tak terbarukan melalui perdayaan masyarakat</li> <li>4. Identifikasi dan inventarisasi terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap SDA tak terbarukan</li> <li>5. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Tak terbarukan</li> <li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA tak terbarukan</li> <li>7. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan</li> <li>8. Rehabilitasi kerusakan SDA tak terbarukan</li> </ol>
e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada upaya pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat paska bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kesadaran masyarakat di wilayah rentan dan rawan bencana</li> <li>2. Peningkatan sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan</li> <li>3. Peningkatan fungsi koordinasi antar lembaga dalam pengurangan resiko bencana alam</li> <li>4. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan pra, saat dan paska bencana alam</li> <li>5. Membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup</li> <li>6. Penataan kelembagaan kebencanaan</li> </ol>

#### 5.2.4 Tahap Lima Tahun ke-4 (2020-2025)

##### MISI KE 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur;</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> <li>4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;</li> <li>5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemerintahan;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam kapasitas penguatan kelembagaan;</li><li>7. Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat;</li><li>8. Penguatan dan pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan;</li><li>9. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepada daerah;</li><li>10. Peningkatan fungsi pengawasan internal;</li><li>11. Peningkatan dan pengelolaan kerjasama antara daerah dan antar lembaga; dan</li><li>12. Standarisasi kompetensi jabatan</li></ol>
b. Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah</li><li>2. Penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar PAD</li><li>3. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisien, efektif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan</li></ol>
c. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat</li><li>2. Optimalisasi kelembagaan hukum</li><li>3. Peningkatan advokasi dan kesadaran hukum masyarakat</li><li>4. Mengupayakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme</li><li>5. Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-anak</li><li>6. Pengamanan aset-aset pemerintah daerah</li><li>7. Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat</li><li>8. Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li><li>9. Pengembangan kerjasama dengan aparat penegak hukum</li></ol>
d. Pembangunan politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;</li><li>2. Mengedepankan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; dan</li><li>3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik</li></ol>
e. Pembangunan komunikasi dan informasi diarahkan menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi pengelolaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember;</li><li>2. Optimalisasi dalam pemanfaatan, pengembangan jaringan teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember;</li><li>3. Optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar; dan</li></ol>



	4. Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi.
--	---

**MISI KE 2 : Menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia**

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyempurnaan pelayanan pendidikan;</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD);</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa;</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun;</li> <li>5. Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh masyarakat;</li> <li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal;</li> <li>7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan; dan</li> <li>8. Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif.</li> </ol>
b. Pembangunan moral dan etika diarahkan pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman nilai – nilai moral dan etika dalam lingkungan keluarga dan masyarakat</li> <li>2. Mewujudkan kurikulum pendidikan yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan etika</li> <li>3. Terwujudnya kepemimpinan yang mengedepankan suri tauladan moral dan etika</li> <li>4. Terlaksananya nilai – nilai luhur bangsa, agama dan budaya lokal dalam kehidupan sehari - hari</li> </ol>
b. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ekonomi</li> <li>2. Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya religius</li> <li>3. Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda</li> </ol>
c. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan serta karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta ketrampilan pemuda</li> <li>2. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda</li> <li>3. Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang</li> <li>4. Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga</li> <li>5. Pembinaan karakter kebangsaan bagi pemuda</li> </ol>
d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, menjamin kondisi yang wajar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta perlindungan dan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang;</li> <li>2. Pencegahan trafficking melalui optimalisasi pemberdayaan ekonomi perempuan;</li> <li>3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan</li> <li>4. Peningkatan peran kelembagaan dan kualitas</li> </ol>



	serta layanan dalam perlindungan perempuan dan anak.
--	--

### MISI KE 3 : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kesehatan;</li><li>2. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan secara merata;</li><li>3. Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan;</li><li>4. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata;</li><li>5. Peningkatan promosi kesehatan;</li><li>6. Peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dan keluarga;</li><li>7. Optimalisasi pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana; dan</li><li>8. Peningkatan gizi masyarakat.</li></ol>
b. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang ideal melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas;</li><li>2. Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan lapangan pekerjaan di seluruh wilayah;</li><li>3. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan <i>klaster spasial</i>; dan</li><li>4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan.</li></ol>
c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penciptaan perluasan lapangan kerja berdasar tata ruang wilayah dan potensi lokal khususnya yang bersifat padat karya;</li><li>2. Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja;</li><li>3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;</li><li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal;</li><li>5. Optimalisasi sistem perlindungan terhadap tenaga kerja;</li><li>6. Peningkatan standar pengupahan yang layak; dan</li><li>7. Peningkatan keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja.</li></ol>
d. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial;</li><li>2. Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar;</li><li>3. Optimalisasi penanganan dampak sosial akibat bencana; dan</li><li>4. Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.</li></ol>



**MISI KE 4 : Mewujudkan Agribisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Sumberdaya Lokal**

<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>AGENDA</b>
a. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan komoditas unggulan daerah</li><li>2. Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, produksi serta pasca panen dan pengolahannya</li><li>3. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan</li></ol>
b. Pengembangan sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi pertanian dan perikanan dalam lingkup luas dalam rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional;</li><li>2. Mengembangkan usaha pertanian dan perikanan dengan pendekatan basis potensi kewilayahan;</li><li>3. Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan;</li><li>4. Optimalisasi pengelolaan sistem informasi produksi dan informasi pasar;</li><li>5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan dalam upaya tercapainya diversifikasi dan nilai tambah produk;</li><li>6. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana tempat pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis agribisnis secara terpadu</li><li>7. Optimalisasi pengembangan akses pasar dan permodalan;</li><li>8. Optimalisasi pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan</li><li>9. Optimalisasi dalam pengelolaan sistem informasi produksi dan informasi pasar.</li></ol>

**MISI KE 5 : Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

<b>ARAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>AGENDA</b>
a. Penataan Struktur industri diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat struktur industri kecil dan menengah berdasar potensi dan unggulan wilayah;</li><li>2. Mengembangkan, menguatkan, memantapkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri;</li><li>3. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal;</li><li>4. Menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana bagi kluster industri;</li><li>5. Memantapkan penerapan IPTEK dalam produksi bagi Industri Kecil dan Menengah; dan</li></ol>



	6. Optimalisasi akses pasar dan permodalan Industri Kecil dan Menengah.
b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sistem dan jaringan informasi pasar;</li> <li>2. Memperkuat stabilitas ketersediaan dan harga produk kebutuhan pokok masyarakat;</li> <li>3. Memberikan perlindungan konsumen dan produsen.</li> </ol>
c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank;</li> <li>2. Optimalisasi kredit lembaga keuangan terhadap koperasi, UMKM dan lembaga Keuangan Non Bank.</li> </ol>
d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kompetensi SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;</li> <li>2. Memantapkan kompetensi wirausaha untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing;</li> <li>3. Memantapkan iklim usaha yang kondusif;</li> <li>4. Memantapkan kuantitas dan kualitas kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha skala besar.</li> </ol>
e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan sistem perijinan dan kepastian usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi;</li> <li>2. Memantapkan sistem investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li> <li>3. Optimalisasi infrastruktur penunjang investasi;</li> <li>4. Optimalisasi promosi untuk mendukung investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif;</li> <li>5. Menjamin kepastian usaha melalui kepastian hukum.</li> </ol>
f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri wisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, daya tarik wisata, serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi dan revitalisasi obyek-obyek wisata;</li> <li>2. Optimalisasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan berbasis potensi lokal;</li> <li>3. Optimalisasi promosi pariwisata daerah;</li> <li>4. Optimalisasi kerjasama antar pelaku usaha pariwisata;</li> <li>5. Meningkatkan dan memadukan daya saing wisata;</li> <li>6. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata;</li> <li>7. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata daerah;</li> <li>8. Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan.</li> </ol>

### MISI KE 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas, daya dukung dan kualitas transportasi;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;</li> <li>3. Optimalisasi fungsi jalan lingkar kota (<i>Outer ring road</i>);</li> <li>4. Optimalisasi trayek angkutan antar dan inter moda</li> </ol>



	<p>serta menjangkau kawasan strategis serta pedesaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Optimalisasi aksesibilitas transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara di wilayah sekitar;</li> <li>6. Optimalisasi sistem terminal dan sub terminal secara hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah;</li> <li>7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi terutama kawasan strategis, kawasan terpencil dan kawasan rawan bencana.</li> </ol>
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan evaluasi tata ruang wilayah dan kawasan strategis;</li> <li>2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral; dan</li> <li>3. Pengendalian pemanfaatan ruang terkait peraturan zonasi dan perijinan.</li> </ol>
c. Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan;</li> <li>2. Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana;</li> <li>3. Pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis ekonomis dan kawasan tertinggal.</li> </ol>
d. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal serta tertatanya lingkungan sehat dan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan;</li> <li>2. Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.</li> </ol>
e. Pengelolaan sumber daya air diarahkan dalam pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan konservasi sumberdaya air dalam meleas tarikan kuantitas dan kualitas air;</li> <li>2. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku;</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air melalui manajemen pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS;</li> <li>4. Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air</li> </ol>

**MISI KE 7 : Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan**

ARAHAN KEBIJAKAN	AGENDA
a. Pengembangan Sumber daya alam hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah serta pelestarian keanekaragaman hayati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan potensi SDA Hayati</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya</li> <li>3. Perlindungan dan pengembangan plasma nutfah spesifik lokal</li> <li>4. Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati</li> </ol>



b. Pengembangan energi diarahkan menuju pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan dan pemerataan Distribusi energi</li><li>2. Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan</li></ol>
c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi pengelolaan SDA terbarukan</li><li>2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan</li><li>3. Optimalisasi kawasan konservasi SDA terbarukan melalui perdayaan masyarakat</li><li>4. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Terbarukan</li><li>5. Optimalisasi Penanganan pencemaran, perusakan terhadap SDA terbarukan (tanah, dan lahan, udara, hutan, dan vegetasi)</li><li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA terbarukan</li><li>7. Optimalisasi penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA terbarukan</li><li>8. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA terbarukan</li></ol>
d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam tak Terbarukan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang efisien, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan SDA tak terbarukan</li><li>2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan</li><li>3. Optimalisasi konservasi kawasan SDA tak terbarukan melalui perdayaan masyarakat</li><li>4. Identifikasi dan inventarisasi terjadinya pencemaran dan perusakan terhadap SDA tak terbarukan</li><li>5. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran dan pengrusakan terhadap SDA Tak terbarukan</li><li>6. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA tak terbarukan</li><li>7. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan</li><li>8. Rehabilitasi kerusakan SDA tak terbarukan</li></ol>
e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada upaya pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat paska bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap bencana</li><li>2. Optimalisasi sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan</li><li>3. Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga dalam pengurangan resiko bencana alam</li><li>4. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat paska bencana alam</li><li>5. Penguatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup</li><li>6. Penguatan kelembagaan kebencanaan</li></ol>



## **BAB VI Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Jember juga merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan Kabupaten Jember. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, para pemangku kepentingan serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta harus menjamin konsistensinya.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) Kabupaten Jember berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi terhadap penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember yang disusun oleh Bupati/ Wakil Bupati berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 dapat diubah apabila :
  - a. Terjadi perubahan yang mendasar yang menyebabkan RPJPD tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam tataran lokal, nasional dan global ;
  - b. Tidak mendatangkan kemaslahatan bagi warga masyarakat Kabupaten Jember dan kepentingan daerah.



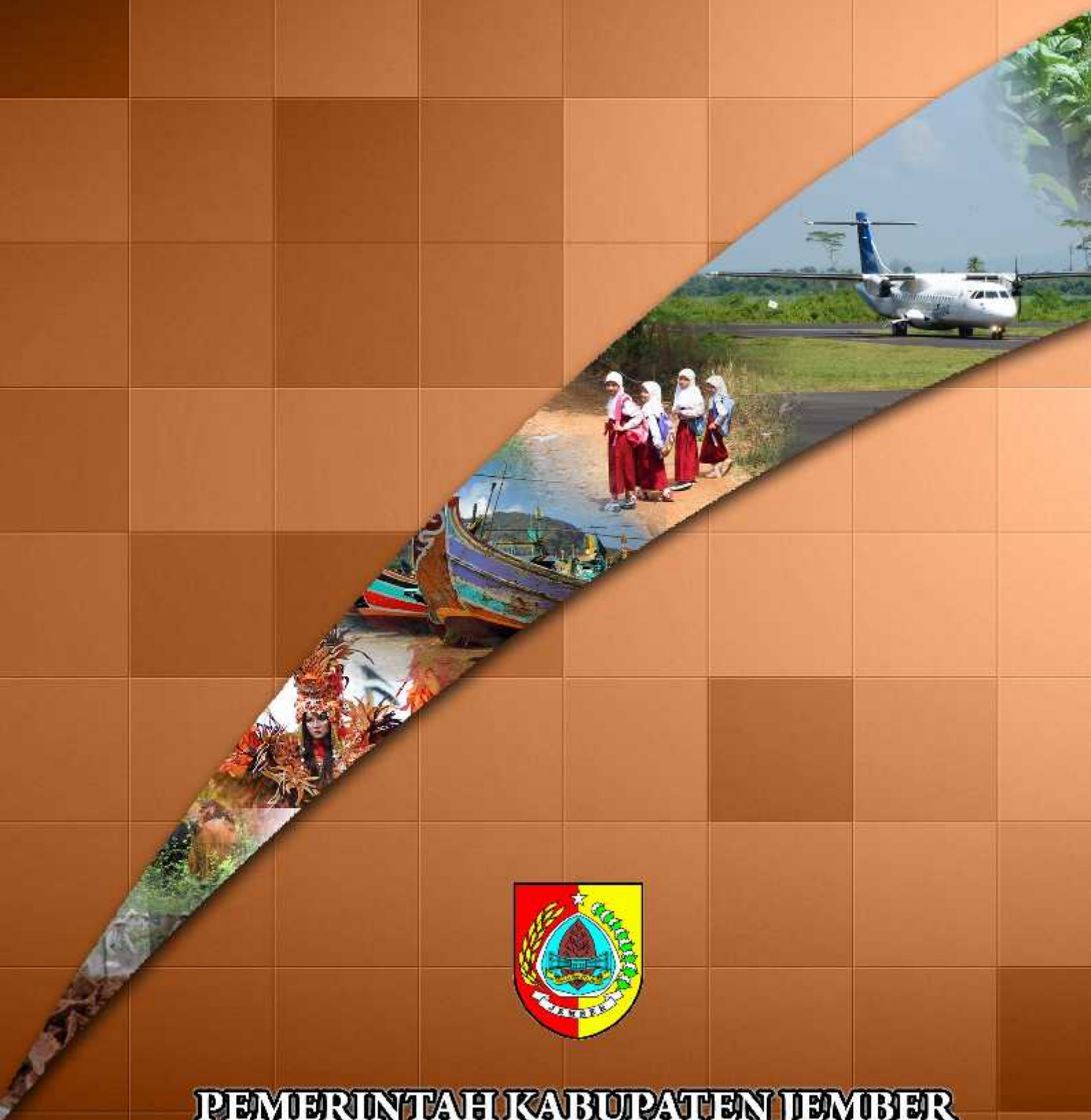
**BUPATI JEMBER,**

**MZA DJALAL**

Diundangkan di Kabupaten Jember  
Pada Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER,**

**SUGIARTO, SH**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19580609 198603 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**